

**PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN LINGKAR BARAT
KEPANJEN SEBAGAI STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT
(Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi ujian sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

SILVILIA AGIES VINDA PARAMITA

115030107111085



Dosen Pembimbing :

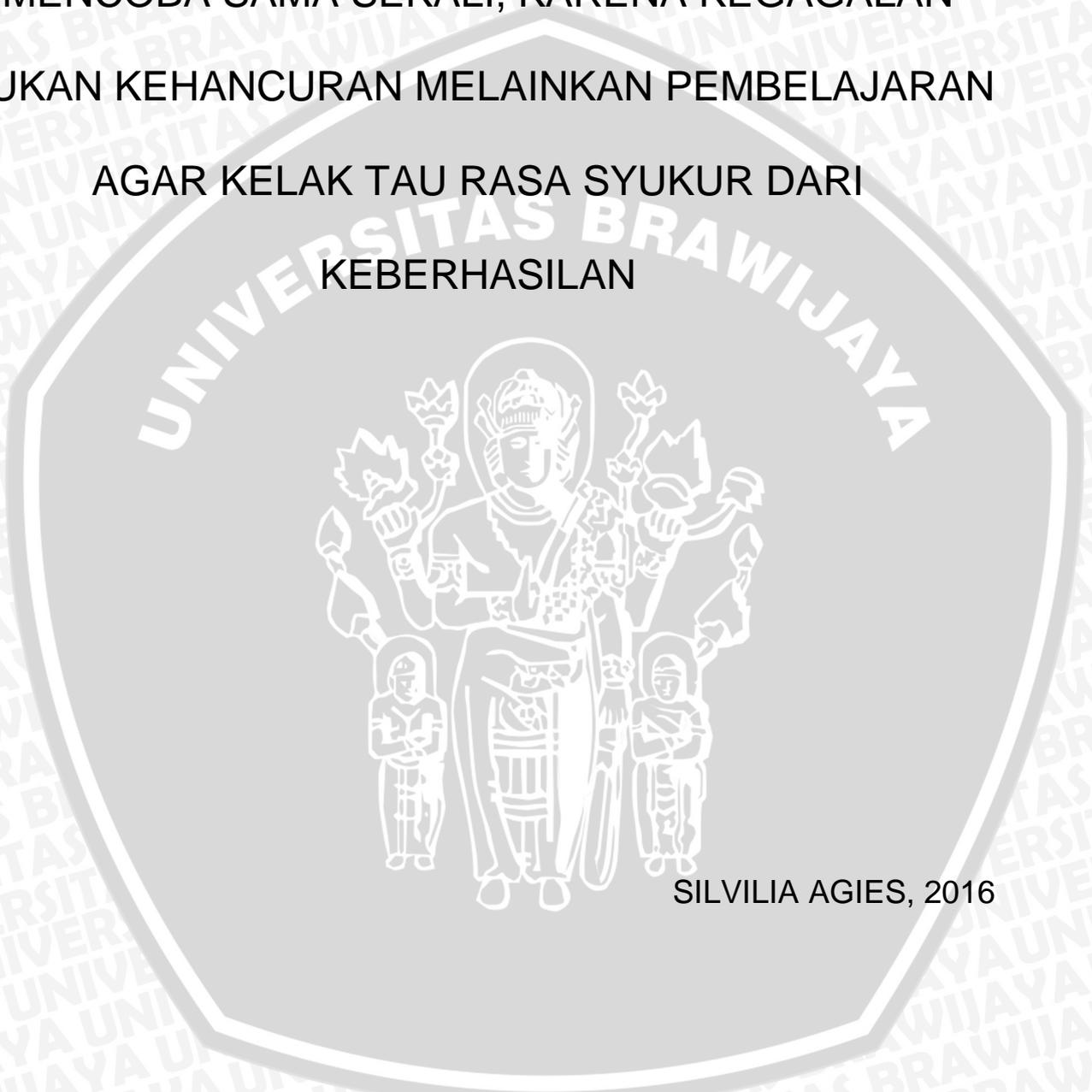
1. Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin
2. Dr. rer. pol. Romy Hermawan, S.Sos, MAP

**ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

MALANG

2016

LEBIH BAIK TERLAMBAT DARI PADA TIDAK
MENCOBA SAMA SEKALI, KARENA KEGAGALAN
BUKAN KEHANCURAN MELAINKAN PEMBELAJARAN
AGAR KELAK TAU RASA SYUKUR DARI
KEBERHASILAN



SILVILIA AGIES, 2016

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pembangunan Infrastruktur Jalna Lingkar Barat Kapanjen Sebagai Strategi Pemerintah Kabupaten Malang Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat. (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang)

Disusun Oleh : Silvilia Agies Vinda Paramita

NIM : 115030107111085

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

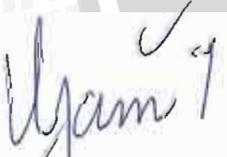
Konsentrasi : -

Malang, 21 Juli 2016

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota


Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin

NIP. 19540817 197412 2 001


Dr. rer. pol. Romv Hermawan, S.Sos. MAP

NIP. 19720405 200312 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU N O. 20 Tahun 2003), Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 24 Mei 2016

Mahasiswa



Silvilia Agies Vinda Paramita
NIM. 115030107111085

RINGKASAN

Silvilia Agies Vinda Paramita, 2016. **Pembangunan Infrastuktur Jalan Lingkar Barat Kepanjen sebagai Strategi Pemerintah Kabupaten Malang dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat (Sudi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang)**. Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin, Dr. rer. pol. Romy Hermawan, S.Sos, MAP.

Penelitian ini dibuat bertujuan untuk menganalisis pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat Kepanjen sebagai strategi pemerintah Kabupaten Malang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, mengetahui dampak positif dan negatif dari pembangunan infrastruktur jalan lingkar Barat Kepanjen terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Kecamatan Kepanjen dan mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat Kepanjen sebagai strategi pemerintah Kabupaten Malang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan observasi non partisipasi dimana peneliti dalam mendapatkan data untuk bahan penelitian hana mengumpulkan data, yaitu peneliti mengumpulkan data dari hasil wawancara dengan beberapa Kepala Bidang Bappeda Kabupaten Malang tentang strategi pemerintah Kabupaten Malang dalam pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat Kepanjen Kabupaten Malang. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah analisa model Miles and Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, kondensi data, penyajian data, dan *conclusions: drawing/verifying*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, strategi pemerintah Kabupaten Malang dalam pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang adalah pembangunan jalan lingkar barat sebagai salah satu strategi pemerintah Kabupaten Malang dalam mengatasi kepadatan Kecamatan Kepanjen dimana kegiatan ekonomi terpusat pada pusat kota, selain itu jalan lingkar barat Kecamatan Kepanjen akan membuka peluang bagi pembangunan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Saran dari peneliti yaitu agar Bappeda Kabupaten Malang juga membangun infrastruktur seperti sarana jalan yang memadai dan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah terpencil lainnya agar pertumbuhan ekonomi berjalan seimbang dan perkembangannya merata. Bappeda harus mensosialisasikan terus kepada masyarakat daerah tentang pentingnya pembangunan infrastruktur mengingat dampak yang diberikannya dari pembangunan infrastruktur sangatlah besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

SUMMARY

Silvilia Agies Vinda Paramita, 2016. **Infrastructure Development Jalan Lingkar Barat Kepanjen as Malang District Government Strategy in Improving Economic Growth (Studi On Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Malang District)**. Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin, Dr. rer. pol. Romy Hermawan, S.Sos, MAP.

The purpose of this research is to analyze the . Infrastructure Development Jalan Lingkar Barat Kepanjen as Malang District Government Strategy in Improving Economic Growth, to know positive and negative impact of west ring road infrastructure development on the development of economic growth and to know the supporting and inbihiling factors of Economic growth development of Kepanjen society pasca west ring road infrastructure development.

This research used descriptive method with qualitative approach. Observation, interview, and documentation is use to collect data. Nonparticipation observation method is used to collect data by interviewing the chief of Bappeda district Malang about the strategy of district Malang Government in a west ring road infrastructure development, Kepanjen. Data analysis technique used the Huberman and Miles model which consist of data collecting, data condensed, data presentation and conclusion drawing/verifying.

The result shows that the strategy of district Malang Government in a west ring road infrastructure development in Kepanjen is a west ring road development as one of the strategy to resalve the density of Kepanjen where the economicactivity is concentrated in the city center, other than that the west ring road Kepanjen will open the opportunity for the development of economic growth.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang sudah melimpahkan segala, Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkar Barat Kepanjen Sebagai Strategi Pemerintah Kabupaten Malang dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang)”**.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Chairul Saleh, Msi selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang.
4. Ibu Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin selaku Ketua Komisi Pembimbing skripsi yang selama ini sudah bersedia memberikan waktunya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas saran, masukan, arahan, nasihat dan semangat kepada penulis yang tentu sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak Dr. rer. pol. Romy Hermawan, S.Sos, MAP selaku Anggota Komisi Pembimbing skripsi yang selama ini sudah bersedia memberikan waktunya untuk

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas saran, masukan, arahan, nasihat dan semangat kepada penulis yang tentu sangat bermanfaat bagi penulis.

6. Bapak/Ibu dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, dan juga memberi kesempatan bagi penulis untuk berdiskusi dan bertanya kepada Bapak/Ibu dosen. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat.
7. Seluruh staf/pegawai Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah membantu kelancaran segala urusan penelitian skripsi ini.
8. Kepala Badan, pemimpin, dan staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang yang sudah mengizinkan penulis melakukan riset di tempat.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sudah berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh hasil terbaik. Namun apabila masih ada kekurangan dan ketidak sempurnaan, maka dengan kerendahan hati, penulis membuka diri terhadap saran dan kritik dari semua pihak untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan referensi bagi pihak lain. Amin..

Malang, 24 Mei 2016

PENULIS

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan Rosul-Nya Nabi Muhammad SAW, karena atas izin-Nya pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Tiada henti penulis ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang sudah mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang sudah menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi. Alhamdulillahirobilalamin akhirnya skripsi ini sudah selesai dan penulis persembahkan karya ini kepada :

1. Allah SWT, terima kasih ya Allah atas kelancaran dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala bantuan dan limpahan rahmat dari-Mu kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi Muhamaad SAW, terima kasih atas segala pesan dan perilaku Rasul yang sangat menginspirasi penulis.
3. Kepada kedua orang tua, Ayah Agus Tiantoro yang telah bekerja keras tidak mengenal lelah dan sakit demi memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya, Ayah yang luar biasa selalu mengingatkan untuk mengingat Allah agar jarak antara Ayah dan saya didekatkan dalam doa, terima kasih atas doanya, terima kasih atas kesabarannya, terima kasih atas semangat dan nasihatnya. Terima kasih untuk semuanya Yah I Love You So Much. Kepada Mamy Erika yang meski jauh dan hampir ngga pernah ketemu tapi saya yakin doa dan kasih sayangnya selalu menemani langkah saya kemanapun. Terima kasih untuk kedua orangtua saya, tanpa kalian saya tidak akan sampai tahap ini.
4. Terima kasih kepada Ibu (nenek) dan Alm. Mbah Kung yang telah merawat saya dari usia 2tahun, terima kasih atas kasih sayangnya yang luar biasa, kesabarannya yang luar biasa, mendidik dan mengajari saya banyak hal, terutama menjadi anak yang kuat dengan segala kondisi dan tidak mudah menyerah. Terima kasih Bu, telah memberikan

kesempatan kepada saya untuk merasakan kasih sayang seorang ibu setiap hari walaupun dari nenek, semoga Ibu sehat panjang umur agar saya diberikan kesempatan untuk menjaga dan membahagiakan Ibu.

5. Terima kasih untuk kedua adik dari Ayah, Wike Bella Agies Safira dan Ghifara Agies Alma Nofa. Terima kasih untuk adik dari Mamy Virgi Septian Ramadhani. Terima kasih kalian sudah menginspirasi untuk menyelesaikan skripsi ini dan menginspirasi saya untuk menjadi kakak yang lebih baik lagi.
6. Terima kasih kepada kedua Mertua, Bapak A. Suhada dan Ibu Tri Mulyani S.pd. Terima kasih banyak atas doa dan dukungannya hingga tahap ini. Kasih sayangnya yang terus menyemangati dan menginspirasi saya untuk terus menjadi lebih baik.
7. Terima kasih kepada suami, Muhammad Dimas Nugroho. Terima kasih atas doa dan dukungannya. Terima kasih atas cinta dan kasih sayangnya dan memotivasi untuk terus menjadi lebih baik. Semoga semakin baik dan sukses untuk kita. Amin.
8. Terima kasih kepada anak saya tercinta, Muhammad Basstra Harta Nugroho. Terimakasih nak, kehadiranmu terus membuat motivasi besar untuk semakin baik dan sukses kelak untuk Abang Basstra. Amin
9. Terima kasih untuk Mama Suta (Tante) dan Om Joko yang telah merawat dari kecil dan pasca melahirkan, terima kasih semangat dan bantuannya yang Subhanalloh kalian orang baik yang luar biasa.
10. Terima kasih kepada keluarga besar dari Ayah di Malang, keluarga besar dari Mamy di Malang dan di Bangka keluarga besar dari suami di Bekasi dan di Jakarta, dan terima kasih kepada sahabat Eka Nurdiansyah, S.Pd dan semua sahabat di Bekasi. Terima kasih semua atas doa, dukungan, bantuan, semoga Allah SWT senantiasa menjaga dan membalas atas segala kebaikan kalian. Amin.

11. Terima kasih kepada sahabat terbaik : Jundah Ayu,S.AB, Andi Novy Arfiani,S.H (Opi), Dewi Fithriasari, Merlin Handayani,S.E, dan Nisma Hasan Abudan. Terima kasih selalu memberikan doa dan dukungan yang luar biasa, memberikan semangat dan kebahagiaan ketika saya mulai kesulitan. Semoga kita dilimpahkan kesehatan kebahagiaan dan kesuksesan. Amin.
12. Terima kasih kepada sahabat dan coach skripsi yang cantik, Rr. Safitri Damayanti,S.AP (Demi). Terima kasih atas bimbingannya, dukungannya dan semangatnya yang ngga pernah bosan mengingatkan untuk terus menyelesaikan skripsi.
13. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan : Rr. Safitri Damayanti S.AP (Demi), Intan Nanda, Ella Alfianita S.AP, Ruth Natalia S.AP, Siti fauzia S.AP, Resita Lendy Renora S.AP, Ferina Safitri S.AP, Okki Kurnita S.AP, Olivia Dia Anggraeni S.AP, Retno Handayani S.AP, Mimi Qamarina, Dannang Sukardo S.H, Hammurabi Wiasadono, Vega Alif Wijaya S.H, I Gede Danendra S.H, Habibi Rz S.H, Ilham Arfian S.H, Bayu Surya Handoko S.AP, Noven Aulia, Bimo Soerjo Putro, Adhika Ratdiananto S.Pn, Imam Nur Akbar S.Pn, M.Aulia Rahman S.AP, Rizki Dwi Satrio S.AP, Galih Darmawan, Vinna Kumala S.AP, Vanni Kumala S.AP, Prastyo Eka dan seluruh teman dan sahabat FIA Publik 2011 yang telah mendukung dan membantu saya. Kepada teman dan sahabat TK, SD, SMP dan SMA Lab School khususnya sahabat Gaper 2011.
14. Dan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu saya selama menyelesaikan studi di Malang. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kalian. Amin.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua.

Malang, Mei 2016

PENULIS



DAFTAR ISI

MOTTO.....	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI.....	iii
RINGKASAN.....	iv
SUMMARY.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xv
LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kontribusi Penelitian	9
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Strategi.....	15
1. Syarat-syarat Strategi.....	16
2. Strategi Pembangunan Daerah.....	17
3. Strategi Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi.....	22
B. Pembangunan.....	23
1. Pembangunan Daerah.....	26
a. Peran Pemerintah Dalam Pembanguna Daerah.....	30
b. Hambatan Dalam Pembangunan Daerah.....	33
2. Pembangunan Infrastruktur.....	37
a. Jenis Infrastruktur.....	41
b. Komponen Infratsruktur.....	42
c. Infrastruktur Jalan.....	43
3. Hubungan Antara Pembangunan Infrastruktur dengan Pertumbuhan Ekonomi	45
C. Pertumbuhan Ekonomi.....	49



1. Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	51
2. Upaya Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi.....	58
a. Tahap-Tahap Pertumbuhan Ekonomi.....	58
b. Alat pendukung Pertumbuhan Ekonomi.....	61
3. Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi.....	63

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	65
B. Fokus Penelitian	67
C. Lokasi dan Situs Penelitian	68
D. Sumber dan Jenis Data	69
E. Teknik Pengumpulan Data.....	70
F. Analisa Data.....	73

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

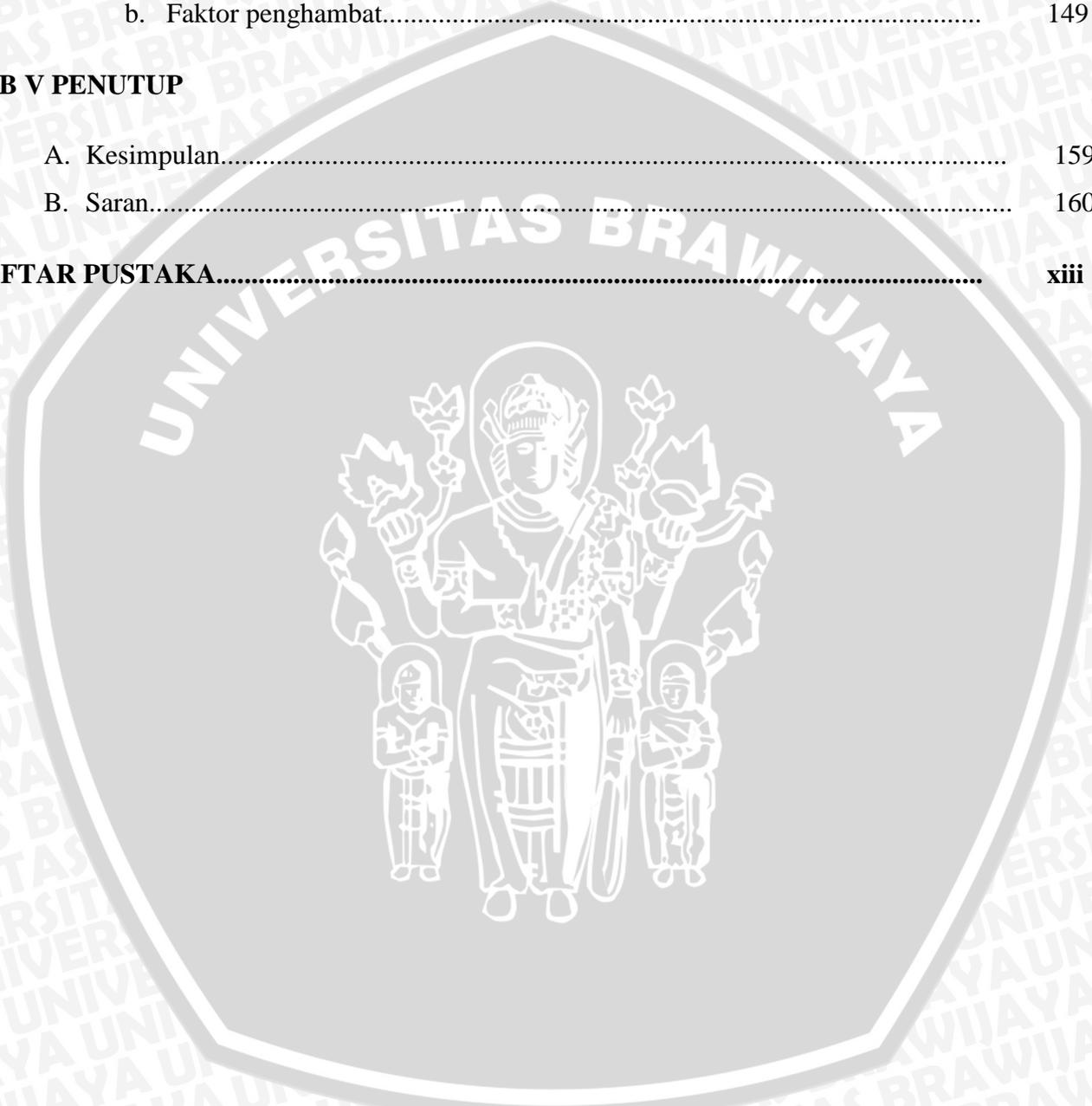
A. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Malang.....	76
1. Kecamatan Kepanjen.....	82
2. Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang.....	83
B. Penyajian Data Fokus Penelitian.....	88
1. Pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkar Barat Kepanjen Sebagai Strategi Pemerintah Kabupaten Malang dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat.....	88
2. Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkar Barat Kepanjen terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Kepanjen.....	103
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkar Barat Kepanjen Sebagai Strategi Pemerintah Kabupaten Malang dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat.....	107
a. Faktor pendukung.....	107
b. Faktor penghambat.....	113
C. Pembahasan.....	115
1. Pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkar Barat Kepanjen Sebagai Strategi Pemerintah Kabupaten Malang dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat.....	119
2. Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkar Barat Kepanjen terhadap	

Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat.....	141
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkar Barat Kepanjen sebagai Strategi Pemerintah Kabupaten Malang dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat.....	144
a. Faktor pendukung.....	144
b. Faktor penghambat.....	149

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	159
B. Saran.....	160

DAFTAR PUSTAKA.....	xiii
----------------------------	-------------



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Paradigma Baru Pembangunan Daerah.....	30
Tabel 2 Visi Misi BAPPEDA Kabupaten Malang.....	85
Tabel 3 Realisasi, Target dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi.....	105
Tabel 4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malang.....	106



DAFTAR GAMBAR/BAGAN

Gambar 1 Sistem Infrastruktur.....	41
Gambar 2 Model analisa interaktif	75
Gambar 3 Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Malang.....	82
Gambar 4 Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Malang.....	87



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara berkembang mengutamakan pembangunan yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang ukuran utamanya: Peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan perkapita. Di Indonesia sendiri pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat masih mengalami kendala dalam pelaksanaannya dan belum mampu sepenuhnya memberikan kesejahteraan atau kemudahan aksesibilitas untuk masyarakat dalam memenuhi kehidupannya, karena kesejahteraan masyarakat terdiri dari berbagai faktor baik yang berupa kebutuhan lahiriah maupun batiniah. Dari sudut pandang ekonomi, kebutuhan hidup harus dipenuhi secara alamiah oleh manusia itu sendiri sebagai pelaku ekonomi. Dalam pengertian ini dikenal bekerjanya mekanisme pasar, atau adanya *invisible hand* yang mengatur sendiri keseimbangan antara kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan. Kesejahteraan digambarkan sebagai pemenuhan kebutuhan (konsumsi), dengan pendapatan yang dihasilkan dari produksi. (Kuncoro, 2010;169)

Kemudahan aksesibilitas atau kesejahteraan masyarakat dihasilkan sendiri oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati sendiri oleh masyarakat. Ilmu ekonomi memusatkan pada pembahasan 3 teori dasar : konsumsi

(pengeluaran), produksi (pendapatan), distribusi (pasar). Sifat multidimensi dan bekerjanya mekanisme pasar memberi implikasi bahwa kesejahteraan masyarakat secara merata dapat dicapai dengan dipenuhinya asumsi dasar setiap anggota masyarakat sebagai pelaku ekonomi berperan dalam kegiatan ekonomi (pembangunan), setiap pelaku ekonomi mempunyai kemampuan (produktivitas), dan setiap anggota masyarakat bertindak adil dan rasional. Dalam kenyataan asumsi dasar tidak mudah terwujud karena kemampuan masyarakat dalam pemilihan faktor produksi tidak sama dan menimbulkan kesenjangan. Kesenjangan tersebut karena adanya kelangkaan sumberdaya alam, sumberdaya manusia (kemampuan) dan kelangkaan waktu. Dalam keadaan ini ekonomi pembangunan berupaya untuk mewujudkan pelaksanaan ekonomi secara nyata dan bertujuan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Dalam ekonomi pembangunan terkandung pemahaman yang tidak hanya menekankan pada hasil akhir yang dicapai (efisiensi, produktivitas, stabilitas, dan pertumbuhan yang tinggi) tapi juga pada upaya-upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Paham pembangunan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dianut sekarang sebenarnya sudah lebih luas dari hanya menitikberatkan pada pertumbuhan tapi juga telah mencakup aspek-aspek pemerataan. (Kuncoro, 2010;170)

Pembangunan yang gagal di masa lalu, selain karena pendekatannya terbukti keliru yaitu terpusat pada pembangunan ekonomi dan penekanan pertumbuhan juga karena pembangunan hanya diikuti lapisan yang terbatas

yaitu kelompok elit dan sebagian besar merupakan upaya birokrasi. Rakyat tidak diikutsertakan kecuali untuk mengerjakan apa yang harus dikerjakan untuk suatu proyek pembangunan. Seringkali rakyat melakukannya dengan tidak mengetahui persis mengapa mereka harus melakukan dan apa manfaat yang akan diperoleh. Upaya demikian seringkali salah sasaran karena mengandalkan pengetahuan para perencana / kaum birokrat yang terbaik bagi rakyat tapi rakyat tidak didengar apa yang dirasakan terbaik bagi dirinya. Akibatnya sering terjadi kegagalan yang mengakibatkan benturan antara program dan rakyat yang berakibat program tidak berjalan dengan baik. Selain itu karena rakyat yang terbelakang tidak bersuara / tidak didengar maka kelompok yang lebih maju yang bersuara dan didengar sehingga kegiatan pembangunan lebih mengarah kepada pemenuhan permintaan mereka karena itu dalam konsep pembangunan sekarang partisipasi menjadi paradigma yang sangat penting. (Subandi, 2014;55)

Pembangunan yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat banyak bentuknya, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur termasuk salah satu bentuk kebijakan publik yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurut Kuncoro (2010;93)

Pembangunan nampaknya telah menjadi jargon yang tidak asing kita dengar. Pembangunan dianggap oleh para politisi, teknokrat dan penguasa di banyak negara sebagai sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Suatu keniscayaan, ini sering terungkap dari ungkapan-ungkapan retorik

semacam ini : “Apa pun yang terjadi kita harus tetap melanjutkan komitmen pembangunan”. Atau: “seburuk-buruknya pembangunan masih jauh lebih baik daripada tidak melaksanakannya sama sekali”.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas utama pemerintah dalam memudahkan aksesibilitas dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, hal ini yang menjadi perhatian utama peneliti dalam menganalisa implementasi kebijakan publik, yaitu implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mendukung distribusi lalu lintas barang maupun manusia dan membentuk struktur ruang wilayah (Renstra Kementerian PU 2010-2014,2010), sehingga pembangunan infrastruktur memiliki 2 (dua) sisi yaitu : tujuan pembangunan dan dampak pembangunan.

Pembangunan infrastruktu memiliki peran penting dalam sistem perekonomian masyarakat. Semakin baik keadaan infrastruktur, semakin baik pula pengaruhnya terhadap perkembangan keadaan ekonomi. Infrastruktur sendiri merupakan urat nadi perekonomian, yang menentukan lancar atau tidaknya kegiatan perekonomian. Kebijakan infrastruktur dapat dijadikan strategi induk oleh pemerintah, yakni menjadi lokomotif pergerakan perekonomian. **(Rachbini, 2013;16)**

Pembangunan infrastruktur mempunyai peran vital dalam mewujudkan pemenuhan Hak Dasar Rakyat seperti pertumbuhan

ekonomi. Dengan demikian, infrastruktur merupakan modal esensial masyarakat yang memegang peranan penting dalam mendukung sosial-budaya, ekonomi dan persatuan yang mengikat dan menghubungkan antar daerah yang ada di Indonesia. Infrastruktur, yang sering pula disebut prasarana dan sarana fisik, disamping memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kesejahteraan masyarakat terhadap proses pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan indikasi bahwa wilayah yang memiliki kelengkapan sistem infrastruktur yang berfungsi lebih baik dibandingkan dengan wilayah lainnya mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pula. Sebaliknya, keberadaan infrastruktur yang kurang berfungsi dengan baik mengakibatkan masalah ekonomi. Dalam konteks ekonomi, infrastruktur merupakan modal sosial masyarakat yaitu barang-barang modal esensi sebagai tempat bergantung bagi pertumbuhan ekonomi dan merupakan prasyarat menjadi aksesibilitas berbagai aktivitas masyarakat. Keberadaan infrastruktur memberikan gambaran tentang kemampuan berproduksi masyarakat dan tingkat kesejahteraan, karena pertumbuhan ekonomi yang tidak mungkin dicapai apabila tidak ada ketersediaan infrastruktur yang memadai atau dengan kata lain infrastruktur menjadi *basic determinant* atau kunci bagi pertumbuhan ekonomi. (Hardiyatmo, 2007;34)

Pembangunan infrastruktur akan mendukung produktivitas sektor ekonomi lainnya sehingga mendorong peningkatan kondisi pertumbuhan

ekonomi masyarakat. Keberadaan infrastruktur yang baik akan mendorong terciptanya stabilitas berbagai aspek dalam masyarakat guna menunjang laju pembangunan nasional. Untuk itulah pemerintah telah berkomitmen untuk mengutarakan pembanguann infrastruktur mengingat peran dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi sangat besar. Keberadaan infrastruktur, telah terbukti berperan sebagai instrumen bagi pengurangan kemiskinan, pembuka daerah terisolasi, dan mempersempit kesenjangan antar wilayah. Dengan demikian, investasi infrastruktur baik dari pemerintah maupun swasta dan masyarakat perlu terus didorong guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor. (<http://kpm.malangkab.go.id>)

Setiap kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan pasti menimbulkan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat baik dampak positif maupun dampak negatif, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana melaksanakan pembangunan untuk mendapatkan hasil dan manfaat yang maksimum dengan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi yang minimum. Pemerintah telah banyak mengeluarkan peraturan dan pedoman yang mengatur masalah pembangunan infrastruktur yang meningkatkan aksesibilitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam implementasi di lapangan peraturan dan pedoman tersebut telah dimasukkan dalam pasal syarat-syarat kontrak, sehingga kontraktor sebagai penyedia jasa wajib melaksanakan pasal – pasal tersebut. (Hardiyatmo, 2007:37)

Peneliti memilih judul Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat *Pasca* Pembangunan Infrastruktur karena ada 7 prioritas dan fokus pembangunan yang menjadi program utama dan tujuan Pemerintah Kabupaten Malang khususnya Badan Perencanaan Daerah dalam pembangunan di Kabupaten Malang, salah satunya adalah penyediaan infrastruktur yang memadahi; terutama pembangunan baru dan pemantapan jalan dan jembatan untuk mendukung aktivitas perekonomian, sosial, budaya, pariwisata dan pengembangan dusun terpencil.

Selain menjadi salah satu prioritas dan fokus pembangunan yang menjadi program utama dan tujuan Pemerintah Kabupaten Malang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat pasca pembangunan infrastruktur, masih mengalami beberapa hambatan. Bisa dilihat dari yang dilansir dari web resmi KPM Kabupaten Malang sebagai berikut:

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang menunjukkan *trend* positif dalam 5 tahun terakhir, walaupun masih lamban. Hal ini disebabkan karena kontribusi sektor yang dominan di Kabupaten Malang adalah sektor primer yang pada umumnya menghasilkan nilai tambah yang sedikit atau dengan kata lain harga jualnya masih relatif rendah dibanding sektor yang lain. Kontribusi sektoral dalam menopang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang selama 5 tahun ke depan diproyeksikan terus mengalami peningkatan pertumbuhan dengan pertumbuhan terbesar pada sektor sekunder dan sektor tersier, sementara pertumbuhan sektor primer relatif stagnan. Cukup tingginya aktifitas ekonomi di Kabupaten Malang tidak terlepas dari tingginya aktifitas masyarakat dalam masing-masing sektor ekonomi produktif yang ada di Kabupaten Malang. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Malang akan menerapkan regulasi yang tepat, guna menyeimbangkan persaingan pasar tradisional dan pasar modern agar dapat berjalan selaras beriringan. Untuk 5 tahun ke depan.

Untuk melihat seberapa jauh pencapaian pertumbuhan ekonomi *pasca* pembangunan infrastruktur, maka peneliti berasumsi bahwa adanya keselarasan antara fakta dilapangan dengan teori yang ada, dimana menurut peneliti penerapan pembangunan infrastruktur memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat. Dengan demikian peneliti mengangkat judul penelitian tentang **“Pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkar Barat Kepanjen sebagai Strategi Pemerintah Kabupaten Malang dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah yang ada adalah :

- 1) Bagaimana pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat Kepanjen sebagai strategi pemerintah Kabupaten Malang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat?
- 2) Apa dampak pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat Kepanjen terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat?
- 3) Apa faktor pendukung dan penghambat pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat Kepanjen dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- 1) Mengetahui dan menganalisis pembangunan infrastruktur jalan lingkaran barat Kepanjen sebagai strategi pemerintah Kabupaten Malang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- 2) Mengetahui dampak pembangunan infrastruktur jalan lingkaran barat Kepanjen terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- 3) Mengetahui faktor pendukung dan penghambat pembangunan infrastruktur jalan lingkaran barat Kepanjen sebagai strategi pemerintah Kabupaten Malang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

D. Kontribusi Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan adanya kontribusi yang dapat diterima semua pihak yang terkait dengan tulisan ini. Adapun kontribusi yang ingin dicapai adalah antara lain :

1. Kontribusi Akademis

(a) Bagi mahasiswa

- (1) Penelitian ini dapat meningkatkan respon mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah sekaligus untuk menerapkan disiplin ilmu yang telah diperoleh

(2) Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi peneliti lain sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk mengadakan penelitian selanjutnya.

(b) Bagi Perguruan Tinggi

(1) Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pustaka untuk mengadakan penelitian selanjutnya.

(2) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan bahan kajian tentang analisis pembangunan.

2. Kontribusi Praktis

(a) Bagi Pemerintah

(1) Penelitian ini memberikan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah BAPPEDA Kabupaten Malang khususnya untuk pembangunan infrastruktur di Kecamatan Kepanjen dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui secara garis besar yang dideskripsikan dalam penulisan skripsi ini, maka dapat dilihat dalam sistematika pembahasan yang merupakan susunan keseluruhan skripsi secara singkat. Adapun sistematika pembahasan dapat dirinci sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan terdiri dari lima sub bab. Pertama, latar belakang yang menguraikan tentang alasan kenapa

pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat Kepanjen sebagai strategi pemerintah Kabupaten Malang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat harus di teliti dan di analisa fakta yang berupa masalah dan normatif.

Kedua, rumusan masalah penelitian yang meliputi pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat Kepanjen sebagai strategi pemerintah Kabupaten Malang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dampak pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat Kepanjen terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dan faktor pendukung dan penghambat pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat Kepanjen dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ketiga, tujuan penelitian yang hendak dicapai antara lain mengetahui, menganalisis, mengidentifikasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat Kepanjen sebagai strategi pemerintah Kabupaten Malang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dampak pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat Kepanjen terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dan faktor pendukung dan penghambat pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat Kepanjen dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Keempat, kontribusi penelitian yang meliputi kontribusi

akademis dan praktis. Kelima, sistematika penulisan yang merupakan uraian singkat dari bab-bab penulisan skripsi.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini antara lain tentang teori strategi yang didalamnya menjelaskan dan menguraikan tentang syarat-syarat strategi, strategi pembangunan daerah dan strategi pencapaian pertumbuhan ekonomi. Teori pembangunan yang didalamnya menjelaskan dan menguraikan tentang pembangunan dalam perspektif administrasi publik, pembangunan daerah yang terdiri dari peran pemerintah dalam pembangunan daerah, dan hambatan dalam pembangunan daerah. Teori pembangunan infrastruktur, dan teori hubungan antara infrastruktur dan pembangunan dengan konsep teori pembangunan. Teori pertumbuhan ekonomi yang didalamnya menjelaskan dan menguraikan tentang definisi pertumbuhan ekonomi, upaya-upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang meliputi tahap-tahap pertumbuhan ekonomi, alat pendukung pertumbuhan ekonomi, dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Teori-teori tersebut digunakan sebagai landasan dan pedoman dalam melakukan penelitian

dan penganalisaan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan langkah-langkah teknis dan praktis sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Pertama, mengenai jenis penelitian yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kedua, fokus penelitian antara lain pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat Kepanjen sebagai strategi Pemerintah Kabupaten Malng dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dampak positif dan negatif pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat Kepanjen sebagai strategi pemerintah Kabupaten Malng terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan faktor pendukung dan penghambat pembangunan infrastruktur jalna lingkar barat Kepanjen sebagai strategi pemerintah Kabupaten Malng dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ketiga, lokasi penelitian di Kecamatan Kepanjen dan situs penelitian di BAPPEDA Kabupaten Malang. Keempat, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Kelima, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Ke enam,

analisis data melalui tahap-tahap reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang temuan-temuan penelitian yang dihasilkan dari pengolahan dan analisis data yang dilakukan, serta dilanjutkan dengan analisis peneliti terhadap temuan-temuan penelitian yang di kaitkan dengan teori teori yang ada di dalam bab dua.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari dua sub bab pokok yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan ditarik dengan menemukan benang merah pokok permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Sehingga dari kesimpulan tersebut peneliti dapat memberikan saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya pemerintah Kabupaten Malang untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat Kepanjen guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Strategi

Strategi merupakan pendekatan keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Selain itu strategi juga diartikan sebagai sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi merupakan proses penentuan nilai pilihan dan pembuatan keputusan dalam pemanfaatan sumber daya yang menimbulkan suatu komitmen bagi organisasi yang bersangkutan kepada tindakan-tindakan yang mengarah pada masa depan (**Marpaung, 2000;52**)

Setiap organisasi baik organisasi publik maupun organisasi privat mempunyai langkah-langkah atau cara yang disusun secara sistematis dalam rangka menjalankan segala aktivitas atau kegiatan. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya. (**Chandler dalam Rangkuti, 2002;3**)

Strategi merupakan suatu rencana dasar yang luas dari suatu tindakan organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang dimana rencana dalam menggapai tujuan tersebut sesuai dengan lingkungan internal dan eksternalnya. Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa

eksternalnya. Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan melalui langkah-langkah tertentu dengan menganalisa faktor internal dan eksternal dari apa yang ingin dikembangkan. (Amirullah, 2003;4)

1. Syarat-syarat Strategi

Adapun dalam penyusunan sebuah strategi, tentu ada syarat yang harus dipenuhi sehingga strategi tersebut dapat berjalan secara baik. Strategi pada prinsipnya berkaitan dengan persoalan seperti kebijakan pelaksanaan, penentuan tujuan yang hendak dicapai, dan penentuan cara-cara atau metode penggunaan sarana prasarana. Strategi yang selalu berkaitan dengan tiga hal yaitu tujuan, sarana, dan cara. Oleh karena itu strategi juga harus didukung oleh kemampuan untuk mengantisipasi kesempatan yang ada. (Suryono, 2004;80)

Menurut Siagian strategi dalam kehidupan sehari-hari memperhatikan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun strategi sebagai berikut:

- a. Strategi harus berada pada satu pihak yang mampu memberikan manfaat dari peluang yang akan timbul dipihak lain dimana memperkecil dampak berbagai faktor yang bersifat negatif bahkan berupa ancaman bagi organisasi dan keberlangsungannya.
- b. Strategi harus memperhitungkan secara realistis kemampuan suatu organisasi dalam berbagai daya, sarana-prasarana, dan dana guna mengoperasionalkan strategi tersebut.

- c. Strategi yang dioprasionalkan secara teliti. Tolak ukur tepat tidaknya suatu strategi mencakup perumusan strategi dan operasional atau pelaksanaannya.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat strategi bagaimana cara yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dan dimana untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan syarat-syarat yang sistematis yang harus dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Siagian, 2002;102)

2. Strategi Pembangunan Daerah

Secara umum strategi pembangunan adalah mengembangkan kesempatan kerja bagi penduduk yang ada sekarang dan upaya untuk mencapai stabilitas ekonomi, serta mengembangkan basis ekonomi dan kesempatan kerja yang beragam. Pembangunan akan berhasil bila mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya fluktuasi ekonomi sektoral, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesempatan kerja. (Subandi, 2014;122)

Licolin Arsyad (2000) dalam Subandi (2014;122-124) secara garis besar menggambarkan strategi pembangunan daerah dapat dikelompokkan menjadi 4 yaitu:

1. Strategi pengembangan fisik (*Locality or Physical Development Strategy*)

Melalui pengembangan program perbaikan kondisi fisik/lokalisasi daerah yang ditujukan untuk kepentingan pembangunan industri dan perdagangan, pemerintah daerah secara khusus tujuan strategi pembangunan fisik ini adalah menciptakan identitas daerah/kota, memperbaiki (*amenity base*) atau kualitas hidup masyarakat dan memperbaiki dunia usaha daerah. Untuk mencapai tujuan pembangunan fisik tersebut diperlukan alat-alat pendukung, yaitu:

- a. Pembuatan bank tanah (*land bank*), dengan tujuan agar memiliki data tentang tanah yang kurang optimal penggunaannya, tanah yang belum dikembangkan, atau salah dalam penggunaannya dan sebagainya.
- b. Pengendalian perencanaan dan pembangunan, dengan tujuan untuk memperbaiki iklim investasi di daerah dan memperbaiki citra pemerintah daerah.
- c. Penata kota (*twonscaping*) dengan tujuan memperbaiki sarana jalan, penataan pusat-pusat perkotaan, dan penataan standar fisik suatu bangunan.
- d. Pengaturan tata ruang (*zoning*) dengan baik untuk merangsang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah.

- e. Penyediaan perumahan dan pemukiman yang baik akan berpengaruh positif bagi dunia usaha, disamping menciptakan lapangan kerja.
- f. Penyediaan infrastruktur seperti: sarana air bersih, listrik, taman, sarana parkir, tempat olahraga, dan sebagainya.

2. Strategi Pengembangan Dunia Usaha (*Business Development Strategy*)

Pengembangan dunia usaha merupakan komponen penting dalam pembangunan daerah, karena daya tarik, kerativitas atau daya tahan kegiatan usaha merupakan cara terbaik untuk menciptakan perekonomian daerah yang sehat. Untuk mencapai tujuan pembangunan diperlukan alat-alat pendukung antara lain:

- a. Penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha, melalui pengaturan dan kebijakan yang memberikan kemudahan bagi dunia usaha dan pada saat yang sama mencegah penurunan kualitas lingkungan.
- b. Pembuatan informasi terpadu yang dapat memudahkan masyarakat dan dunia usaha untuk berhubungan dengan aparat pemerintah daerah yang berkaitan dengan perijinan dan informasi rencana pembangunan ekonomi daerah.

- c. Pendirian pusat konsultasi dan pengembangan usaha kecil, karena usaha kecil perannya sangat penting sebagai penyerap tenaga kerja dan sebagai sumber dorongan memajukan kewirausahaan.
- d. Pembuatan sistem pemasaran bersama untuk menghindari skala yang tidak ekonomis dalam produksi, dan meningkatnya daya saing terhadap produk impor serta sikap kooperatif sesama pelaku bisnis.
- e. Pembuatan lembaga penelitian dan pengembangan. Lembaga ini diperlukan untuk melakukan kajian tentang pengembangan produk baru, teknologi baru, dan pencarian pasar baru.

3. Strategi Pengembangan Sumberdaya Manusia (*Human Resource Development Strategy*)

Strategi pengembangan sumberdaya manusia merupakan aspek paling penting dalam proses pembangunan ekonomi. Oleh karena itu pembangunan tanpa diiringi dengan peningkatan kualitas dan keterampilan sumberdaya manusia adalah suatu keniscayaan.

Pengembangan kualitas sumberdaya manusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelatihan dengan sistem *customized training*, yaitu sistem pelatihan yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan dan harapan sipemberi kerja.
- b. Pembuatan bank keahlian (*skill banks*) sebagian bank informasi yang berisi data tentang keahlian dan latar belakang orang yang menganggur di daerah.
- c. Penciptaan iklim yang mendukung bagi perkembangan lembaga-lembaga pendidikan dan keterampilan di daerah.
- d. Pengembangan lembaga pelatihan bagi para penyandang cacat

4. Strategi Pengembangan Masyarakat (*Community-Based Development Strategy*)

Strategi pengembangan masyarakat ini merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memberdayakan (*empowrment*) suatu kelompok masyarakat tertentu pada suatu daerah. Kegiatan-kegiatan ini berkembang baik di Indonesia belakangan ini, karena ternyata kebijakan umum ekonomi yang tidak mampu memberikan manfaat bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

3. Strategi Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi

Adapun strategi dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi yang dituliskan Baldwin dalam bukunya *Economic Development and Growth*, yaitu:

1. Industrialisasi Versus Pembangunan Pertanian

Pembangunan pertanian bersifat menggunakan teknologi padat tenaga kerja dan secara relatif menggunakan sedikit kapital; meskipun dalam investasi pada pembuatan jalan, saluran dan fasilitas pengairan, dan pengembangan teknologinya. Kenaikan produktivitas sektor pertanian memungkinkan perekonomian dengan menggunakan tenaga kerja lebih sedikit menghasilkan kuantitas output bahan makanan yang sama. Dengan demikian sebagian dari tenaga kerja dapat dipindahkan ke sektor industri tanpa menurunkan output sector pertanian. Di samping itu pembangunan atau kenaikan produktivitas dan output total sektor pertanian akan menaikkan pendapatan di sektor tersebut.

2. Strategi Impor Versus Promosi Ekspor

Strategi industrialisasi via substitusi impor pada dasarnya dilakukan dengan membangun industri yang menghasilkan barang-barang yang semula diimpor. Alternatif kebijakan lain adalah strategi industrialisasi via promosi ekspor. Kebijakan ini menekankan pada industrialisasi pada

sektor-sektor atau kegiatan produksi dalam negeri yang mempunyai keunggulan komparatif hingga dapat memproduksinya dengan biaya rendah dan bersaing dengan menjualnya di pasar internasional. Strategi ini secara relatif lebih sukar dilaksanakan karena menuntut kerja keras agar bisa bersaing di pasar internasional.

(2) Perlunya Disertifikasi

Usaha mengadakan disertifikasi bagi negara-negara pengekspor utama minyak dan gas bumi merupakan upaya mempertahankan atau menstabilkan penerimaan devisanya.

(Subandi,2014; 124)

B. Pembangunan

Alexander berpendapat bahwa Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. **(Kuncoro, 2010;17)**. Pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan/perluasan (*expansion*) atau peningkatan (*improvement*) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat. **(Subandi, 2014;115)**

Defenisi pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (*commuinity/group*). Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (*progress*), pertumbuhan dan diversifikasi. Dengan semakin meningkatnya kompleksitas kehidupan masyarakat yang menyangkut berbagai aspek, pemikiran tentang modernisasi pun tidak lagi hanya mencakup bidang ekonomi dan industri, melainkan telah merambah ke seluruh aspek yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Modernisasi diartikan sebagai proses transformasi dan perubahan dalam masyarakat yang meliputi segala aspeknya, baik ekonomi, industri, sosial, budaya, dan sebagainya. Oleh karena dalam proses modernisasi itu terjadi suatu proses perubahan yang mengarah pada perbaikan, para ahli manajemen pembangunan menganggapnya sebagai suatu proses pembangunan di mana terjadi proses perubahan dari kehidupan tradisional menjadi modern, yang pada awal mulanya ditandai dengan adanya penggunaan alat-alat modern, menggantikan alat-alat yang tradisional. (Kuncoro, 2010;19)

Selanjutnya seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu-ilmu sosial, para ahli manajemen pembangunan terus berupaya untuk menggali konsep-konsep pembangunan secara ilmiah.

Secara sederhana pembangunan sering diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik. Karena perubahan yang dimaksud adalah menuju arah peningkatan dari keadaan semula, tidak jarang pula ada yang mengasumsikan bahwa pembangunan adalah juga pertumbuhan. Seiring dengan perkembangannya hingga saat ini belum ditemukan adanya suatu kesepakatan yang dapat menolak asumsi tersebut. Akan tetapi untuk dapat membedakan keduanya tanpa harus memisahkan secara tegas batasannya. Yang pertama pembangunan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang. Sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan. **(Kuncoro, 2010;19-20)**

Paparan diatas dapat menggambarkan bahwa pembangunan sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan harus dilakukan untuk menuju arah yang lebih baik salah satunya adalah ekonomi. Pembangunan banyak bentuknya salah satunya adalah pembangunan infrastruktur. Infrastruktur adalah salah satu fasilitas sarana dan prasarana yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk meningkatkan aksesibilitas dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

1. Pembangunan Daerah

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, maka terjadi pula pergeseran dalam pembangunan yang tadinya bersifat sentralistis, mengarah pada desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk membangun wilayahnya termasuk pembangunan dalam bidang ekonominya. Pengertian daerah ditinjau dari aspek hukum, aspek keamanan, aspek pemerintahan dan aspek ekonomi. (Subandi, 2014;115-116) ditinjau dari aspek ekonomi pembangunan daerah mempunyai pengertian :

- a. Suatu daerah dianggap sebagai ruang diaman terdapat kegiatan ekonomi dan didalam pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Kesamaan sifat-sifat tersebut antara lain dari segi pendapatan perkapit, sosial budaya, geografis, dan sebagainya. Daerah yang memiliki ciri-ciri ini disebut pembangunan daerah homogen.
- b. Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang apabila daerah tersebut dikuasai oleh salah satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi. Pembangunan daerah seperti ini disebut pembangunan daerah modal.
- c. Suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berbeda dibawah satu administrasi tertentu seperti satu propinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan sebagainya. Dalam hal ini didasarkan pada

pembagian administratif suatu negara. Pembangunan daerah seperti ini dinamakan pembangunan daerah administrasi.

(Subandi, 2014;116)

Lincoln Arsyad mengartikan pembangunan daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Subandi, 2014;116)

Dalam pembangunan daerah yang menjadi pokok permasalahan adalah letak pada kebijakan pembangunan yang didasarkan pada potensi daerah tersebut (*endogenous*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarah pada pengambilan inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. Pembangunan daerah adalah suatu proses yang mencakup institusi baru, pembangunan industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar baru, alih pengetahuan dan teknologi serta pengembangan usaha-usaha baru. (Subandi, 2014;116-117)

Tujuan utama pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah dengan partisipasi masyarakat dan sumberdaya yang mendukung harus mampu menghitung potensi sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun ekonomi daerah. (Subandi, 2014;117)

Subandi tak lupa menuliskan paradigma baru pembangunan daerah. Seperti yang ia tuliskan bahwa teori pembangunan sekarang tidak mampu untuk menjelaskan kegiatankegiatan pembangunan ekonomi daerah secara tuntas dan komprehenship. Oleh karena itu perlu dirumuskan suatu pendekatan alternatif untuk kepentingan pembangunan daerah. Rumasan ini sebenarnya merupakan sintesa dan perumusan kembali konsep-konsep yang telah ada. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan dasar bagi kerangka pikir dan rencana tindakan yang akan diambil dalam konteks pembangunan daerah. Kerangka berpikir dalam konsep pembangunan daerah yang lama adalah:

1. Dalam rangka memberikan kesempatan kerja, maka semakin banyak perusahaan maka semakin banyak peluang kerja.
2. Basis pembangunan terletak pada pengembangan sektor ekonomi.

3. Pengalokasian aset-aset didasarkan pada keunggulan komparatif set-set fisik.
4. Sumberdaya pengetahuan didasarkan pada ketersediaan angkatan kerja.

Sedangkan dengan paradigma baru pembangunan daerah didasarkan pada kemampuan perusahaan untuk mengembangkan pekerjaan (memberikan kesempatan kerja) yang sesuai dengan kondisi penduduk daerah tersebut. Untuk basis pembangunan tidak lagi berdasarkan sektor tetapi lebih pada pengembangan lembaga-lembaga ekonomi baru, dan pengalokasian aset-aset didasarkan pada keunggulan kompetitif yang didasarkan pada kualitas lingkungan. Disamping itu juga sumberdaya pengetahuan dijadikan sebagai pembangkit pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 1 Paradigma Baru Pembangunan Daerah

Komponen	Konsep Lama	Konsep Baru
Kesempatan kerja	Semakin banyak perusahaan = semakin banyak peluang kerja	Perusahaan harus mengembangkan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi penduduk daerah
Basis Pembangunan	Pengembangan sektor ekonomi	Pengembangan lembaga-lembaga ekonomi baru
Aset-aset Lokasi	Keunggulan komaratif didasarkan pada aset fisik	Keunggulan kompetitif didasarkan pada kualitas lingkungan
Sumberdaya Pengetahuan	Ketersediaan angkatan kerja	Pengetahuan sebagai pembangkit ekonomi

Sumber : Lincoln Arsyad (2000) dalam Subandi (2014;121)

a. Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Daerah

Lincoln Arsyad mengatakan bahwa ada 4 peran yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan daerah, yaitu *entrepreneur*, koordinator, fasilitator, dan stimulator untuk melakukan inisiatif dan inovatif dalam pembangunan didaerah.

1. *Entrepreneur*

Peran pemerintah daerah sebagai *entrepreneur* merupakan tanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis di daerahnya. Dalam hal ini pemerintah daerah bisa mengembangkan suatu usaha sendiri dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau bermitra dengan dunia usaha swasta namun kegiatan usahanya tetap dalam pengendalian pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mampu mengelola aset-aset pemerintah daerah dengan baik dan ekonomis sehingga mampu memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah.

2. *Koordinator*

Pemerintah daerah harus mampu bertindak sebagai koordinator dalam pembangunan ekonomi di daerahnya yaitu melalui penetapan kebijakan atau mengusulkan strategi pembangunan ekonomi yang *komprehenship* bagi kemajuan daerahnya. Dalam peran ini pemerintah daerah bisa melibatkan kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk proses pengumpulan data dan evaluasi tentang informasi yang berkaitan dengan kondisi perekonomian di daerah. Pemerintah daerah dapat juga melibatkan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha dan masyarakat dalam menyusun sasaran ekonomi, rencana dan strategi

pelaksanaannya. Pendekatan ini sangat potensial dalam menjaga konsistensi pembangunan daerah dan pembangunan nasional, serta untuk menjamin bahwa perekonomian di daerah akan mendapatkan manfaat yang optimal.

3. Fasilitator

Pemerintah daerah dapat berperan sebagai fasilitator dengan cara mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan *attitudinal* (perilaku atau budaya masyarakat) di daerah tersebut. Hal ini perlu dilakukan untuk mempercepat proses pembangunan dan produser perencanaan, serta pengaturan penetapan tata ruang daerah (*Zoning*) yang lebih baik.

4. Stimulator

Pemerintah daerah dapat berperan sebagai stimulator dalam program pembangunan melalui pendekatan usaha dengan tindakan khusus yang dapat mempengaruhi dunia usaha untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang telah ada tetap eksis berada di daerah tersebut. Stimulasi ini dapat dilakukan antara lain dengan pembuatan brosur, pembangunan kawasan industri, pembuatan *outlets* untuk produk UMKM dan koperasi, membantu UMKM dan koperasi untuk melakukan pameran, dan sebagainya.

(Subandi, 2014;119-120)

b. Hambatan Dalam Pembanguna Daerah

1. Ketimpangan pembangunan sektor industri

Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah. Pertumbuhan ekonomi di daerah dengan konsentrasi ekonomi yang tinggi cenderung pesat, sedangkan daerah yang konsentrasinya ekonomi rendah ada kecenderungan tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang rendah.

Industri manufaktur merupakan sektor ekonomi yang secara potensial sangat produktif, hal ini dapat dilihat dari sumbangan terhadap pembentukan PDB atau PDRB. Terjadinya ketimpangan pembangunan sektor industri atau tingkat industrialisasi antar daerah adalah sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi antar daerah.

2. Kurang meratanya Investasi

Dalam teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar dikatakan bahwa ada korelasi positif antara tingkat investasi dengan laju pertumbuhan ekonomi, sehingga dengan kurangnya investasi disuatu daerah membuat pertumbuhan dan tingkat pendapatan perkapita masyarakat di daerah

tersebut rendah. Hal ini dikarenakan tidak adanya kegiatan ekonomi yang produktif seperti industri manufaktur. Dalam hal ini investasi di Jawa merupakan wilayah yang dominan bagi PMDN (66%), Sumatra (16,1%) dan selebihnya diluar Jawa dan Sumatra. Sedangkan untuk PMA hampir 76% di Jawa dan 12,4% di Sumatra. Daerah lainnya jumlah investasi rata-rata kurang dari 5%. Apabila ada *transfer of technology*, *management*, *know-how* dan *input* positif lain yang dibawah oleh PMA tentunya hal ini lebih banyak dinikmati oleh masyarakat dan dunia usaha di Jawa (**sumber data BPS diolah**) terhambatnya perkembangan investasi di daerah disebabkan banyak faktor, diantaranya adalah adalah kebijakan dan birokrasi yang selama orde baru di kendalikan oleh pusat, keterbatasan infrastruktur dan sumberdaya manusia di daerah luar Jawa.

3. Tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah

Kurang lancarnya mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja antar daerah juga merupakan penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan daerah. Hal ini karena perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antar daerah membuat terjadinya perbedaan tingkat pendapatan perkapita antar daerah, dengan asumsi bahwa mekanisme pasar *output* dan *input* bebas (tanpa distorsi yang direkayasa, misalnya

kebijakan pemerintah) mempengaruhi mobilitas faktor produksi antar daerah. Menurut A. Lewis dalam Lincolin Arsyad, jika perpindahan faktor produksi antar daerah tidak ada hambatan, maka pada akhirnya pembangunan ekonomi yang optimal antar daerah akan tercapai dan semua daerah akan menjadi lebih baik.

4. Perbedaan sumberdaya alam

Pemikiran klasik yang mengatakan bahwa pembangunan ekonomi daerah yang kaya sumberdaya alam akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan dengan daerah yang miskin sumberdaya alam. Hingga tingkat tertentu pendapat tersebut dapat dibenarkan, dalam arti sumberdaya manusia dilihat hanya sebagai modal awal untuk pembangunan dan selanjutnya hanya dikembangkan secara terus menerus. Oleh karena itu diperlukan faktor lain, diantaranya adalah faktor teknologi dan sumberdaya manusia. Dengan penguasaan teknologi dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia maka lambat laun *factor endowment* tidak relevan lagi. Hal ini dapat kita lihat negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan Singapura yang sangat miskin sumberdaya alam.

5. Perbedaan demografis

Ketimpangan pembangunan daerah di Indonesia juga disebabkan oleh perbedaan kondisi geografis antar daerah. Kondisi ini berpengaruh terhadap jumlah dan pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan penduduk, pendidikan, kesehatan, kedisiplinan dan etos kerja. Faktor-faktor ini mempengaruhi tingkat pembangunan ekonomi dari sisi permintaan dan penawaran. Disisi permintaan jumlah penduduk yang besar merupakan potensi besar bagi pertumbuhan pasar, yang berarti faktor pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Dari sisi penawaran, jumlah penduduk yang besar dengan pendidikan dan kesehatan yang baik, disiplin dan etos kerja yang tinggi merupakan aset penting bagi produksi.

6. Kurang lancarnya perdagangan antar daerah

Kurang lancarnya perdagangan antar daerah (*intra-trade*) juga merupakan faktor yang turut menciptakan ketimpangan pembangunan daerah di Indonesia. Tidak lancarnya *intra-trade* disebabkan oleh keterbatasan transportasi dan komunikasi. Jadi tidak lancarnya arus barang dan jasa antar daerah mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dari sisi permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan kelangkaan barang dan jasa untuk konsumen mempengaruhi permintaan pasar

terhadap kegiatan ekonomi daerah yang sifatnya komplementer (mendukung) dengan barang dan jasa tersebut. Sedangkan dari sisi penawaran sulitnya mendapatkan barang modal, input perantara, bahan baku atau material lainnya dapat menyebabkan kegiatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah lumpuh atau tidak berjalan secara optimal.

(Subandi, 2014;117-119)

2. Pembangunan Infrastruktur

Pengertian Infrastruktur tercantum dalam beberapa versi. Pengertian Infrastruktur menurut *American Public Works Association* (Stone, 1974 Dalam Kodoatie,R.J.,2005), adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Jadi infrastruktur merupakan sistem fisik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.

Pembangunan infrastruktur adalah bagian integral dari pembangunan regional maupun nasional. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi, baik barang maupun

penumpang. Infrastruktur lainnya, seperti kelistrikan dan telekomunikasi, terkait dengan upaya modernisasi, dan penyediaannya merupakan salah satu aspek terpenting untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi. Ketersediaan sarana perumahan dan permukiman, antara lain air minum dan sanitasi, secara luas dan merata, serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta untuk meningkatkan daya saing global. Rehabilitasi dan pembangunan kembali berbagai infrastruktur yang rusak, serta peningkatan kapasitas dan fasilitas baru akan menyerap biaya sangat besar, sehingga tidak dapat dipikul oleh pemerintah sendiri. Untuk itu, sangat mendesak mencari solusi inovatif guna menanggulangi masalah perawatan dan perbaikan infrastruktur yang rusak. **(Hardiyatmo, 2007; 291)**

Dilihat dari tipologinya, infrastruktur dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu infrastruktur sosial, infrastruktur publik, dan infrastruktur komersial. Pembagian ini sekaligus menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab penyediaan masing-masing infrastruktur. Infrastruktur sosial, yang menghasilkan barang dan jasa non-pasar, dengan tingkat *cost recovery* yang sangat rendah, maka penyediaannya mutlak menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah,

yang pelaksanaannya disesuaikan kemampuan pendanaan pemerintah. Untuk itu perlu adanya sinkronisasi penanganan program melalui APBN dan APBD. Infrastruktur sosial meliputi, antara lain, subsektor jalan, fasilitas keselamatan transportasi, sumber daya air, fasilitas persampahan dan sanitasi. Penyediaan infrastruktur publik yang menghasilkan barang dan jasa publik, seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, air minum, perumahan, pos, listrik, dan telekomunikasi, dapat dilakukan bekerja sama antara pemerintah (BUMN) dan pihak swasta. Sedangkan infrastruktur komersial, yang menghasilkan barang dan jasa privat, seperti: pembangkit listrik, telekomunikasi di daerah perkotaan, pelabuhan peti kemas, bandara internasional dan bandara domestik, jalan tol pada ruas-ruas yang memiliki kondisi lalu lintas yang tinggi dapat disediakan secara murni oleh pihak swasta. (Hardiyatmo, 2007;231-232)

Dengan demikian menurut **Hardiyatmo** percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kewenangan dan tanggung jawab sesuai tipologi infrastrukturnya. Sasaran umum yang hendak dicapai dalam upaya pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan infrastruktur adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur sosial yang menjadi kebutuhan masyarakat.
2. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik melalui kerjasama dengan pihak badan usaha swasta.

3. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur komersial dengan mendorong peran aktif badan usaha swasta dalam penyediannya.

(Hardiyatmo, 2007;233)

Sistem infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas atau struktur dasar, peralatan, instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg, 2000 dalam Kodoatie,R.J.,2005). Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan masyarakat. infrastruktur berperan penting sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sosial dalam tatanan kehidupan manusia dan lingkungan. Kondisi itu agar harmonisasi kehidupan tetap terjaga dalam arti infrastruktur tidak kekurangan (berdampak pada manusia), tapi juga tidak berlebihan tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan alam karena akan merusak alam dan pada akhirnya berdampak juga kepada manusia dan makhluk hidup lainnya.

Dalam hal ini, lingkungan alam merupakan pendukung sistem infrastruktur, dan sistem ekonomi didukung oleh sistem infrastruktur, sistem sosial sebagai obyek dan sasaran didukung oleh sistem ekonomi.

Analoginya seperti gambar dibawah ini :

Gambar 1 Sistem Infrastruktur



Sumber : <http://www.radarplanologi.com/2015/10/apa-itu-infrastruktur.html>

a. Jenis-Jenis Infrastruktur

1. Infrastruktur Keras (*Physical Hard Infrastructure*)

Infrastruktur keras merupakan infrastruktur yang memiliki bentuk fisik yang nyata dan kegunaannya memang berasal dari bentuk fisik yang dimilikinya tersebut. Infrastruktur keras merupakan infrastruktur yang paling banyak berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat. Kebanyakan masyarakat juga mengartikan kata infrastruktur sebagai infrastruktur keras. Beberapa contoh infrastruktur keras yaitu bandara, kereta api, pelabuhan, dermaga, saluran irigasi, got, bendungan, jalan raya, dan lain – lain.

2. Infrastruktur Keras *Non – Fisik* (*Non – Physical Hard Infrastructure*)

Infrastruktur keras non fisik merupakan infrastruktur keras yang tidak memiliki bentuk fisik yang nyata/jelas akan tetapi berguna dan mendukung keberadaan infrastuktur keras lainnya. Infrastruktur keras non fisik sangat berkaitan erat dengan permasalahan kepuasan publik. Infrastruktur keras non fisik biasanya hanya bisa dirasakan kegunaannya ketika digabungkan

ataupun digunakan bersama-sama dengan infrastruktur lainnya seperti infrastruktur keras ataupun infrastruktur lunak. Beberapa contoh infrastruktur keras non fisik yaitu pasokan listrik, ketersediaan air bersih, jaringan pipa penyalur, jaringan komunikasi seperti internet dan telepon, ketersediaan saluran gas, pasokan energi, dan lain – lain.

3. Infrastruktur Lunak (*Soft Infrastructure*)

Pengertian infrastruktur lunak adalah infrastruktur yang berbentuk kelembagaan ataupun kerangka institusional. Infrastruktur lunak pada dasarnya harus dibangun dengan memperhatikan berbagai macam nilai dan norma seperti nilai budaya, norma agama, norma asusila, norma hukum dan berbagai nilai dan norma lainnya. Infrastruktur lunak biasanya berkaitan erat dengan aktivitas pelayanan masyarakat yang disediakan oleh pemerintah. Beberapa contoh infrastruktur lunak yaitu pelayanan kantor pos, pelayanan polisi, pelayanan pembuatan surat ijin mengemudi, pelayanan kantor kecamatan/kelurahan, dan berbagai infrastruktur lunak lainnya.

(<http://pengertiandefinisi.com/pengertian-infrastruktur-dan-beberapa-jenisnya/>)

b. Komponen Infrastruktur

Komponen-komponen di dalam infrastruktur menurut APWA (*American Public Works Association*) adalah :

1. Sistem penyediaan air : waduk, penampungan air, transmisi dan distribusi, fasilitas pengolahan air (*water treatment*)
2. Sistem pengelolaan air limbah : pengumpul, pengolahan, pembuangan, daur ulang
3. Fasilitas pengelolaan limbah padat
4. Fasilitas pengendalian banjir, drainase dan irigasi
5. Fasilitas lintas air dan navigasi
6. **Fasilitas transportasi: jalan, rel, bandar udara (termasuk tanda-tanda lalu lintas dan fasilitas pengontrol**
7. Sistem transit public
8. Sistem kelistrikan: produksi dan distribusi
9. Fasilitas gas alam
10. Gedung publik: sekolah, rumah sakit
11. Fasilitas perumahan public
12. Taman kota sebagai daerah resapan, tempat bermain termasuk stadion
13. Komunikasi

c. **Infrastruktur Jalan**

Infrastruktur jalan termasuk dalam komponen infrastruktur transportasi. Infrastruktur transportasi merupakan infrastruktur yang mendukung sekaligus berguna bagi kelangsungan para pengguna alat transportasi. Infrastruktur yang baik semestinya bisa memberikan kenyamanan bagi para penggunanya. Infrastruktur jalan adalah salah satu

infrastruktur yang dibangun dan di sediakan pemerintah pusat, selain jalan adapula pelabuhan laut dan udara, jaringan listrik, jaringan gas, telekomunikasi dan sebagainya. Ditinjau dari fungsinya infrastruktur jalan adalah jenis infrastruktur yang tidak menghasilkan karena setiap pengguna jalan raya tidak dikenakan biaya setiap melintasi jalan tersebut.

Dengan pembangunan jalan raya yang baik dan lengkap tentu sangat berarti bagi kelancaran transportasi sehingga karya masyarakat dan sumberdaya alam dapat di distribusikan hingga ke daerah pelosok.

Adapun masalah dalam pembangunan infrastruktur jalan diantara penyebabnya adalah Kegagalan pembuatan (modal, desain, konstruksi/teknologi), runtuh (ambruk, teknologi), rusak (umur, pemakaian, salah pakai), bencana alam (banjir, gempa, kebakaran), tidak ada penambahan/penyesuaian (kapasitas kurang), tidak ada/minim pemeliharaan, usang (tidak sesuai, terlambat dibuat, perkembangan teknologi). Kenyataan permasalahan yang terjadi pada pembangunan jalan adalah kesalahan manajemen dimana pemotongan anggaran/investasi kurang, Kesalahan pemilihan infrastruktur, Pemakaian melewati umur/life-cycle tidak diperhatikan, Kecenderungan mengabaikan pemeliharaan, Mahalnya pemeliharaan (20 – 40% dari konstruksi baru), Teknologi (R&D) kurang berkembang dan Mahalnya teknologi baru.

3. Hubungan antara pembangunan infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi

Perkembangan infrastruktur dengan pembangunan ekonomi mempunyai hubungan yang erat dan saling ketergantungan satu sama lain. Perbaikan dan peningkatan infrastruktur pada umumnya akan dapat meningkatkan mobilitas penduduk, terciptanya penurunan ongkos pengiriman barang-barang, terdapatnya pengangkutan barang-barang dengan kecepatan yang lebih tinggi, dan perbaikan kualitas dari jasa-jasa pengangkutan tersebut. Saat ini masalah infrastruktur menjadi agenda penting untuk dibenahi pemerintah daerah, karena infrastruktur merupakan penentu utama keberlangsungan kegiatan pembangunan, diantaranya untuk mencapai target pembanguan ekonomi secara kualitatif maupun kuantitatif. Dalam jangka pendek pembangunan infrastruktur akan menciptakan lapangan kerja sektor konstruksi dalam jangka menengah dan panjang akan mendukung peningkatan efisiensi dan produktifitas sektor-sektor ekonomi terkait. Sehingga pembangunan infrastruktur dapat dianggap sebagai strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, peningkatan mobilitas barang dan jasa, serta dapat mengurangi biaya investor dalam dan luar negeri (Marsuki, 2007). Hubungan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi adalah secara langsung infrastruktur memberikan manfaat kepada rumah tangga (household) dan banyak dinikmati juga oleh perusahaan yang menyebabkan

terjadinya pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya memberikan kesejahteraan Prud'homme (**dalam Briceno dkk, 2004**).

Kontribusi Infrastruktur terhadap Pembangunan Keterkaitan antara infrastruktur (sektor transportasi) dengan pertumbuhan ekonomi pada konteks pengeluaran pemerintah (government spending) disektor transportasi sesuai dengan Teori Keyles (dalam Gardner Ackley, 1961) menyatakan bahwa kegiatan pemerintah merembes ke segala bidang dengan asumsi perekonomian tertutup, dimana Y adalah pertumbuhan ekonomi, C adalah konsumsi, G adalah volume pengeluaran pemerintah, dan I adalah investasi. Secara sistematis memiliki identitas sebagai berikut: Penelitian tentang efek investasi negara pada infrastruktur (dalam hal ini transportasi dan komunikasi) terhadap pertumbuhan dilakukan oleh Easterly dan Rebelo pada tahun 1993. Dengan menggunakan penilaian variabel sebagai penolong untuk menghindari endogenous yang menghubungkan dua variabel dan kemungkinan hubungan timbal balik sebab akibat. Dengan metode pool regresi, ditemukan bahwa investasi publik dalam bidang infrastruktur memiliki hubungan yang selalu positif dengan koefisien yang cukup tinggi antara 0,59 sampai 0,66 terhadap pertumbuhan. Dalam mendorong pembangunan infrastruktur, pemerintah sebagai pemain utama dalam sektor infrastruktur selayaknya menjaga kesinambungan investasi pembangunan infrastruktur dan memprioritaskan infrastruktur dalam rencana pembangunan, sehingga infrastruktur dapat dibiayai baik secara kuantitas maupun kualitas. Pembangunan infrastruktur sepatutnya melibatkan pihak

swasta dan masyarakat demi tercapainya pembangunan yang berkesinambungan. Haruslah ada kombinasi yang tepat antar infrastruktur berskala besar dan kecil untuk mencapai target pemerataan pendapatan dan penanggulangan kemiskinan. Untuk itu perlu pendekatan lebih terpadu dalam pembangunan infrastruktur mulai dari perencanaan sampai pelayanannya kepada masyarakat, guna menjamin sinergi antar sektor, daerah maupun wilayah. Secara lebih rinci penyediaan infrastruktur terhadap pembangunan ekonomi adalah: (Basri, 2002)

1. Mempercepat dan menyediakan barang-barang yang dibutuhkan.
2. Tersedianya infrastruktur akan memungkinkan tersedianya barang-barang kebutuhan masyarakat dengan biaya lebih yang lebih murah.
3. Infrastruktur yang baik dapat memperlancar transportasi yang pada gilirannya merangsang adanya stabilisasi dan mengurangi disparitas harga antar daerah.
4. Infrastruktur yang memperlancar jasa transportasi menyebabkan hasil produksi daerah dapat diangkut dan dijual ke pasar.

Seperti yang dilansir dalam web resmi kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat Republik Indonesia (<http://www.pu.go.id/isustrategis/views/9>) bahwa pembangunan infrastruktur mempunyai peran vital dalam mewujudkan pemenuhan Hak Dasar Rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan kesehatan dan lain-lain. Dengan demikian, dapat dikatakan infrastruktur

adalah modal esensial masyarakat yang memegang peranan penting dalam mendukung ekonomi, sosial-budaya, dan kesatuan dan persatuan yang mengikat dan menghubungkan antar daerah.

Infrastruktur, yang sering disebut pula prasarana dan sarana fisik disamping memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan juga terhadap proses pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan indikasi bahwa wilayah yang memiliki kelengkapan sistem infrastruktur yang berfungsi lebih baik dibandingkan dengan wilayah lainnya mempunyai tingkat kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan serta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pula. Sebaliknya, keberadaan infrastruktur yang kurang berfungsi dengan baik mengakibatkan problem sosial, lingkungan dan ekonomi.

Dalam konteks ekonomi, infrastruktur merupakan modal sosial masyarakat (*social overhead capital*) yaitu barang-barang modal esensial sebagai tempat bergantung pada perkembangan ekonomi dan merupakan prasyarat agar berbagai aktivitas masyarakat berlangsung. Dengan kata lain, infrastruktur merupakan katalisator diantara proses produksi, pasar dan konsumsi akhir. Keberadaan infrastruktur memberikan gambaran tentang kemampuan berproduksi masyarakat dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai apabila tidak ada ketersediaan infrastruktur yang memadai atau dengan kata lain infrastruktur adalah *basic determinant* atau kunci bagi perkembangan

ekonomi. Secara tidak langsung, pembangunan infrastruktur akan mendukung produktivitas sektor ekonomi lainnya sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial-budaya kehidupan masyarakat melalui efek berganda. Sedangkan secara langsung terkait sektor konstruksi, infrastruktur juga akan menciptakan kesempatan kerja dan usaha, oleh karena itu keberadaan infrastruktur yang baik akan dapat mendorong terciptanya stabilitas berbagai aspek dalam masyarakat guna menunjang laju pembangunan nasional.

Oleh sebab itu Pemerintah berkomitmen untuk mengutamakan pembangunan infrastruktur mengingat peran dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi memberikan dampak besar. Keberadaan infrastruktur telah terbukti berperan sebagai instrumen bagi pengurangan kemiskinan, pembuka daerah terisolasi, dan mempersempit kesenjangan antar wilayah. Dengan demikian, investasi infrastruktur baik dari pemerintah maupun swasta dan masyarakat perlu terus didorong guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor riil, penyerapan tenaga kerja guna mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta menumbuhkan investasi sektor lainnya.

C. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa atau negara dapat dinilai dengan berbagai ukuran. Secara umum, pertumbuhan tersebut dapat diukur melalui sebuah besaran dengan istilah Pendapatan Nasional. Meskipun

bukan merupakan satu-satunya ukuran untuk menilai pertumbuhan ekonomi *output* suatu bangsa. Ini cukup representatif dan sangat lazim digunakan. Pendapatan nasional bukan hanya berguna untuk menilai perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara lain. Disamping itu, dari pendapatan nasional selanjutnya dapat pula diperoleh turunannya (*derivative measures*) seperti pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita. (Subandi, 2014;29)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang periode 25 tahun PJP I tergolong tinggi. Selama pelita I laji pertumbuhan perekonomian rata-rata 8,56% pertahun, dalam pelita II menurun rata-rata 6,96% pertahun. Namun dalam pelita III menurun lagi menjadi rata-rata 6,24% pertahun, dan pada pelita IV pertumbuhan tersebut kembali turun menjadi 5,32% pertahun dan pada pelita V pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi sekitar 7% pertahun. (Subandi, 2014;30)

Beberapa faktor yang memungkinkan perekonomian Indonesia tumbuh pesat sepanjang kurun pembangunan jangka panjang pertama yang lalu, antara lain keberhasilan merehabilitas sarana dan prasarana ekonomi pada masa pemulihan 1966-1968, termasuk reformasi dalam bidang perbankan dan penanaman modal. Kendati pada awal 1980-an sempat terganjal oleh dampak resesi dunia, namun berkat kesiagaan pemerintah meluncurkan berbagai kebijakan deregulatif berhasil memulihkan situasi, yang didukung oleh kemantapan situasi pangan. (Subandi, 2014;30)

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pada abad 19 banyak ahli ekonomi yang menganalisis dan membahas, serta mengemukakan teori-teori tentang tingkat-tingkat pertumbuhan ekonomi. Beberapa diantaranya yang dituliskan dalam buku Subando adalah Fredrich List, Bruno Hilder brand, Karl Bucher dan WW Rostow.

Fredrich List, adalah penganut paham *Laisser Faire* dan berpendapat bahwa sistem ini dapat menjamin alokasi sumber-sumber secara optimal, tetapi proteksi terhadap industri-industri tetap diperlukan. Pertumbuhan ekonomi sebenarnya tergantung kepada peranan pemerintah, organisasi-organisasi swasta, *entrepreneur*, dan kebudayaan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi hanya terjadi apabila dalam masyarakat terdapat kebebasan dalam organisasi politik dan kebebasan perorangan. Fredrich List berpendapat bahwa hanya dinegara-negara yang berhawa sedang paling cocok untuk industri, karena kepadatan penduduk yang sedang dan merupakan pasar yang cukup, disamping sektor pertanian yang sudah efisien. Sedangkan di daerah tropis paling cocok untuk pertanian, karena pada umumnya jumlah penduduk sangat padat. Pertanian belum begitu efisien dan persediaan sumber-sumber alam sangat sedikit. Disini yang terpenting adalah bahwa industri/pabrik diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi. Meskipun pada permulaannya diperlukan perlindungan. (Subandi, 2014;30)

Bruno Hilder Brand adalah pengkritik Fredrich List, mereka mengatakan bahwa perkembangan masyarakat atau ekonomi bukan karena sifat-sifat produksi atau konsumsinya, tetapi lebih ditekankan pada metode distribusi yang digunakan. Bruno mengemukakan 3 sistem distribusi yaitu:

1. Natural atau perekonomian barter
2. Perekonomian uang
3. Perekonomian kredit.

Sayangnya Bruno Hilder Brand tidak mengemukakan bagaimana fase-fase tersebut berkembang menuju fase berikutnya. (Subandi, 2014;31)

Sedangkan **Karl Bucher** mempunyai pendapat yang serupa walaupun tidak sama. Karl Bucher mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah melalui 3 tingkat, yaitu:

1. Produksi untuk kebutuhan sendiri
2. Perekonomian kota
3. Perekonomian nasional dimana peranan pedagang-pedagang-pedagang tampak makin penting. Jadi, barang-barang tersebut diproduksi untuk pasar, ini merupakan gambaran evolusi di

Jerman.

(Subandi, 2014;31)

W.W. Rostow dalam bukunya *“The Stage of Economic Growth”* mengemukakan bahwa proses pertumbuhan ekonomi dapat dibedakan

dalam lima tahap dari lima tahap pertumbuhan ekonomi tersebut. Rostow membuat penggolongan tahap-tahap pertumbuhan ekonomi berdasarkan pada ciri-ciri perubahan keadaan ekonomi, politik dan sosial yang berlaku serta transportasi suatu masyarakat tradisional menjadi suatu masyarakat modern (Subandi, 2014;31). Tahap-tahap pertumbuhan ekonomi Rostow adalah

1. Tahap Masyarakat Tradisional (*the traditional society*)

Rostow mengartikan bahwa masyarakat tradisional sebagai masyarakat yang :

- a. Strukturnya fungsi produksi yang terbatas, cara-cara memproduksi yang relatif primitif dan sikap masyarakat serta cara hidupnya yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dicetuskan oleh cara pemikiran yang bukan rasional, tetapi oleh kebiasaan yang telah berlaku secara turun-temurun. Tingkat produksi yang dapat dicapai masih sangat terbatas, karena ilmu pengetahuan dan teknologi modern belum ada atau belum digunakan secara sistematis dan teratur.
- b. Tingkat produksi perkapita dan tingkat produktivitas perpekerja masih sangat terbatas. Oleh sebab itu sebagian besar dari sumber-umber daya masyarakat di gunakan untuk kegiatan dalam sektor pertanian. Dalam sektor ini struktur sosialnya sangat bersifat hierarkis, sehingga mobilitas secara vertikal dalam masyarakat sedikit sekali.

c. Kegiatan politik dan pemerintahan terdapat di daerah-daerah yang dipegang oleh tuan-tuan tanah berkuasa. Kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat selalu dipengaruhi oleh pandangan penguasa di berbagai daerah tersebut.

2. Tahap Prasyarat Lepas Landas (*the precondition for take off*)

W.W Rostow mendefinisikan tahap prasyarat untuk lepas landas sebagai suatu masa transisi pada saat masyarakat mempersiapkan dirinya ataupun dipersiapkan dari luar untuk mencapai pertumbuhan yang mempunyai kekuatan untuk terus berkembang (*self-sustain growth*) pada tahap ini dan sesudahnya pertumbuhan ekonomi akan berlaku secara otomatis. Tahap prasyarat untuk lepas landas menurut Rostow dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Tahap prasyarat untuk lepas landas yang dicapai oleh engaranegara Eropa, Asia, Timur tengah dan Afrika yang dilakukan dengan merubah struktur masyarakat tradisional yang sudah ada
- b. Yang kedua dinamakan *Rostow bom free*, yaitu prasyarat lepas landas yang dicapai Amerika Serikat, Kanada, Australia dan Selandia Baru. Tanpa harus merombaksistem masyarakat tradisional yang ada, karena masyarakat negara-negara tersebut terdiri dari imigran yang telah mempunyai sifat-sifat yang diperlukan oleh masyarakat untuk mencapai tahap prasyarat lepas landas.

Pertumbuhan ekonomi ini akan tercapai apabila diikuti oleh perubahan lain dalam masyarakat, yaitu:

- a. Pembangunan fasilitas/prasarana umum (*social overhead capital*) terutama bidang transportasi.
 - b. Revolusi teknik dibidang pertanian (teknik baru), karena banyaknya orang-orang yang pindah ke kota (urbanisasi).
 - c. Perluasan impor yang dibiayai oleh hasil produksi sumber sumber yang ada (termasuk penanaman modal/investasi asing).
 - d. Terjadinya *saving* (tabungan masyarakat), meningkatnya tingkat pendidikan dan keterampilan sikap masyarakat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan sikap pengambilan resiko dan cara bekerja.
 - e. Munculnya kepemimpinan baru yang mempunyai sifat nasionalisme yang reaktif (*reactive nationalism*) yaitu beraksi secara positif atau tekanan-tekanan yang datang dari negara-negara yang lebih maju.
3. Tahap lepas landas (*take off*)

Tahap lepas landas adalah tahap *interval* dimana tahap masyarakat tradisional dan tahap prasyarat untuk lepas landas telah dilewati. Pada periode ini beberapa penghalang pertumbuhan dihilangkan dan kekuatan-kekuatan yang menimbulkan kemajuan ekonomi diperluas dan dikembangkan serta mendominasi masyarakat sehingga menyebabkan efektivitas investasi dan

meningkatnya tabungan masyarakat. Sifat-sifat perubahan berbagai jenis kegiatan ekonomi didalam tahap-tahap lepas landas digolongkan atas tiga pertumbuhan yaitu:

- a. Sektor pertumbuhan premier, yaitu sektor-sektor atau kegiatan ekonomi yang menciptakan pertumbuhan yang pesat dan menciptakan kekuatan ekspansi ke berbagai sektor dalam perekonomian.
 - b. Sektor pertumbuhan suplementer, yaitu sektor yang berkembang dengan cepat sebagai akibat langsung dari perkembangan di sektor pertumbuhan primer.
 - c. Sektor pertumbuhan terkait yaitu sektor atau kegiatan ekonomi yang berkembang sejalan dengan kenaikan pendapatan penduduk dan produksi sektor pertanian.
4. Gerakan ke arah kedewasaan (*the drive of maturity*)

Gerakan ke arah kedewasaan diartikan sebagai suatu periode ketika masyarakat secara efektif menerapkan teknologi modern dalam mengolah sebagian besar faktor-faktor produksi dan kekayaan alamnya.

Kedewasaan adalah tingkat dimana suatu perekonomian menunjukkan kapasitas untuk bergerak melampaui industri-industri dasar yang memberikan kekuatan kepada periode *take off* untuk mengabsorsir serta menerapkan secara efisien hasil perkembangan teknologi modern. Pada tahap ini 10%-20% dari jumlah pendapatan

nasional, diinvestasikan secara tetap hingga *out-put* tetap lebih besar daripada tingkat pertambahan penduduk. Adapun ciri ciri gerakan ke arah kedewasaan menurut Rostow adalah:

- a. Kematangan teknologi dimana struktur dan keahlian tenaga kerja mengalami perubahan.
 - b. Sifat kepemimpinan dan perusahaan mengalami perubahan.
 - c. Masyarakat secara keseluruhan merasa bosan dengan keajaiban yang diciptakan oleh industrialisasi, karena berlakunya hukum kegunaan batas semakin berkurang.
5. Masa konsumsi tinggi (*the age of high mass consumption*)

Pada masa ini perhatian masyarakat mengarah kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat dan bukan lagi kepada masalah produksi. *Leading sector* bergerak ke arah barang-barang konsumsi yang tahan lama serta jasa-jasa, pada periode ini terdapat tiga macam tujuan masyarakat untuk mendapatkan sumber-sumber daya yang tersedia dan dukungan politis yaitu:

- a. Memperbesar kekuasaan dan pengaruh negara tersebut keluar negeri dan kecenderungan ini dapat berakhir pada penaklukan atas negara-negara lain.
- b. Menciptakan suatu *welfare state*, yaitu kemakmuran yang lebih merata kepada penduduknya dengan cara mengusahakan terciptanya pembagian pendapatan yang lebih merata melalui

- sistem perpajakan yang progresif dalam sistem perbaikan seperti ini makin besar pendapatan maka makin besar pajaknya.
- c. Mempertinggi tingkat konsumsi masyarakat diatas konsumsi dasar yang sederhana atas makanan, pakaian, rumah keluarga secara terpisah (*single family house*) dan juga barang-barang konsumsi tahan lama srta barang-barang mewah.

Tahap pertumbuhan ekonomi yang digambarkan Rostow adalah sistem pentahapan dimana suatu tahapan tidak mungkin terjadi tanpa melalui tahapan yang lain. Artiya tahapan kedua tidak mungkin terjadi tanpa tahapan pertama, tahap ketiga tidak akan terjadi tanpa tahap kedua, dan seterusnya. Namun kenyataan ada negara yang tidak pernah melewati tahap pertama dari teori pertumbuhan ekonomi Rostow, tetapi langsung ketahap kedua. Misalnya Amerika Serikat dan Australia karena penduduknya adalah orang-orang Eropa yang kemudian mentransfer ilmu pengetahuan kebenua tersebut. (Subandi, 2014;31-35)

2. Upaya Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Pengadaan pembangunan adalah mencapai kesejahteraan masyarakat salah satu point penting kesejahteraan masyarakat adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Ditinjau begitu pentingnya pertumbuhan ekonomi, adapun upaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah :

a. Tahap-Tahap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Rostow, maka terdapat lima tahap pertumbuhan ekonomi; masyarakat tradisional, prasyarat-prasyarat untuk mulai meluncur, peluncuran, dorongan ke arah kedewasaan, dan tingkat konsumsi massa yang tinggi. Penjelasannya mengenai masyarakat yang tradisional banyak persamaannya dengan yang dinyatakan Hagen atau bahkan sistem ekonomi seimbang tingkat rendah. Struktur sosialnya mengikuti suatu sistem susunan kekuasaan, dan sistem nilainya berkaitan dengan fatalisme jangka panjang. Tetapi inti dari masyarakat yang tradisional adalah bahwa masyarakat tersebut memiliki kemampuan menghasilkan per kepala yang sangat rendah karena keterbelakangan teknologinya. Seperti dikatakan Rostow, maka kemampuan berproduksinya didasarkan atas ilmu pengetahuan serta teknologi pra-Newton dan sikap-sikap pra-Newton terhadap dunia fisik yang nyata.

Tahap kedua menurut Rostow, di mana prasyarat-prasyarat untuk peluncuran mulai dikembangkan secara umum, melibatkan perubahan-perubahan ekonomi, maupun non-ekonomi yang penting. Di lingkungan non-ekonomi maka yang penting adalah munculnya suatu kelompok elite baru yang memandang modernisasi ekonomi bukan saja sebagai sesuatu yang mungkin tetapi juga didambakan. Dari kelompok inilah datangnya mereka yang bersedia mengarahkan tabungan-tabungan dan mengambil

resiko-resiko pembaruan. Dibidang ekonomi maka tahap penentuan berbagai prasyarat menyangkut beberapa perubahan dasar, *Rostow* mengutip kunjungan laksamana Pertama Perry ke Jepang sebagai suatu peristiwa yang membawa akibat nasionalisme reaktif serta modernisasi ekonomi.

Tahap ketiga adalah masa peluncuran, adalah masa yang menentukan. Pada tahap inilah perlawanan terhadap pertumbuhan yang mantap pada akhirnya teratasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi suatu keadaan yang normal. Dalam tahap prasyarat maka memang terjadi kemajuan ekonomi yang penting, tetapi masyarakat masih dicirikan oleh sikap-sikap serta teknik-teknik produksi yang tradisional. Namun dalam masa peluncuran, proses pertumbuhan itu sudah melembaga ke masyarakat.

Dorongan ke arah kedewasaan sebagai tahap pertumbuhan yang keempat, dalam masa ini maka teknologi modern meluas sampai luar sektor-sektor semula yang mendorong peluncuran itu sampai keseluruh bidang ekonomi yang penting.

Tahap yang terakhir dalam pertumbuhan ekonomi menurut *Rostow* adalah tingkat konsumsi massa yang tinggi, ketika sektor-sektor pemukanya beralih ke menghasilkan barang-barang konsumen serta jasa-jasa yang tahan lama. Pada tahap ini maka pendapatan masyarakat telah naik sampai ke tingkat di mana kebutuhan pokok untuk makan, perumahan dan pakaian bukan lagi

mejadi kebutuhan-kebutuhan konsumsi yang utama bagi angkatan kerjanya. Maka sistem ekonominya melalui proses politiknya, menyatakan kesediaannya untuk menyisihkan makin banyak sumberdaya bagi kesejahteraan dan jaminan sosial.

(Subandi,2014; 62)

b. Alat pendukung Pertumbuhan Ekonomi

Menurut **Subandi (2014)** Dua hal esensial harus dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi adalah pertama sumber-sumber yang harus digunakan secara lebih efisien. Ini berarti tak boleh ada sumber-sumber menganggur dan alokasi penggunaannya kurang efisien. Yang kedua, penawaran atau jumlah sumber-sumber atau elemen-elemen pertumbuhan tersebut haruslah diusahakan pertambahannya. Elemen-elemen yang memacu pertumbuhan ekonomi tersebut adalah sebagai berikut :

3. Sumber-sumber Alam

Elemen ini meliputi luasnya tanah, sumber mineral dan tambang, iklim, dan lain-lain. Beberapa negara sedang berkembang sangat miskin akan sumber-sumber alam, sedikitnya sumber-sumber alam yang dimiliki merupakan kendala cukup serius. Dibandingkan dengan sedikitnya kuantitas serta rendahnya persediaan kapital dan sumber tenaga manusia maka kendala sumber alam lebih serius.

4. Sumber-sumber Tenaga Kerja

Masalah di bidang sumber daya manusia yang dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang pada umumnya adalah terlalu banyaknya jumlah penduduk, pendayagunaannya rendah, dan kualitas sumber-sumber daya tenaga kerja sangat rendah.

5. Kualitas Tenaga Kerja yang Rendah

Negara-negara sedang berkembang tak mampu mengadakan investasi yang memadai untuk menaikkan kualitas sumber daya manusia berupa pengeluaran untuk memelihara kesehatan masyarakat serta untuk pendidikan dan latihan kerja.

6. Akumulasi Kapital

Untuk mengadakan akumulasi kapital diperlukan pengorbanan atau penyisihan konsumsi sekarang selama beberapa dekade. Di negara sedang berkembang, tingkat pendapatan rendah pada tingkat batas hidup mengakibatkan usaha menyetor tabungan sukar dilakukan. Akumulasi kapital tidak hanya berupa truk, pabrik baja, plastik dan sebagainya; tetapi juga meliputi proyek-proyek infrastruktur yang merupakan prasyarat bagi industrialisasi dan pengembangan serta pemasaran produk-produk sektor pertanian. Akumulasi kapital sering kali dipandang sebagai elemen terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Usaha-usaha untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi

dilakukan dengan memusatkan pada akumulasi kapital. Hal ini karena, pertama, hampir semua negara-negara berkembang mengalami kelangkaan barang-barang modal berupa mesin-mesin dan peralatan produksi, bangunan pabrik, fasilitas umum dan lain-lain. Kedua, penambahan dan perbaikan kualitas barang-barang modal sangat penting karena keterbatasan tersedianya tanah yang bisa ditanami.

(Subandi,2014; 114)

3.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari permasalahan/hambatan dalam pengelolaan perekonomian, dimana para pemilik modal besar selalu mendapatkan kesempatan yang lebih luas dibandingkan dengan para pengusaha kecil dan menengah yang serba kekurangan modal. Disamping itu, akses untuk mendapatkan bantuan modal perbankan lebih memihak kepada para pengusaha besar dibandingkan dengan pengusaha ekonomi lemah. Disamping itu pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional juga memberikan dampak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ketidakpastian perekonomian dan perdagangan dunia yang semakin meningkat, semakin menyebabkan kemungkinan-kemungkinan pertumbuhan ekonomi yang kurang menggembarakan

bagi bangsa Indonesia. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, secara umum adalah:

- a. Faktor produksi, yaitu harus mampu memanfaatkan tenaga kerja yang ada dan penggunaan bahan baku industri dalam negeri semaksimal mungkin.
- b. Faktor investasi, yaitu dengan membuat kebijakan investasi yang tidak rumit dan berpihak pada pasar.
- c. Faktor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran, harus surplus sehingga mampu meningkatkan cadangan devisa dan menstabilkan nilai rupiah.
- d. Faktor kebijakan moneter dan inflasi, yaitu kebijakan terhadap nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga ini juga harus antisipatif dan dapat diterima pasar,
- e. Faktor keuangan negara, yaitu berupa kebijakan fiskal yang konstruktif dan mampu untuk membiayai pengeluaran pemerintah (bukan defisit)

(Subandi, 2014;39)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut **Yoseph (1979)** penelitian adalah *art and science* guna mencari jawaban terhadap suatu permasalahan. Karena seni dan ilmiah maka penelitian juga akan memberikan ruang-ruang yang akan mengakomodasi adanya perbedaan tentang apa yang dimaksud dengan penelitian. Penelitian dapat juga diartikan sebagai cara pengamatan atau inkuiri dan mempunyai tujuan untuk mencari jawaban permasalahan atau proses penemuan, baik itu *discovery* maupun *invention*. *Discovery* diartikan hasil temuan yang memang sebetulnya sudah ada, sebagai contoh misalnya penemuan Benua Amerika adalah penemuan yang cocok untuk arti *discovery*. Sedangkan *invention* dapat diartikan sebagai penemuan hasil penelitian yang betul-betul baru dengan dukungan fakta. Misalnya hasil Kloning dari hewan yang sudah mati dan dinyatakan punah, kemudian diteliti untuk menemukan jenis yang baru. Penelitian adalah proses ilmiah yang mencakup sifat formal dan intensif. Karakter formal dan intensif karena mereka terikat dengan aturan, urutan, maupun cara penyajiannya agar memperoleh hasil yang diakui dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Intensif dengan menerapkan ketelitian dan ketepatan dalam melakukan proses penelitian agar memperoleh hasil yang dapat

dipertanggung jawabkan, memecahkan problem melalui hubungan sebab dan akibat, dapat diulang kembali dengan cara yang sama dan hasil sama.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2006)

Pada dasarnya mempunyai tujuan-tujuan dengan menggunakan cara-cara tertentu untuk memahami suatu obyek (fenomena) yang ada. Uraian yang menjelaskan berbagai fenomena dalam penelitian ini diharapkan memberikan hasil yang maksimal sehingga dapat dikategorikan menjadi suatu penulisan yang bernilai ilmiah.

Penelitian ini mencoba melihat serta mendeskripsikan secara intensif tentang gambaran sinergi pemerintah daerah khususnya BAPPEDA yang akan bekerja sama dengan masyarakat membangun infrastruktur jalan lingkar barat Kepanjen dengan memperhatikan dan mengedepankan pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Kepanjen.

B. Fokus Penelitian

Salah satu faktor penting dalam suatu penelitian adalah menentukan fokus. Perlunya fokus penelitian ini adalah untuk membatasi masalah dalam penelitian sehingga obyek yang akan diteliti tidak melebar dan terlalu luas.

Fokus penelitian ini juga ditujukan agar penelitian ini bisa lebih terarah dan lebih terinci serta tidak menyimpang dari rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Menurut **Moleong (2006)** fokus pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya. Fokus penelitian merupakan tahap awal pelaksanaan penelitian, dengan demikian peneliti akan memperoleh gambaran secara umum tentang obyek yang akan diteliti.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti kemudian mengambil fokus penelitian sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat Kepanjen sebagai strategi pemerintah Kabupaten Malang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
2. Dampak pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat Kepanjen sebagai strategi pemerintah Kabupaten Malang terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
 - a. Dampak positif pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat Kepanjen sebagai strategi pemerintah Kabupaten Malang terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
 - b. Dampak negatif infrastruktur jalan lingkar barat Kepanjen sebagai strategi pemerintah Kabupaten Malang terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

3. Faktor pendukung dan penghambat pembangunan infrastruktur jalan lingkaran barat Kepanjen sebagai strategi pemerintah Kabupaten Malang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
 - a. Faktor pendukung pembangunan infrastruktur jalan lingkaran barat Kepanjen sebagai strategi pemerintah Kabupaten Malang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
 - b. Faktor penghambat pembangunan infrastruktur jalan lingkaran barat Kepanjen sebagai strategi pemerintah Kabupaten Malang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana fenomena yang diteliti berlangsung sedangkan situs penelitian merupakan letak sebenarnya dimana peneliti mengadakan penelitian untuk mendapatkan data yang valid, akurat dan benar-benar dibutuhkan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Kota Kepanjen Kabupaten Malang sedangkan situs penelitian adalah di BAPPEDA. Beberapa pertimbangan penulis mengambil lokasi penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

Kepanjen adalah ibukota Kabupaten Malang yang baru, Kepanjen saat ini sedang berbenah diri agar nantinya layak sebagai ibu kota kabupaten, karena Kota Kepanjen juga dianggap sebagai daerah

Kabupaten Malang yang sangat berpotensi dalam pembangunan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial.

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Malang

BAPPEDA Kabupaten Malang dianggap mampu memberikan informasi yang tepat dalam menjawab rumusan masalah yang sedang diamati oleh peneliti. Selain itu BAPPEDA Kabupaten Malang sesuai sebagai media untuk mengaplikasikan ilmu dan membandingkan antara praktek dengan teori yang telah penulis peroleh di bangku kuliah.

D. Sumber dan Jenis Data

Menurut **Lofland dan Lofland dalam Moleong (2012)** “sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”. Dalam penelitian ini digunakan dua macam data, yaitu:

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan pihak yang terkait dengan objek yang diteliti. Data primer diperoleh dengan cara diamati, dicatat, dan dianalisis untuk menjadi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Desain yang dibuat dalam data primer harus menjamin pengumpulan data yang efisien dengan alat dan teknik serta karakteristik dari responden.

Dalam hal ini peneliti mencatat semua informasi yang didapat dari informan yaitu Bapak H. Edi Suhartono selaku Kepala BAPPEDA

Kabupaten Malang, Bapak Moch. Yekti Pracoyo, ST selaku Kabid Sarpras BAPPEDA Kabupaten Malang, Bapak Bambang Widjanarko, SE selaku Kabid Perencanaan Ekonomi BAPPEDA Kabupaten Malang, Bapak Mu'Ali dan Bapak Suwondo selaku petani di perkebunan sepanjang jalan lingkar barat Kepanjen dan Ibu Martini serta Ibu Endang selaku pemilik usaha di sepanjang jalan lingkar barat Kepanjen.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari objek yang diteliti. Dalam menggunakan data sekunder peneliti harus mengadakan evaluasi terhadap sumber, keadaan data sekundernya dan menjamin limitasi-limitasi dari data tersebut. Data sekunder ini dapat berupa dokumen-dokumen struktur organisasi, dokumen kerjasama, dokumen atau formulir pada pengadaan barang/jasa dan dokumen penawaran.

Dalam hal ini peneliti diarahkan langsung oleh Kepala Badan Perencanaan Kabupaten Malang Bapak H. Edi Suhartono untuk melihat struktur organisasi BAPPEDA Kabupaten Malang, rencana strategi serta program kerja BAPPEDA Kabupaten Malang secara terperinci di *website* resmi BAPPEDA Kabupaten Malang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Observasi adalah proses pencatatan perilaku subyek (orang), obyek (benda), atau kejadian yang sistemik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipasi, yakni peneliti tidak melibatkan diri dalam lingkungan yang diamati sehingga mempengaruhi objek amanat tersebut, peneliti hanya sebagai pengumpul data saja. Yang akan diamati dalam proses observasi ini akan dilakukan secara fleksibel melihat kondisi objek dan lokasi penelitian pengamatan yang dilakukan oleh peneliti menggunakan semua panca indra yang dimiliki oleh peneliti dan disesuaikan dengan objek penelitian dan berlandaskan teori dan pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti. Peneliti akan menggunakan catatan lapangan yang merupakan catatan-catatan yang digunakan untuk mencatat informasi yang diperoleh selama melakukan penelitian di lapangan. Instrumen ini digunakan agar peneliti terhindar dari kesalahan akan apa yang telah diamati.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. Teknik wawancara yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan mempersiapkan pokok-pokok permasalahan terlebih dahulu yang kemudian di kembangkan dalam wawancara, kemudian responden akan menjawab secara bebas sesuai

dengan permasalahan yang diajukan sehingga proses wawancara dapat terkontrol.

Wawancara dilakukan peneliti kepada beberapa informan/narasumber diantaranya adalah Bapak H. Edi Suhartono selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Malang, Bapak Moch. Yekti Pracoyo, ST selaku Kabid Sarpras BAPPEDA Kabupaten Malang, Bapak Bambang Widjanarko, SE selaku Kabid Perencanaan Ekonomi BAPPEDA Kabupaten Malang, wawancara tersebut dilakukan secara terstruktur atau pertanyaan dibuat berdasarkan fokus dan teori yang peneliti gunakan, waktu wawancarapun sudah terstruktur, sedangkan wawancara dengan narasumber/informan Bapak Mu'Ali dan Bapak Suwondo selaku petani di perkebunan sepanjang jalan lingkaran barat Kepanjen dan Ibu Martini serta Ibu Endang selaku pemilik usaha di sepanjang jalan lingkaran barat Kepanjen dilakukan secara lisan atau dilakukan secara spontan tanpa waktu yang terstruktur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ini merupakan data atau informasi yang diperlukan dari dokumen pemerintah daerah tentang data yang diperlukan seperti jumlah produk unggulan, luas lahan.

Dokumentasi dimanfaatkan peneliti ketika wawancara berlangsung dan *pasca* wawancara untuk mengambil gambar narasumber/informan.

F. Analisa Data

Setelah data dilapangan terkumpul, maka peneliti mengelola data dengan menggunakan teknik yang sesuai untuk mendapatkan pemecahan masalah yang diteliti sehingga tujuan penelitian dapat tercapai, yaitu mendapatkan gambaran tentang *Local Economic Development*. Jenis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. **Miles dan Huberman (1984) dikutip Sugiyono (2013)**, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. **Miles, Hubberman, dan Saldana (2013)** menjelaskan empat alur kegiatan analisa data sebagaimana berikut:

1. *Data collection* (Pengumpulan data)

Pengumpulan data merupakan proses awal yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mendapatkan data yang valid. Proses ini dilakukan melalui observasi ke lapangan, wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan permasalahan, serta dokumentasi berupa foto.

Proses ini peneliti melakukan observasi ke jalan lingkar barat dan menemui beberapa petani dan pendiri usaha di sepanjang jalan lingkar barat untuk memastikan bahwa di jalan lingkar barat Kepanjen terdapat kegiatan

ekonomi. Serta wawancara dengan staff BAPPEDA Kabupaten Malang dan dokumentasi berupa foto staff BAPPEDA Kabupaten Malang.

2. *Data condensation* (Kondensasi data)

Kondensasi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data mentah yang didapat dari lapangan. Kondensasi data berlangsung secara terus-menerus selama penelitian bahkan sebenarnya kondensasi data dapat dilakukan sebelum data terkumpul secara menyeluruh. Kondensasi data dilakukan dengan cara, data yang diperoleh di lokasi penelitian dituangkan dalam uraian atau laporan secara lengkap dan terinci. Selanjutnya laporan tersebut disederhanakan, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Hal ini dilakukan secara terus-menerus, baik selama proses penelitian berlangsung maupun pada tahap analisa data selanjutnya, yaitu penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hal ini bertujuan untuk memperkuat data terhadap sebuah konsep yang berbeda dengan reduksi data yang lebih terkesan melemahkan data dengan membuang data yang diperoleh di lapangan.

Setelah pengumpulan data dirasa cukup dan sesuai yang peneliti butuhkan untuk melengkapi laporan penelitian ini, maka yang dilakukan peneliti selanjutnya adalah memilah data dan menulis kembali sehingga menjadi laporan penelitian yang baik dan sesuai.

3. *Data display* (Penyajian data)

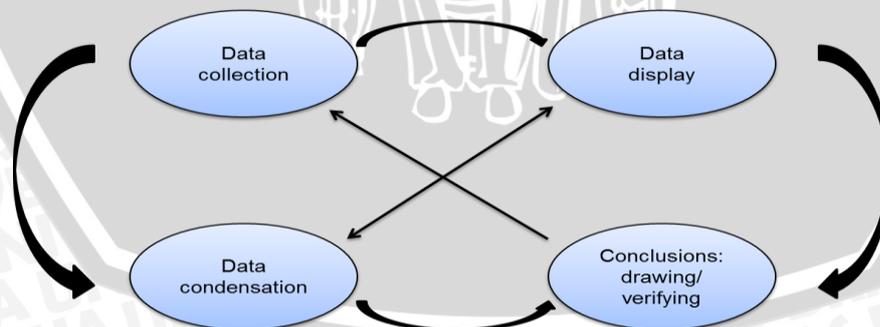
Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memungkinkan penarikan kesimpulan. Dengan melihat penyajian-penyajian dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, lebih jauh dalam menganalisis untuk kemudian disusun secara sistematis sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan masalah yang diangkat.

4. *Conclusions: drawing/verifying*

Kegiatan ini mencari makna yaitu mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi yang mungkin alur sebab akibat dan proposisi. Verifikasi berarti meninjau ulang pada catatan lapangan, serta bertukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, juga upaya-upaya yang luas untuk mendapatkan salinan suatu temuan dalam data yang lain, dan data harus diuji kebenarannya.

SIKLUS PROSES ANALISIS DATA

Gambar 2 Model Analisa Interaktif



Sumber: Miles, Huberman dan Saldana (2013:14)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Malang

Seiring dengan adanya kebijakan tentang otonomi daerah, maka pemerintah daerah yang awalnya bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur urusan daerahnya sendiri. Kebijakan tersebut dimulai sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan dilaksanakan serentak diseluruh daerah di Indonesia. Salah satu dari implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut adalah Kabupaten Malang yang berhak mengurus daerahnya sendiri secara mandiri.

Kabupaten Malang sendiri merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia yang terletak di Propinsi Jawa Timur dan merupakan Kabupaten yang terluas kedua wilayahnya setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 Kabupaten/ Kota yang ada di Jawa Timur. Dilansir dari website resmi Pemerintah Kabupaten Malang hal ini didukung dengan luas wilayahnya 3.534,86 km² atau sama dengan 353.486 ha dan jumlah penduduknya 2.446.218 jiwa (tahun 2010). Kabupaten Malang juga dikenal sebagai daerah yang kaya akan potensi diantaranya dari pertanian, perkebunan, tanaman obat keluarga dan lain sebagainya. Disamping itu juga dikenal dengan obyek-obyek wisatanya.

Pemerintah kabupaten Malang mengharapkan Pada tahun 2015 terwujudnya visi Kabupaten Malang yang mandiri, agamis, demokratis, produktif, maju, aman, tertib, dan berdaya saing atau bisa disebut dengan “MADEP MANTEB”

Adapun penjelasan visi yang dimaksud: Pada visi tersebut terdapat 8 kata kunci yaitu: mandiri, agamis, demokratis, produktif, aman, tertib, dan berdaya saing artinya dalam rangka mencapai tujuan umum pembangunan Kabupaten Malang yaitu Masyarakat sejahtera maka dalam 5 tahun yang akan datang ini diperlukan upaya mewujudkan:

1. Mandiri

Dimaknai dengan

- a. Kemandirian pengelolaan daerah berupa kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi SDA dan buatan yang didukung oleh kemampuan SDM, energi, infrastruktur dan pelayanan publik.
- b. Kemandirian masyarakat berupa sikap dan kondisi masyarakat yang memiliki semangat entrepreneurship untuk semakin mampu memenuhi kebutuhan dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri.

Inti dari pengertian kemandirian adalah semakin berkembangnya jiwa leadership di kalangan pemerintah dan semangat entrepreneurship di kalangan masyarakat luas.

2. Agamis

Dimaknai dengan kondisi masyarakat yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa meningkatkan kualitas keamanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia yang diharapkan berdampak terhadap keamanan, ketertiban, dan produktifitas tinggi.

3. Demokratis

Dimaknai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan partisipasi masyarakat, dengan sikap saling menghargai perbedaan dalam berfikir, bertindak, maupun pengambilan keputusan bersama yang berlandaskan hukum dan keadilan.

4. Produktif

Dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas kinerja masyarakat sebagai pilar utama peningkatkan perekonomian daerah.

5. Maju

Dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas SDM dan hasil-hasil pembangunan yang ditandai dengan semakin meningkatnya indeks pembangunan manusia.

6. Aman

Dimaknai dengan semakin meningkatnya keamanan masyarakat dan terlaksananya penegakan hukum yang berkeadilan tanpa memandang kedudukan, pangkat, jabatan, seseorang, serta terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia.

7. Tertib

Dimaknai dengan semakin meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap berbagai peraturan hukum yang berlaku.

8. Berdaya saing

Dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas produk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk bersaing di pasar lokal maupun nasional serta semakin meningkatnya daya saing daerah dalam rangka menarik minat investor.

Hal ini sejalan dengan pesan filosofi pembangunan dalam lambang Kabupaten Malang yaitu : Satata Gama Karta Raharja atau terwujudnya Kabupaten Malang yang adil dan makmur materiil dan spirituil disertai kerukunan beragama atas dasar kesucian yang langgeng (abadi). Kesejahteraan yang utuh itu diyakini dapat dicapai dengan mewujudkan kemajuan secara komprehensif dari 8 kunci tersebut di atas.

Adapun misi Pemerintah Kabupaten Malang yang implementasikan dari keinginan menyatukan langkah dari gerak dalam melaksanakan visi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemandirian melalui pemberdayaan masyarakat kalangan *wong cilik* di Kabupaten Malang untuk keperluan pemanfaatan potensi sosial dan ekonomi serta untuk mengoptimalkan prakarsa-prakarsa cerdas dalam kehidupan masyarakat.
2. Meningkatkan pembinaan mental spiritual masyarakat di Kabupaten Malang sehingga kualitas kehidupan beragama tidak hanya ditumpukan pada kesalahan pribadi, tetapi juga tercermin pada menguatkan

kesalahan ritual sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing yang kemudian diterjemahkan dalam kesalahan sosial.

3. Meningkatkan pendidikan politik dan hukum kepada masyarakat Kabupaten Malang demi terwujudnya tatanan masyarakat madani yang berkeadaan dengan berlandaskan keadilan dan kebenaran.
4. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Malang melalui reformasi sistem pelayanan kesehatan berdasarkan semangat populisme dan negara kesejahteraan.
5. Meningkatkan pendidikan dasar bagi masyarakat Kabupaten Malang untuk keperluan menyongsong era globalisasi yang memprasyaratkan adanya kemampuan berpikir secara sistematis dan logis.
6. Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan di Kabupaten Malang melalui peningkatan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya kesetaraan gender.
7. Mewujudkan revitalisasi pertanian dan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Malang sebagai bagian dari upaya peletakan dasar industrialisasi di pedesaan.
8. Mempercepat pembangunan ekonomi dan infrastruktur.
9. Membangun sumber daya manusia yang “Berdaya Saing” tinggi yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan, hukum dan sosial budaya.

Pemerintah Kabupaten Malang memiliki program pembangunan guna mewujudkan Kabupaten Malang yang lebih kompleks, berikut adalah program pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang.

1. Mewujudkan masyarakat yang agamis dan berbudaya

Suatu kondisi masyarakat yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia yang berdampak terhadap keamanan, ketertiban dan produktifitas tinggi.

2. Mewujudkan pemerintahan dan masyarakat yang demokratis

Suatu kondisi penyelenggaraan pemerintahan yang senantiasa melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berlandaskan hukum dan keadilan; sedangkan dari sisi masyarakat terwujudkan suatu kondisi masyarakat yang modern dan majemuk, menjalani kehidupan yang bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan falsafah Negara Pancasila, ditandai dengan perilaku bijaksana dan melaksanakan prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat.

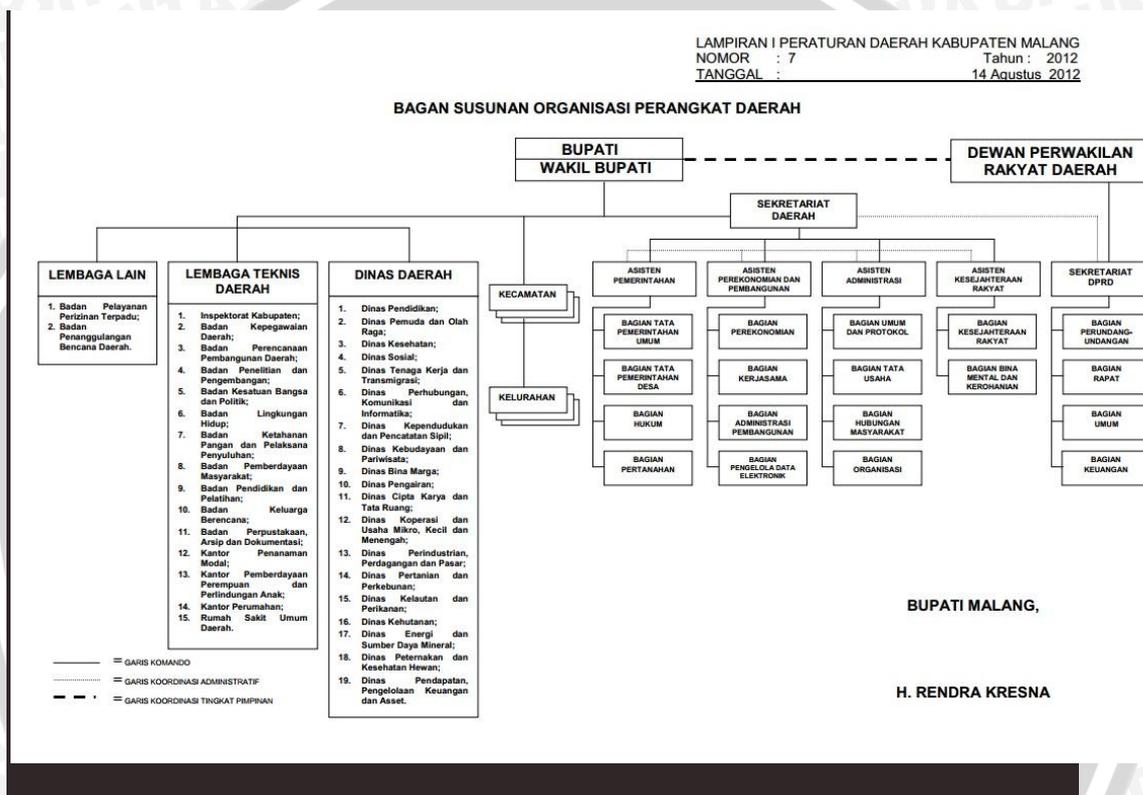
3. Mewujudkan pemerintahan dan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing

Suatu kondisi pemerintahan dan masyarakat yang semakin mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan kemampuan sendiri dan berdaya saing tinggi yang ditandai dengan semakin berkembangnya jiwa leadership dikalangan pemerintahan dan semangat entrepreneurship di kalangan masyarakat luas.

4. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera

Masyarakat yang semakin meningkat kemampuannya dan memenuhi kebutuhan hidup dan adanya jaminan masa depan yang lebih baik.

Gambar 3 Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Malang



1. Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang

Kecamatan Kapanjen merupakan salah satu wilayah Kabupaten yang terletak di sebelah Selatan Kota Malang + 18 Km, dimana dulunya merupakan wilayah pembantu Bupati di Kapanjen dan pada saat ini Kecamatan Kapanjen merupakan pusat Pemerintah Kabupaten Malang, dengan telah keberadaanya Kantor/Dinas Badan/Lembaga dan Instansi Tingkat Kabupaten Malang.

[\(http://kecepanjen.pemkab.malang.go.id/\)](http://kecepanjen.pemkab.malang.go.id/)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2008 tentang Persetujuan Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang ke Kecamatan Kepanjen merupakan awal berdirinya ibu kota baru. Proses panjang penetapan Kepanjen sebagai ibu kota kabupaten diawali usulan Bupati Malang dengan surat Nomor 135.7/093/421.202/2007 Tanggal 17 Januari 2007 kepada Ketua DPRD Kabupaten Malang. Usulan itu diperkuat persetujuan dari DPRD Kabupaten Malang berdasarkan Keputusan Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 12 Maret 2007. Sejak 2012, pusat pemerintahan Kabupaten Malang berangsur-angsur pindah ke Kepanjen.

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Malang

Secara sistematis, kelembagaan perencanaan diwujudkan mulai dari level nasional hingga ke daerah (BAPPEDA). Dengan adanya UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah, perencanaan daerah berkembang menjadi kewajiban bagi daerah dalam penyelenggaraannya.

Lahirnya UU No. 26 Tahun 2007 memberikan peluang bagi pendekatan-pendekatan yang berbeda untuk muncul ke permukaan. Pendekatan didasarkan atas potensi dan kendala yang dihadapi oleh kota-kota, baik itu fisik, ekonomi, dan budaya. Selain itu, secara

hubungan spasial antara wilayah tidak lagi didominasi hubungan antara pusat–pinggiran, melainkan berkembang menjadi hubungan-hubungan yang sifatnya lebih self-sustain dengan memperhatikan peluang pasar ke luar. Disini, perencanaan spasial menjadi bersifat strategis, ketimbang memperkuat hubungan ‘tradisional’ kota dengan wilayah sekitarnya sebagai hubungan pusat – pinggiran. Dibalik perencanaan kota yang disebut mainstream (formal) pengaruh-pengaruh perencanaan yang berkembang di dunia barat pun turut mempengaruhi gagasan perencana di Indonesia. (<http://bappeda.malangkab.go.id/>)

Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2008 memiliki tugas pokok menyusun dokumen perencanaan daerah, baik jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Sedangkan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program/kegiatan terhadap rencana yang telah ditentukan maka BAPPEDA Kabupaten Malang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melalui :

1. Monitoring dan evaluasi,
2. Melaksanakan forum perencanaan bidang pembangunan,
3. Mengadakan koordinasi dan kerjasama pembangunan antar daerah dan antar wilayah perbatasan,
4. Menyusun dokumen studi perencanaan

5. Menyusun data statistik daerah sebagai penyedia informasi perencanaan pembangunan,
6. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten,
7. Menyusun dokumen perencanaan,
8. Mengadakan sosialisasi dan diseminasi produk perencanaan (jangka panjang, menengah, tahunan, penataan ruang dan teknis) serta
9. Menyusun dan menyediakan laporan hasil-hasil pembangunan.

Tabel 2 Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang

Visi	Menjadi lembaga perencanaan yang kapabel dan profesional dalam mempersiapkan perencanaan pembangunan daerah.
Misi	Menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas, sinergis, partisipatif dan akuntabel

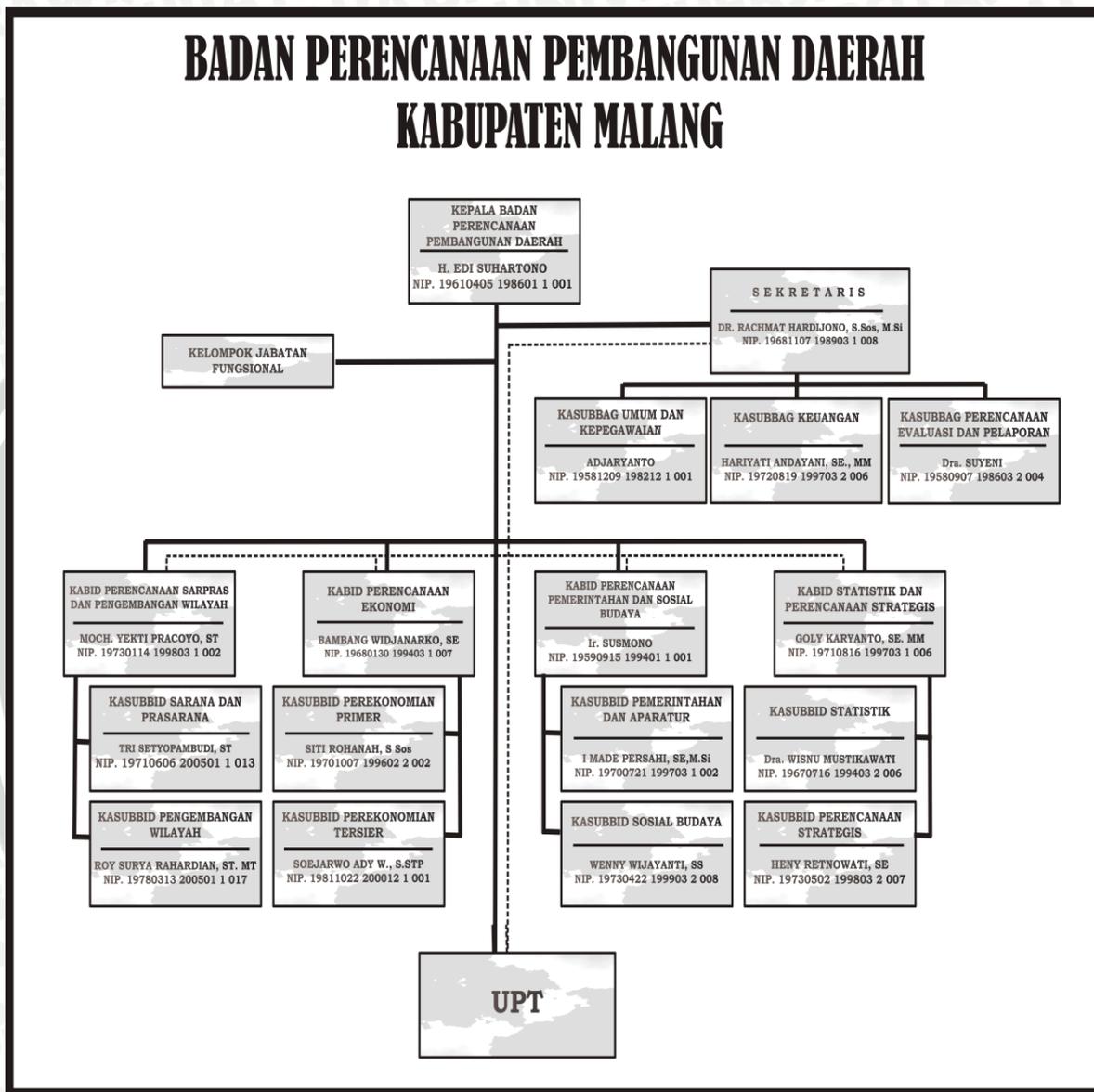
Dalam implementasi kebijakan pembangunan BAPPEDA mendapati tantangan kedepannya untuk menyelesaikan hambatan dan masalah yang masih terjadi.

1. Demokratisasi dan keterbukaan yang tidak sesuai dengan koridor hukum yang dilakukan oleh sebagian masyarakat.
2. Masih adanya sikap arogansi dan apriori pelaku birokrasi terhadap partisipasi publik.

3. Masih adanya pemahaman yang kurang terhadap makna desentralisasi maupun demokratisasi
4. Beragamnya tingkat pendidikan masyarakat yang tentunya mempengaruhi pola pikir dan pola tindak dari masyarakat itu sendiri.
5. Masih adanya tekanan-tekanan politik dalam pengambilan keputusan bidang perencanaan dan penganggaran sehingga mengganggu tahapan dan proses perencanaan pembangunan.
6. Adanya ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap berbagai tahapan/proses perencanaan pembangunan, yang dianggap hanya sebagai formalitas belaka.



**Bagan 4 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Malang**



B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat Kepanjen sebagai strategi pemerintah Kabupaten Malang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Strategi pada umumnya merupakan cara pemerintah untuk mengatasi permasalahan Daerah Kabupaten Malang serta memajukan Daerah Kabupaten Malang dengan meninjau kesejahteraan masyarakat khususnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat pasca dibangunnya infrastruktur. Seperti hasil wawancara dengan Bapak Bambang selaku Kabid Perencanaan ekonomi Bappeda Kabupaten Malang yang sebelumnya bertugas di Dinas perijinan Kabupaten Malang dan Bapak Yekti selaku Kabid sarpras Bappeda Kabupaten Malang yang sebelumnya bertugas di Dinas Bina Marga Kabupaten Malang.

“Kabupaten Malang membentuk pusat kegiatan berlatarbelakang terintegrasi yang mencakup seluruh Malang (Malang raya), strategi salah satunya pengembangan dan pemantapan perkotaan Kepanjen sebagai pusat kegiatan lokal. Kegiatan ini akan memacu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Kecamatan Kepanjen”
(Wawancara dengan Bapak Bambang Kabid Perencanaan ekonomi BAPPEDA ext staff Dinas Perijinan Kabupaten Malang)

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Yekti selaku Kabid sarpras Bappeda Kabupaten Malang yang sebelumnya bertugas di Dinas Bina Marga Kabupaten Malang sasaran umum (pembangunan

nasional) yang hendak dicapai dalam upaya pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan infrastruktur

“Ada 3 sasaran umum dalam pembangunan nasional, yang pertama meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat. Lalu yang kedua meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik melalui kerjasama dengan pihak badan usaha swasta. Yang terakhir adalah Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur komersial dengan mendorong peran aktif badan usaha swasta dalam penyediaannya. Bisa kita lihat infrastruktur adalah bagian vital dalam pembangunan ekonomi, untuk itu perlu kita implementasikan sebaik-baiknya terutama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi masyarakat” (**Wawancara dengan Bapak Bambang Kabid Perencanaan ekonomi BAPPEDA ext staff Dinas Perijinan Kabupaten Malang**)

Sedangkan sasaran utama pembangunan di Kabupaten Malang mengarah pada pengembangan infrastruktur dimana pembangunan infrastruktur diimplementasikan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi, pemerataan pembangunan, mempermudah mobilitas penduduk dan keseimbangan antar daerah, utamanya di bidang ekonomi. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur ditujukan untuk meningkatkan daya dukung dan kualitas Kabupaten Malang, meningkatkan aksesibilitas wilayah yang sedang dan belum berkembang di wilayah Kabupaten Malang. (**Paparan Kebijakan Pembangunan Kabupaten Malang 2010-2015**)

“Dalam penetapan arah pembangunan tentu tidak begitu saja dibuat arah kebijakannya. Arah pembangunan Kabupaten Malang dibuat berdasarkan fokus kebijakan pembangunan yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang. Arah pembangunan Kabupaten Malang tidak melulu dalam konteks infrastruktur namun juga

pemberdayagunaan sumberdaya manusia (kemampuan), mendorong kemajuan dan toleransi beragama, membangun sistem informasi, mendorong keamanan, membangun dan memelihara infrastruktur, meningkatkan aksesibilitas dan perencanaan tata ruang. Tentu semua arah pembangunan tersebut dapat mengarah mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kemajuan daerah”
(Wawancara dengan Bapak Bambang Kabid Perencanaan ekonomi BAPPEDA Kabupaten Malang)

Bappedda Kabupaten Malang berupaya menciptakan identitas daerah Kepanjen yaitu menjadikan Kepanjen layak sebagai ibu kota Kabupaten Malang dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, salah satu upayanya adalah pembangunan infrastruktur jalan lingkaran barat Kepanjen. Sebagai ibu kota Kabupaten Malang Kepanjen harus layak dan berkualitas, kelayakan tersebut dapat ditinjau dari pertumbuhan pembangunan ekonomi di Kepanjen. Mampukah Kepanjen menjadi ibu kota yang layak, yang mampu menjadi wadah masyarakat untuk membangun ekonomi? Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah pemerintah Kabupaten Malang untuk mewujudkan Kepanjen layak menjadi ibu kota Kabupaten Malang dengan fasilitas infrastruktur yang layak dan memadai atas kebutuhan masyarakat. Strategi pembangunan infrastruktur jalan lingkaran barat Kecamatan Kepanjen tujuan utamanya sebagai solusi permasalahan kepadatan di pusat kota, dengan adanya jalan lingkaran barat Kepanjen akan meredakan kepadatan dan kemacetan dipusat Kota Kepanjen dan merangsang pertumbuhan ekonomi baru di jalan lingkaran barat Kepanjen. Lokasi pembangunan jalan lingkaran barat

cukup jauh dari pusat Kota Kepanjen sehingga pembangunan jalan lingkaran Barat Kepanjen menjadi strategi yang tepat dalam memberikan solusi terhadap permasalahan kepadatan dan kemacetan di pusat Kepanjen. Selain itu lokasi pembangunan jalan lingkaran barat sangat strategis karena menghubungkan ke daerah-daerah terpencil di Kepanjen dan menjadi sarana jalan provinsi yang menghubungkan antar kota di Jawa Timur misalnya Malang, Blitar, Kediri, Tulingagung dan lain-lain. Kemudahan distribusi yang diberikan jalan lingkaran barat dapat menciptakan lapangan kerja baru dan menciptakan lapangan usaha baru. Tentu hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dapat diartikan jalan lingkaran barat menjadi keunggulan baru bagi Kecamatan Kepanjen yang semakin memantapkan kelayakannya menjadi ibu kota Kabupaten Malang.

(bappeda.malangkab.go.id/berita.html)

“Dari segi ekonomi, Kepanjen sempat mengalami keterlambatan atau berjalan lambat karena kegiatan ekonomi dan sarana transportasi terfokus di pusat kota akibatnya mengalami kepadatan di pusat kota hingga kemacetan pada pusat kota Kepanjen, kemudian kegiatan ekonomi berjalan lambat hingga masyarakat mengalami kejenuhan yang mengakibatkan masyarakat kurang bisa berkembang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Setelah banyaknya laporan dari masyarakat tentang permasalahan di pusat Kota Kepanjen dan Bappeda Kabupaten Malang *survey* serta memastikan fakta dilapangan, kami (Bappeda Kabupaten Malang) menyusun strategi untuk memecahkan masalah tersebut. Strategi yang kami (Bappeda Kabupaten Malang) buat sesuai dengan tema pembangunan Kabupaten Malang yang memfokuskan pada pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi daerah. Hingga ditetapkannya

pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat di bagian utara Kepanjen dan berujung pada bagian barat Kepanjen, sehingga pengguna jalan tidak harus melintasi pusat kota dimana pusat kota Kepanjen adalah pusat kegiatan ekonomi seperti perdagangan (*market*). Perlahan jalan lingkar barat memecahkan permasalahan kepadatan dan kemacetan pada pusat kota Kepanjen, dan lambat laun memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat karena kemudahan distribusi ke daerah semakin mudah di akses” (**Wawancara dengan Bapak Bambang Kabid Perencanaan ekonomi BAPPEDA ext staff Dinas Perijinan Kabupaten Malang**)

Penetapan pembangunan jalan lingkar barat sebagai strategi pemerintah Kabupaten Malang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat disesuaikan dengan strategi pembangunan daerah dimana ada 4 point, diantaranya adalah Strategi pembangunan daerah :

- a. Menyusun perencanaan pembangunan yang partisipatif terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Tahunan sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan agar seluruh potensi dapat sinergi dan harmonis.
- b. Meningkatkan Kapasitas keuangan daerah meliputi pendapatan yang optimal dan belanja yang efektif dan efisien.
- c. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan profesionalisme aparatur.
- d. Mengembangkan kemitraan.

(Paparan Kebijakan Pembangunan Kabupaten Malang 2010-2015)

“Pemerintah Kabupaten Malang menyusun perencanaan pembangunan yang partisipatif terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka menengah 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah tahunan sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan agar seluruh potensi dapat sinergi dan harmonis. Kami (Bappeda Kabupaten Malang) melaksanakan kebijakan pembangunan tersebut salah satunya adalah pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat sebagai upaya pembangunan fasilitas dan sarana jalan yang merata di daerah Kepanjen dan memberikan kesempatan pada daerah untuk membangun ekonomi serta kegiatan ekonomi tidak terfokus di pusat kota. **Wawancara dengan Bapak Yekti selaku Kabid sarpras Bappeda Kabupaten Malang**

Setiap pembangunan diperlukan strategi untuk mencapai tujuan pembangunan. Seperti halnya pembangunan daerah Kabupaten Malang menyusun dan menetapkan strategi guna mencapai tujuan pembangunan daerah di Kabupaten Malang diantaranya adalah :

- a. Mendukung Koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar pelaku pembangunan, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi SKPD;
- c. Menjamin Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan fungsi Rencana Tata Ruang Daerah.

(Paparan Kebijakan Pembangunan Kabupaten Malang 2010-2015)

“Tujuan utama dibangunnya infrastruktur jalibar adalah meredam kemacetan dipusat Kota Kepanjen, mengalihkan fokus masyarakat agar kegiatan masyarakat tidak terfokus dipusat Kota Kepanjen, dan mempermudah distribusi. Distribusi disini diartikan tidak hanya untuk barang dan jasa namun juga mempermudah wisatawan untuk menuju wisata di Kabupaten Malang khususnya yang melintasi Kecamatan Kepanjen seperti pantai, gunung kawi, waduk, dan lain-lain. Secara tidak langsung dan berjalannya waktu tertentu pembangunan ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat”
(Wawancara dengan Bapak Yekti Pracoyo, ST. Kabid sarpras BAPPEDA ext staff Dinas Bina Marga)

Ada 7 arahan strategi pembangunan yang tertulis dalam RPJPD periode 2005-2020 tahapan pembangunan ke-2 (2011-2015) diantara 7 arahan strategi yang sesuai dengan penelitian ini adalah Mengembangkan perekonomian berbasis pertanian, pertambangan, kelautan, industri, perdagangan dan pariwisata yang didukung infrastruktur yang memadai. **(RPJPD periode 2005-2020 tahapan pembangunan ke-2 2011-2015)**

“Dalam upaya meningkatkan kapasitas keuangan daerah meliputi pendapatan yang optimal dan belanja yang efektif dan efisien. Bappeda menyusun strategi pengaturan tata ruang yang baik di Kepanjen, seperti memperhatikan titik daerah yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Bappeda Kabupaten Malang harus membangun fasilitas yang memadai guna mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi masyarakat. Memperhatikan daerah layak kawasan pendidikan, daerah layak untuk kesehatan, dan daerah layak untuk hiburan misalnya pusat olahraga. Semua aspek tersebut harus dibangun secara merata dan berkualitas agar pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial berjalan bersama-sama.” **(Wawancara dengan Bapak Yekti Pracoyo, ST. Kabid sarpras BAPPEDA ext staff Dinas Bina Marga)**

Adapun strategi pemerintah Kabupaten Malang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat *pasca* pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat Kepanjen dengan strategi membangun pemukiman dan perumahan di wilayah jalan lingkar barat Kepanjen guna memancing pertumbuhan ekonomi untuk berjalan dan berkembang di wilayah tersebut.

“Pembangunan jalan lingkar barat tidak hanya soal jalan yang bertujuan mempermudah distribusi dan meredam kepadatan di pusat Kota. Di kanan kiri jalan lingkar barat tidak hanya ditujukan kepada pelaku usaha untuk membangun usaha yang menunjang pertumbuhan ekonomi pelaku usaha dan membuka lapangan kerja. Disana (jalan lingkar barat) juga terdapat perumahan masyarakat. Dari dinas perijinan menandatangani didirikannya atau dibangunnya perumahan disana (jalan lingkar barat) karena jalan lingkar barat yang sangat strategis akan mempermudah kegiatan masyarakat” (**wawancara dengan Bapak Bambang Kabid perencanaan ekonomi BAPPEDA ext staff Dinas Perijinan Kabupaten Malang**)

Pemerintah kabupaten Malang berupaya menciptakan lingkungan yang nyaman dan tenang di wilayah jalan lingkar barat Kepanjen, untuk itu disediakan infrastruktur berupa air bersih, listrik, lahan parkir, taman dan area olahraga.

“Di sepanjang jalan lingkar barat sudah dibangun taman dan tempat kegiatan olahraga karena disana (jalan lingkar barat) tidak hanya ada bangunan usaha tetapi juga perumahan masyarakat, tentu masyarakat akan lebih nyaman jika ada fasilitas taman dan tempat olahraga” (**wawancara dengan Bapak Bambang Kabid perencanaan ekonomi BAPPEDA ext staff Dinas Perijinan Kabupaten Malang**)

Pembangunan jalan lingkar barat telah membuktikan fungsinya tidak hanya sebagai sarana jalan untuk mempermudah distribusi, pembangunan jalan lingkar barat yang dibangun diatas

lahan perkebunan masyarakat ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan karena banyak terciptanya usaha baru di sepanjang jalan lingkar barat. Setelah membangun infrastruktur jalan pemerintah tidak hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar jalan lingkar barat, pemerintah mulai memperbaiki sistem pariwisata di Kabupaten Malang khususnya yang melintasi Kecamatan Kepanjen, dengan demikian biasa menarik minat wisatawan untuk berkunjung, masyarakat sekitar wisata juga mendapat keuntungan dari program kebijakan tersebut, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat tidak hanya di Kepanjen. (bappeda.malangkab.go.id/berita.html)

Fungsi jalan lingkar barat guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat mulai terlaksana dari berjalannya program pemerintah menciptakan dunia usaha bagi masyarakat sekitar jalan lingkar barat. Peluang usaha tersebut diperuntukkan untuk masyarakat Kepanjen khususnya bagi pemilik lahan perkebunan jalan lingkar barat, maka tidak semua pihak dapat mendirikan usaha di jalan lingkar barat Kepanjen. Memacu pertumbuhan sektor andalan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan dan jasa-jasa. Serta mendorong pertumbuhan sektor potensi seperti pariwisata, pertambangan dan jasa konstruksi/bangunan dengan mengarusutamakan peran usaha mikro kecil menengah dan koperasi dan pengentasan kemiskinan,

dan mengendalikan arahan perencanaan tata ruang, selektif dalam pemberian ijin industri yang rawan pencemaran, penghutan/penghijauan lahan kritis dan pembuatan mitigasi bencana untuk antisipasi dini. (**Kebijakan umum RPJMD 2010-2015**)

“setiap bangunan usaha di sepanjang jalan lingkar barat tidak serta merta dengan mudah mendapatkan ijin dari Dinas Perijinan Kabupaten Malang, pada dasarnya selama ini pelaku dan pemilik modal usaha di jalan lingkar barat tidak memiliki ijin resmi bangunan usaha dari pemerintah, pemilik usaha tersebut adalah mereka (masyarakat) yang memiliki lahan secara resmi/tersertifikasi disepanjang jalan lingkar barat. Permasalahn ini disebabkan karena jalan lingkar barat dibangun diatas lahan perkebunan dimana perkebunan tersebut adalah lahan pengembangan pangan Kabupaten Malang, jika perijinan diberikan kemudahan begitu saja tentu akan mengalihfungsikan perkebunan yang masih aktif menjadi lahan usaha, oleh sebab itu diharapkan dengan tidak diberikan ijin pendirian bangunan usaha lahan perkebunan yang masih aktif tidak beralih fungsi menjadi dunia usaha. Agar berjalan bersama sama, masyarakat mendapat keuntungan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi mereka dan lingkungan pengembangan pangan tetap terjaga” (**wawancara dengan Bapak Bambang Kabid perencanaan ekonomi BAPPEDA ext staff Dinas Perijinan Kabupaten Malang**)

“Perizinan tidak diberlakukan kepada pihak asing manapun untuk mendirikan usaha atau perusahaan disepanjang jalan lingkar barat, selain akan berdampak pada lingkungan seperti alihfungsi lahan pengembangan pangan Kabupaten Malang tentu akan mengancam para usaha kecil yang dibangun masyarakat, oleh sebab itu pendiri usaha hanya masyarakat yang memili lahan secara resmi disepanjang jalan lingkar barat” (**wawancara dengan Bapak Bambang Kabid perencanaan ekonomi BAPPEDA ext staff Dinas Perijinan Kabupaten Malang**).

Membangun sistem informasi dan komunikasi publik,
Sosialisasi dan deseminasi produk hukum serta kunjungan ke desa-

desa dan desa-desa lain dengan katagori desa tertinggal dalam rangka dialog pembangunan. **(Kebijakan umum RPJMD 2010-2015)**

“Dalam hal pembangunan ekonomi Bappeda bagian perencanaan ekonomi ada andil besar dalam implementasinya, termasuk tentang pembangunan dunia usaha guna mendorong pembangunan ekonomi daerah. Bappeda bagian perencanaan ekonomi mensosialisasikan dan mengajak masyarakat (pelaku usaha di sepanjang jalan jalibar) bahwa setiap pelaku usaha di jalan lingkaran barat dapat membuat komunitas khusus mereka (pelaku usaha) seperti simpan pinjam untuk modal usaha yang dikelola oleh Dinkop Kabupaten Malang. Kegiatan tersebut selain berfungsi membantu pelaku usaha, juga dapat dijadikan ajang mensosialisasikan setiap program kebijakan Bappeda Kabupaten Malang tentang pembangunan ekonomi dengan akses pembangunan usaha kecil, sehingga para pelaku usaha bisa meng-*update* strategi usaha mereka agar berjalan sesuai dengan rencana kebijakan pembangunan ekonomi dan tentu memberikan dampak meningkatnya pertumbuhan ekonomi. **(Wawancara dengan Bapak Bambang Kabid Perencanaan ekonomi BAPPEDA ext staff Dinas Perijinan Kabupaten Malang)**

“Setiap masyarakat (pendiri usaha) berhak mendapatkan informasi mengenai dunia usaha dan kebijakan pemerintah Kabupaten Malang tentang dunia usaha, agar masyarakat mendapat arahan dalam pembangunan dunia usaha. Dinkop Kabupaten Malang mensosialisasikan serta mengarahkan arah kebijakan pembangunan dunia usaha kecil bagi masyarakat Kecamatan Kepanjen” **(Wawancara dengan Bapak Bambang Kabid Perencanaan ekonomi BAPPEDA ext staff Dinas Perijinan Kabupaten Malang)**

“Layanan dari Bappeda bagian perencanaan ekonomi Kabupaten Malang untuk masyarakat pendiri usaha bukan hanya arahan pendirian usaha, tetapi juga sebagai *wadah* konsultasi bagi pengembang usaha. Salah satu bentuk *wadah* konsultasi bagi pengembang usaha adalah perkumpulan komunitas pengembang usaha di jalan lingkaran barat secara rutin, dengan kegiatan tersebut Bappeda bagian perencanaan ekonomi Kabupaten Malang mengarahkan serta

memberikan solusi terhadap masalah yang tengah dihadapi masyarakat dalam pembangunan dunia usaha guna meningkatkan ekonomi masyarakat” (**Wawancara dengan Bapak Bambang Kabid Perencanaan ekonomi BAPPEDA ext staff Dinas Perijinan Kabupaten Malang**)

Pemerintah Kabupaten membuka “pintu” untuk semua masyarakat (mahasiswa) untuk melakukan kajian dan penelitian disetiap kegiatan kebijakan pemerintah, karena pemerintah kabupaten Malang mengimplementasikan kebijakannya secara transparan dan terbuka kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Malang. Kajian dan penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan masukan atau saran bagi kinerja pemerintah Kabupaten Malang agar semakin baik dalam pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pencapaian strategi pembangunan Kabupaten Malang adalah pengembangan sumberdaya manusia, salah satu upaya mencapai sasaran atas strategi pengembangan sumberdaya manusia.

“Bappeda Kabupaten Malang melaksanakan pembangunan infrastruktur guna mempermudah distribusi dan meningkatkan kemudahan aksesibilitas masyarakat sehingga masyarakat dapat berkembang.” (**Wawancara dengan Bapak Yekti Pracoyo, ST. Kabid sarpras BAPPEDA ext Dinas Bina Marga**)

“Strategi pembangunan daerah Kabupaten Malang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dan didasarkan pada pemilihan strategi dan program

serta kegiatan yang tercantum di dalam dokumen perencanaan yang ada dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia. Mengintegrasikan rencana tata ruang dan rencana pembangunan daerah dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Kabupaten Malang sesuai dinamika perkembangan daerah Kabupaten Malang.” (**Wawancara dengan Bapak Yekti Pracoyo, ST. Kabid sarpras BAPPEDA ext Dinas Bina Marga**)

Dalam mencapai pembangunan infrastruktur yang memadahi pemerintah Kabupaten Malang khususnya Bagian Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang membuat rumusan kebijakan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Adapun RPJMD tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah tahun 2010-2015. Tema Kabupaten Malang dalam Pembangunan adalah **Pemantapan Pembangunan Infrastruktur Dalam Upaya Peningkatan Pusat-Pusat Ekonomi dan Pariwisata. Daya Saing Daerah Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat.** Tema ini menjadi fokus utama pemerintah Kabupaten Malang dalam pembangunan di Kabupaten Malang khususnya membangun infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. (**RPJMD Kabupaten Malang 2010-2015**)

Setiap kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan harus disusun pula misi pembangunan, fokus pembangunan dan prioritas pembangunan, berikut adalah pemaparan tentang misi,

fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Malang yang sesuai dengan penelitian ini dari nara sumber Bappeda Kabupaten Malang.

“Bappeda Kabupaten Malang sangat serius dalam pembangunan guna kepentingan kesatuan nasional ataupun kemajuan daerah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Malang menyusun misi Pembangunan Daerah Kabupaten Malang yang berisi beberapa *point*, diantara *point* yang sesuai dengan pertanyaan mengenai pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi adalah mewujudkan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pertanian dan pemberdayaan masyarakat perdesaan.” (Wawancara dengan Bapak Yekti Pracoyo, ST. Kabid sarpras BAPPEDA ext Dinas Bina Marga)

Untuk mencapai pembangunan yang sesuai dengan paparan diatas pemerintah Kabupaten Malang menetapkan prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Malang periode 2010-2015. Salah satu Prioritas utama yang sesuai dengan ulasan ini adalah **penyediaan infrastruktur yang memadai**, terutama pembangunan baru dan pemantapan jalan/jembatan untuk mendukung aktivitas perekonomian, pariwisata dan dusun terpencil. (RPJMD Kabupaten Malang 2010-1015)

Selain itu Bappeda juga melaksanakan prioritas pembangunan khusus ditahun 2015 yaitu “Bappeda tidak hanya mengimplementasikan RPJMD 2010-2015 tetapi juga memfokuskan prioritas pembangunan 2015, peningkatan infrastruktur (kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan, perumahan dan permukiman, energi terbarukan dan listrik perdesaan) untuk mendukung perekonomian dan pariwisata termasuk sarana dan prasarana ekowisata dan pasar-pasar daerah, dan Memacu ekonomi andalan (pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata) dan pengembangan produk unggulan dengan mengarus utamakan Koperasi dan UMKM.” (Wawancara dengan Bapak Yekti Pracoyo, ST. Kabid sarpras BAPPEDA ext Dinas Bina Marga)

Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa pemerintah Kabupaten Malang merancang misi, fokus dan prioritas pembangunan. Fokus pembangunan Kabupaten Malang adalah **Peningkatan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi** untuk mendukung bidang unggulan/andalan dan pariwisata. **Memacu ekonomi andalan, terutama dikaitkan dengan pertumbuhan dan percepatan pemerataan ekonomi.** Penanggulangan Kemiskinan, dalam rangka mendorong pertumbuhan yang mengarah pada rakyat miskin dan peningkatan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar serta perluasan cakupan program pembangunan berbasis masyarakat dan pengurangan jumlah desa tertinggal. Peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Dan fokus terakhir adalah daya saing daerah terutama layanan perizinan usaha, jaminan keamanan yang dikaitkan dengan kenyamanan wisatawan dan kemudahan investasi. **(RPJMD Kabupaten Malang 2010-1015)**

“Dalam penetapan kebijakan dan program kerja, tentu Pemerintah menetapkan dan menyusun strategi pembangunan agar tepat sarannya, strategi ini tentu saja yang dapat di *update* sesuai dengan isue yang terjadi di Masyarakat. Beberapa strategisnya adalah pengembangan dan pemantapan Perkotaan Kepanjen sebagai pusat kegiatan lokal. Hal ini akan memacu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Kepanjen” **(Wawancara dengan Bapak**

**Bambang Kabid Perencanaan ekonomi BAPPEDA ext
staff Dinas perijinan Kabupaten Malang)**

Penyusunan, penetapan fokus dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Malang dibuat berdasarkan masalah dan unggulan Kabupaten Malang dan disesuaikan dengan prinsip pembangunan daerah dan nasional.

2. Dampak pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Kecamatan Kepanjen

Pembangunan infrastruktur di Kecamatan Kepanjen tidak hanya menjadi suatu program kebijakan yang dibuat Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Malang berupaya melaksanakan program kebijakan pembangunan tersebut demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Setiap pembangunan pasti tercipta dampak positif maupun negatif. Dampak dalam pembangunan diantaranya adalah dampak ekonomi, sosial dan lingkungan. Salah satu dampak yang akan dikulas dalam penelitian ini adalah dampak ekonomi masyarakat Kecamatan Kepanjen. Pelaksanaan pembangunan sudah melalui perencanaan yang matang yang didalamnya diharapkan memberikan dampak positif bagi daerah dan perekonomian masyarakat pada khususnya.

“pembangunan jalan lingkaran barat (infrastruktur) dampak utama yang langsung dirasakan dan didapat tentu kemacetan dan kepadatan dipusat kota kepanjen berkurang karena masyarakat menggunakan jalan lingkaran barat yang telah dibangun dan

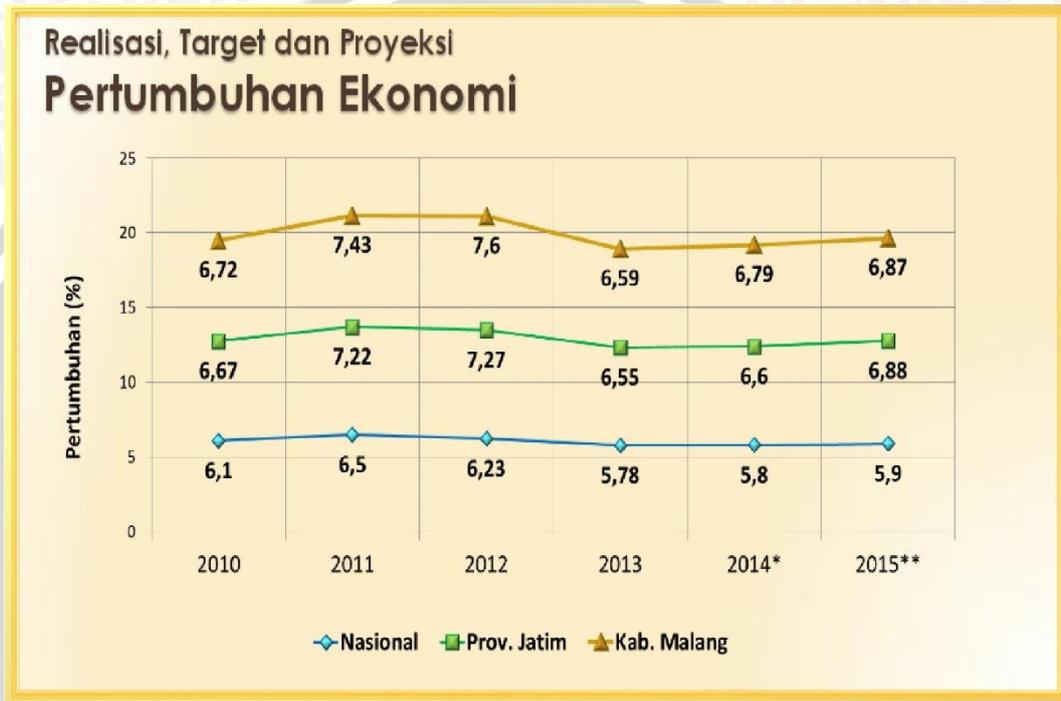
diperuntungkan untuk kemudahan aksesibilitas mereka (masyarakat), agar waktu mereka (masyarakat) tidak terbuang sia-sia karena kemacetan di pusat Kepanjen” (**Wawancara dengan Bapak Yekti Pracoyo, ST. Kabid sarpras BAPPEDA ext Dinas Bina Marga**)

Infrastruktur akan menciptakan kesempatan kerja dan usaha, oleh karena itu keberadaan infrastruktur yang baik akan dapat mendorong terciptanya stabilitas berbagai aspek dalam masyarakat guna menunjang laju pembangunan nasional. Oleh sebab itu Pemerintah berkomitmen untuk mengutamakan pembangunan infrastruktur mengingat peran dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi memberikan dampak besar. Keberadaan infrastruktur telah terbukti berperan sebagai instrumen bagi pengurangan kemiskinan, pembuka daerah terisolasi, dan mempersempit kesenjangan antar wilayah. Dengan demikian, investasi infrastruktur baik dari pemerintah maupun swasta dan masyarakat perlu terus didorong guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor riil, penyerapan tenaga kerja guna mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta menumbuhkan investasi sektor lainnya. (bappeda.malangkab.go.id/berita.html)

“Dari segi ekonomi, setelah pembangunan jalan lingkar barat (infrastruktur) tidak serta merta langsung memberikan dampak peningkatan ekonomi kepada masyarakat. Untuk pendirian usaha ataupun masyarakat yang tidak tinggal di sekitar jalan lingkar barat tentu membutuhkan proses dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi. Namun lambat laun dengan adanya infrastruktur yang memadai ini (jalan lingkar barat) akan memudahkan aksesibilitas, memperlancar distribusi, dan pengurangan desa tertinggal

tentu akan berdampak pada sektor ekonomi masyarakat”
 (Wawancara dengan Bapak Bambang Kabid
 Perencanaan ekonomi BAPPEDA ext staff Dinas
 perijinan Kabupaten Malang)

Tabel 3 Realisasi, target dan proyeksi pertumbuhan ekonomi



Sumber : RKPD Kabupaten Malang 2015

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi, baik barang maupun penumpang. Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta untuk meningkatkan daya saing global. (bappeda.malangkab.go.id/berita.html)

“Infrastruktur sangat diperlukan karena pembangunan infrastruktur adalah penunjang distribusi, namun pembangunan jalan tidak bisa begitu saja dengan cepat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan waktu tertentu distribusi yang terpenuhi tentu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bisa dilihat tidak hanya di Kabupaten Malang khususnya Kepanjen, pembangunan infrastruktur yang memadai akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan pada umumnya mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi” (Wawancara dengan Bapak Yekti Pracoyo, ST. Kabid sarpras BAPPEDA ext Dinas Bina Marga)

Program pembangunan Kabupaten Malang yang telah diimplementasikan akan menumbuhkan perkembangan ekonomi seperti tujuan lain pembangunan infrastruktur selain meningkatkan aksesibilitas masyarakat di wilayah Kabupaten Malang yang sedang berkembang.

Tabel 3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malang

NO	URAIAN	SATUAN	2010	2011*)	2012*)	2013*)	2014**)
1	Pertumbuhan Ekonomi	Porsen	6,25	7,17	7,44	6,65	6,09
2	Inflasi	Porsen	6,43	6,05	6,35	7,73	8,28

Sumber : BPS Kabupaten Malang

Ket : *) Angka Diperbaiki

***) Angka sementara

3. Faktor pendukung dan penghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat Kecamatan Kepanjen *pasca* pembangunan infrastruktur.

a. Faktor Pendukung

Membangun daerah Kabupaten Malang tentu tidak akan berjalan dan mencapai tujuan dalam hal ini adalah mencapai kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Tanpa adanya pendukung yang kuat dan berpengaruh dalam pembangunan daerah. Seperti halnya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Malang (Kecamatan Kepanjen) guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat ada faktor-faktor pendukung yang mencapai penetapan pembangunan infrastruktur.

Setiap pembangunan pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk membangun infrastruktur di Kepanjen, namun tetap dengan kebijakan Pemerintah dan dikendalikan pemerintah. Keuntungan atau dampak positif dalam pembangunan infrastruktur tidak hanya dirasakan pemerintah namun juga masyarakat.

“Setiap pembangunan daerah Kabupaten Malang terutama pembangunan infrastruktur seperti jalan lingkar barat, kita sebagai pihak pemerintah memberikan kesempatan bagi pihak swasta untuk bekerja sama dengan kami (pemerintah) asalkan dalam pembangunan sesuai dengan perjanjian atau kebijakan yang telah kami (pemerintah) tetapkan”
(Wawancara dengan Bapak Yekti Pracoyo, ST. Kabid sarpras BAPPEDA ext Dinas Bina Marga)

Dalam susunan kebijakan pembangunan yang pemerintah buat ada beberapa strategi guna mencapai pembangunan yang sesuai dengan karakter Kabupaten Malang khususnya Kecamatan Kepanjen, yang bertujuan mensejahterakan masyarakat yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat BAPPEDA Kabupaten Malang tidak bekerja “seorang diri”. Pembangunan dilaksanakan berdasarkan permasalahan yang terjadi di Kepanjen seperti meredam kepadatan kemacetan dipusat Kota Kepanjen, selanjutnya dengan dibangunnya infrastruktur tentu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat Kecamatan Kepanjen. Instansi yang terkait dalam pembangunan jalan lingkar barat diantaranya adalah Dinas Bina Marga, Dinas Koperasi sebagai jembatan antara masyarakat (pelaku usaha di sekitar jalan lingkar barat) dengan pemerintah, dan ada beberapa Dinas yang terkait dalam pembangunan ini, selain itu pemerintah mensosialisasikan dan berdiskusi dengan kelompok masyarakat khususnya masyarakat yang akan mendapat dampak langsung dalam pembangunan jalan lingkar barat.

Pemerintah Kabupaten Malang membangun jalan lingkar barat diatas lahan perkebunan kawasan pengembangan pangan tidak serta merta ingin merubah budaya masyarakat dari petani menjadi pelaku usaha. Selain kawasan yang berpotensi dan strategis untuk

dibangun jalan alternatif Pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berprofesi sebagai petani mempelajari dunia usaha, pemerintah mensosialisasikan point baik dan buruknya sebagai petani dan sebagai pelaku usaha. Selain itu pemerintah mendampingi masyarakat (petani/pemilik lahan) untuk mempelajari dunia usaha, karena pembangunan dilakukan tidak untuk mempersulit perekonomian sebagian masyarakat atau petani yang sudah puluhan tahun bekerja danberpenghasilan dari ladang perkebunan.

“Dalam pembebasan lahan pemerintah berupaya mensosialisasikan dengan cara sebaik-baiknya kepada masyarakat yang bersangkutan (petani/pemilik lahan). Bahwa dikawasan tersebut (lahan perkebunan masyarakat) akan dibangun infrastruktur jalan alternatif yang fungsinya tidak hanya meredam kemacetan dipusat Kepanjen tetapi diharapkan akan memberikan dampak positif bagi masyarakat seperti memudahkan aksesibilitas masyarakat dari Kota ke daerah terpencil dan sebaliknya sehingga mengurangi permasalahan daerah tertinggal, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat yang terlibat (pemilik lahan)”
(Wawancara dengan Bapak Yekti Pracoyo, ST. Kabid sarpras BAPPEDA ext Dinas Bina Marga)

“Dari dinas perizinan belum mengizinkan pendirian usaha terutama usaha berskala besar, kami (pemerintah) menegetahui bahwa disepanjang jalan lingkaran barat banyak didirikan bangunan sebagai usaha masyarakat, mereka (masyarakat) yang mendirikan usaha disanan (jalan lingkaran barat) adalah masyarakat yang memiliki lahan disepanjang jalan lingkaran barat, atau dapat dikatakan lain mereka (masyarakat) mendirikan usaha diatas lahan mereka sendiri. Kami (pemerintah) tidak menyalahkan karena kegiatan tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, selama usaha tersebut usaha masyarakat bukan berskala besar. Kami (pemerintah) dari dinas koperasi

berkoordinasi dengan para pelaku usaha. Jalan lingkaran barat adalah jalan alternatif dimana pengguna jalan akan menghindari pusat Kota yang padat dan macet, namun demikian Dinas koperasi mensosialisasi usaha-usaha apa saja yang boleh didirikan di jalan lingkaran barat agar pelaku usaha di pusat Kota Kepanjen tidak mengalami kerugian pasca pengguna jalan menggunakan jalan alternatif tersebut. Hal ini dilakukan agar berjalan seimbang terutama perekonomian masyarakat” (**Wawancara dengan Bapak Bambang Kabid Perencanaan ekonomi BAPPEDA ext staff Dinas perijinan Kabupaten Malang**)

Kepanjen sebagai salah satu wilayah pengembangan Daerah Kabupaten Malang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010. Kepanjen menjadi Ibu Kota Kabupaten Malang memiliki potensi pengembangan sub sektor perdagangan dan jasa skala Kabupaten, pertanian, peternakan, perikanan darat, industri pariwisata kehutanan serta pariwisata pligrim dengan prioritas pengembangan infrastruktur 1) jalan lingkaran timur dan penyelesaian jalan lingkaran barat Kepanjen, 2) peningkatan akses menuju Gunung Kawi dan wisata Ngliyep, 3) jalan penghubung antar sentra ekonomi di perdesaan dengan pusat kecamatan, 4) percepatan penyelesaian jalan lingkaran selatan, 5) peningkatan sediaan air bersih pada kawasan rawan kekeringan dan pengembangan pemukiman. Hal-hal tersebutlah yang meenjadi point pendukung untuk dibangunnya infrastruktur seperti jalan lingkaran barat di Kecamatan Kepanjen (**RPJMD Kabupaten Malang periode 2015-2020**)

“Jalibar bisa dikatakan jalur alternatif yang sangat membantu dan meredam kemacetan di pusat Kota Kepanjen dan jalur antar Kota, fungsinya yang kompleks membuat banyak masyarakat yang mencoba peruntungan meningkatkan perekonomian mereka dengan berjualan di sepanjang jalibar namun pemerintah tidak dapat memberikan ijin penderian bangunan untuk usaha dengan begitu saja karena kawasan jalibar adalah kawasan pengembangan pangan. Permasalahan ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah bagaimana penyusunan dan penetapan kebijakan selanjutnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat namun tetap mempertahankan kawasan yang berpotensi menghasilkan hasil pangan” (**Wawancara dengan Pak Bambang Kabid Perencanaan Ekonomi BAPPEDA ext bidang Perijinan**)

Setelah pembangunan infrastruktur jalan lingkaran memberikan penyelesaian permasalahan kepadatan pusat Kota Kepanjen, dengan berjalannya waktu jalan lingkaran memberikan peluang bagi perkembangan pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah Kepanjen lainnya. Karena dengan akses sarana jalan baru yaitu jalan lingkaran banyak pengguna jalan yang memanfaatkan jalan lingkaran tersebut sehingga masyarakat sekitar jalan lingkaran berpeluang mendirikan usaha untuk memenuhi kebutuhan pengguna jalan, hal tersebut tentu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Pembangunan infrastruktur di Kecamatan Kepanjen diperuntukkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kepanjen terus berbenah diri agar layak menjadi sebagai Ibukota Kabupaten Malang, Kepanjen sangat berpotensi karena Kepanjen adalah “jembatan” untuk aksesibilitas masyarakat ke pariwisata Kabupaten Malang yang melalui Kecamatan Kepanjen misalnya Gunung Kawi, Pantai Ngliyep, Bendungan Sutami dan juga menuju Blitar. Ditinjau betapa pentingnya infrastruktur harus terus

dikembangkan dan di bangun di Kepanjen karena dengan infrastruktur yang memadai, semakin optimal mempermudah aksesibilitas masyarakat, tentu akan memberikan dampak positif dan menjadi faktor pendukung untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat Kepanjen.”
(Wawancara dengan Bapak Yekti Pracoyo, ST. Kabid sarpras BAPPEDA ext Dinas Bina Marga)

Faktor penunjang atau pendukung pembangunan daerah Kabupaten Malang tidak hanya peran pemerintah dalam pembangunan daerah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Penunjang pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan sebagai alat pertumbuhan ekonomi.

“Dibangun jalan lingkaran barat sebagai alternatif di Kepanjen karena Kepanjen sangat berpotensi dari segi pertanian, peternakan, perikanan darat, industri pariwisata kehutanan serta pariwisata pligrim dengan prioritas pengembangan infrastruktur. Dapat dipastikan Kepanjen adalah “jembatan” untuk mempermudah distribusi dan aksesibilitas menuju banyak kawasan di Kabupaten Malang dan sekitar Malang Raya. Selain itu Kepanjen yang memiliki potensi sedemikian rupa, Kepanjen masih memiliki lahan luas untuk dibangun infrastruktur yang gunanya untuk mensejahterakan masyarakat”
(Wawancara dengan Bapak Yekti Pracoyo, ST. Kabid sarpras BAPPEDA ext Dinas Bina Marga)

Dengan adanya pembangunan infrastruktur akan membuka lapangan kerja, membuka peluang usaha baru, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah berbondong-bondong membangun daerahnya dari segala aspek yang dapat mendorong meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Seperti halnya

pemerintah Kabupaten Malang, tujuan membangun infrastruktur sudah sangat jelas yaitu, mempermudah distribusi, mempermudah aksesibilitas, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari segi sosial dan ekonomi serta mensejahterakan masyarakat.

Kecamatan Kepanjaen yang berpotensi menjadi ibukota Kabupaten Malang membuat Pemerintah optimis untuk melaksanakan kebijakan pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur. Lahan yang memadai dan letak Kepanjen yang strategis menjadi faktor pendukung untuk dilaksanakannya pembangunan dari segala aspek seperti kesehatan, pendidikan, pasar, dan ketersediaan infrastruktur yang memadai sehingga dapat mensejahterakan masyarakat.

b. Faktor Penghambat

Faktor pendukung tak menjadikan para aparatur langsung berpuas diri dalam membangun infrastruktur dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kepanjen, karena adapun hambatan yang dialami ketika pembangunan infrastruktur di Kecamatan Kepanjen.

“Sebelum ditetapkannya Rencana pembangunan menengah Daerah Kabupaten Malang tahun 2010-2015 yang menekankan pada pemantapan pembangunan infrastruktur dalam upaya peningkatan pusat-pusat ekonomi dan pariwisata. Kabupaten Malang seperti daerah-daerah lain di Indonesia, banyak daerah di Kabupaten Malang termasuk

Kepanjen terdapat daerah-daerah tertinggal bahkan daerah-daerah yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi tidak tersentuh oleh pembangunan dan akibatnya daerah tersebut tidak berfungsi optimal terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, padahal sudah diketahui bahwa daerah Kepanjen sangat berpotensi untuk mensejahterakan masyarakat. Hal tersebut karena ketimpangan pembangunan di daerah” **(Wawancara dengan Bapak Bambang Kabid Perencanaan ekonomi BAPPEDA ext staff Dinas Perijinan Kabupaten Malang)**

Pembangunan di Kabupaten Malang mengalami permasalahan fokus pembangunan terpusat pada kota atau pembangunan belum merata. Hal tersebut diakibatkan oleh sulitnya daerah-daerah terpencil untuk dijangkau karena minimnya infrastruktur. **(Laporan Pembangunan 2005-2010)**

“Tidak meratanya pembangunan didaerah menjadikan pihak-pihak yang berwenang dan pelaksana pembangunan kurang memperhatikan daerah yang berpotensi untuk di bangun sehingga banyak daerah Kabupaten Malang yang harus di bangun khususnya infrastruktur agar memudahkan aksesibilitas ke daerah tertinggal dan dapat dilaksanakannya pembangunan didaerah tersebut.” **(Wawancara dengan Bapak Yekti Pracoyo, ST. Kabid sarpras BAPPEDA ext Dinas Bina Marga)**

Rendahnya hasil produksi pada daerah-daerah terpencil di Kabupaten diakibatkan kurang meratanya pembangunan di Kabupaten Malang terutama dalam bidang infrastruktur jalan. Hal tersebut juga menghambat perkembangan masyarakat atau dengan kata lain sumber daya manusia yang rendah. **(Laporan pembangunan 2005-2010)**

“Perhatian atau fokus pemerintah yang memfokuskan pada daerah-daerah pusat atau yang sudah berkembang menjadikan daerah terpencil di Kabupaten Malang tidak meratanya dalam pembangunan yang berakibat pada faktor produksi rendah, yang dimaksud produksi yang rendah disini adalah sumber daya manusia kurang berpotensi untuk melaju ke daerah yang berkembang, sehingga mereka berkemampuan atau berkualitas rendah dan tidak mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka (masyarakat).”
(Wawancara dengan Bapak Yekti Pracoyo, ST. Kabid sarpras BAPPEDA ext Dinas Bina Marga)

Sumberdaya manusia yang rendah mengakibatkan kurang optimalnya fungsi dari sumberdaya alam Kabupaten Malang yang berlimpah. **(Laporan pembangunan 2005-2010)**

“Sumber daya alam di Kabupaten Malang dapat dikategorikan melimpah namun kurangnya meratanya pembangunan mengakibatkan kurang optimalnya sumber daya manusia yang berpotensi mengembangkan dan mengelola sumber daya alam dan berujung pada masyarakat yang kurang sejahtera dan hidup digaris kemiskinan karena tidak tersedianya distribusi yang dapat menunjang taraf hidup masyarakat.” **(Wawancara dengan Bapak Yekti Pracoyo, ST. Kabid sarpras BAPPEDA ext Dinas Bina Marga)**

Pembangunan terhambat karena keadaan demografis Kabupaten Malang yang tidak merata, didominasi daerah pegunungan, perbukitan dan pantai. Untuk membangun infrastruktur yang layak dibutuhkan strategi khusus untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. **(Laporan pembangunan 2005-2010)**

“Lagi-lagi persoalan kurang meratanya pembngnan daerah dan daerah terpencil semakin tertinggal. Persoalaan terdahulu pemerintah hanya terfokus membangun daerah

yang mudah dijangkau, padahal banyak daerah berpotensi meskipun kondisi demografis yang berbeda dan cenderung lebih sulit. Seharusnya hal tersebut tidak menjadi alasan untuk tidak dibangunnya infrastruktur di daerah tersebut yang mengakibatkan perekonomian yang rendah.”
(Wawancara dengan Bapak Yekti Pracoyo, ST. Kabid sarpras BAPPEDA ext Dinas Bina Marga)

“Keadaan demografis yang sulit membuat jarang bahkan tidak ada transportasi menuju daerah terpencil di Kabupaten Malang, hal ini diperparah dengan pemerintah tidak memberikan solusi kepada masyarakat atas ketersediaan distribusi yang seharusnya masyarakat perlukan guna memenuhi kebutuhan, dengan kata lain tidak ada komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat. Selah itu tingkat pendidikan masyarakat daerah terpencil yang rendah menambah penderitaan masyarakat karena kurang memahami mengkomunikasikan kepada pihak berwenang (pemerintah) agar aksesibilitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka mudah dan dapat dicapai.”
(Wawancara dengan Bapak Yekti Pracoyo, ST. Kabid sarpras BAPPEDA ext Dinas Bina Marga)

Hambatan dan permasalahan seperti itulah membuat pemerintah Kabupaten Malang berbenah diri dan terus membuat kebijakan yang berlatar dan mengedepankan pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur agar permasalahan utama yaitu sulitnya distribusi dan aksesibilitas dapat di pecahkan dan tidak semakin membuat penderitaan untuk masyarakat di daerah terpencil.

Kenyataan dilapangan dalam pembangunan infrastruktur jalan lingkaran barat di Kepanjen adalah pembangunan infrastruktur yang memadai memerlukan lahan yang luas dan bebas dari kepadatan pusat Kota Kepanjen untuk meredam kemacetan. Tantangan utamanya adalah pembebasan lahan untuk dibangun

sebuah sarana jalan dan sosialisasi kepada masyarakat yang lahannya menjadi proyek pembangunan infrastruktur. Sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat sangat diperlukan karena tidak sedikit dari masyarakat yang bersangkutan mencari sumber penghasilan dan pencahariannya hanya dari lahan perkebunan yang akan dibangun infrastruktur. Meskipun pembangunan infrastruktur akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi masyarakat, pemerintah tidak bisa begitu saja mengesampingkan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari lahan tersebut. Solusi dari pemerintah atas permasalahan pembebasan lahan yang ditakutkan akan berdampak buruk terhadap perekonomian masyarakat yang menggantungkan penghasilannya dari hasil perkebunan adalah membimbing dan mengarahkan masyarakat untuk membangun dunia usaha dari hasil penjualan lahan perkebunan, namun bagi masyarakat yang tetap mengelola perkebunan, pemerintah dan masyarakat bersama-sama mencari lahan baru untuk dibeli dan dikembangkan menjadi lahan perkebunan kembali. Selain itu Kecamatan Kepanjen menjadi Kawasan pengembangan pangan dimana Pemerintah tidak bisa begitu saja memberikan ijin kepada pelaku usaha (masyarakat) yang akan membangun usaha dengan kata lain mengalihfungsikan lahan perkebunan yang menjadi kawasan pengembangan pangan untuk dijadikan kawasan usaha dan

peruntukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dibidang usaha. **(Laporan Pembangunan 2005-2010)**

“Dalam pembangunan jaalan lingkaran barat tentu bukan hal yang mudah bagi Pemerintah walaupun tujuan pembangunan jalibar adalah mempermudah aksesibilitas masyarakat sekitar dan wisatawan untuk ke Kabupaten Malang khususnya yang melewati Kecamatan Kepanjen. Tujuan utama dalam jangka dekat ketika dibangunnya jalibar adalah meredam kemacetan di pusat Kota Kepanjen, karena masyarakat dan wisatawan yang menuju ekowisata Kabupaten Malang harus melewati pusat Kota Kepanjen, namun tidak menutup kemungkinan dalam jangka waktu panjang tentu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat karena ditinjau Kabupaten Malang sangat berpotensi dalam hal pariwisata, Kepanjen juga sebagai aksesibilitas bagi masyarakat yang akan ke Kota Blitar atau dari Blitar ke Kota Malang. Dari dampak yang sangat berpeluang meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, Pemerintah tidak mudah dalam implementasi pembangunannya. Perencanaan pembangunan jalibar sudah dimulai dari tahun 2003 namun baru bisa digunakan pada tahun 2010 itu karena terkandala dengan pembebasan lahan. Kecamatan Kepanjen yang dibangun jalibar adalah kawasan perkebunan dan pertanian yang mayoritas pemilik lahan adalah masyarakat yang sumber penghasilannya dari hasil kebun tersebut, itu adalah tantangan dan masalah dalam pembangunan infrastruktur jalan tersebut. Kita tidak bisa begitu saja membeli lahan tersebut, kita harus mempertimbangkan bagaimana perekonomian masyarakat tersebut setelah lahannya dijual kepada kita, apakah uang dari hasil penjualan lahan tersebut mampu meningkatkan perekonomian mereka atau malah mempersulit perekonomian mereka? Pemerintah dikala itu harus membantu masyarakat yang lahannya terkena proyek pembangunan, bantuan tersebut bisa berupa membantu mencari lahan baru atau mencari usaha yang bisa memberikan penghasilan kepada masyarakat tersebut, kita berharap bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat bukan mempersulit mereka.” **(Wawancara dengan Bapak Yekti Pracoyo, ST. Kabid sarpras BAPPEDA ext Dinas Bina Marga)**

Faktor pendukung adalah alasan dilaksanakannya kebijakan dalam hal ini adalah pembangunan infrastruktur yang memadahi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Setiap pelaksanaan kebijakan ada hambatan begitu pula dalam pembangunan daerah di Indonesia sebagai negara berkembang, dan khususnya Kabupaten Malang masih ada beberapa faktor yang menjadi penghambat, hal ini membuat pemerintah terus berupaya dalam hal pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi masyarakat *pasca* pembangunan infrastruktur.

C. Pembahasan

1. Pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat sebagai strategi pemerintah Kabupaten Malang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Setiap kebijakan yang tepat sasaran atau sesuai dengan tujuan adalah kebijakan yang didalamnya terdapat strategi khusus untuk menyelesaikan tujuan kebijakan tersebut. Demikian dengan pembangunan infrastruktur, keberhasilan pembangunan memerlukan strategi yang dibuat sesuai dengan strategi pembangunan nasional, dan mengoptimalkan potensi daerah yang akan dibangun. Pemerintah Kabupaten Malang memfokuskan kebijakan pembangunan pada pembangunan infrastruktur guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, untuk mencapai kebijakan tersebut pemerintah Kabupaten

Malang menentukan arah strategi untuk mencapai sasaran kebijakan pembangunan infrastruktur guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, kebijakan tersebut dilakukan beberapa aktor pemerintahan salah satunya adalah Bappeda Kabupaten Malang. Secara teori penulis menggunakan teori Subandi, Menurut Subandi ada 4 strategi dalam pembangunan daerah, berikut adalah analisis dan penjabaran berdasarkan fakta pembangunan infrastruktur jalan lingkar Barat Kepanjen yang di implementasikan Bappeda kabupaten Malang dan teori Subandi.

a. Penerapan strategi pengembangan fisik (*locality or physical development strategy*)

Penerapan strategi pengembangan fisik dimulai melalui pengembangan program perbaikan kondisi fisik/lokalitas daerah yang ditujukan untuk kepentingan pembangunan industri dan perdagangan, pemerintah daerah secara khusus tujuan strategi pembangunan fisik ini adalah menciptakan identitas daerah/kota, memperbaiki (*amenity base*) atau kualitas hidup masyarakat dan memperbaiki dunia usaha daerah.

(Subandi, 2014;122)

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat atau kesejahteraan masyarakat dimulai dengan pemenuhan infrastruktur yang memadahi sebagai sarana utama untuk kemudahan aksesibilitas masyarakat sehingga pemenuhan kebutuhan hidup terpenuhi dan pembangunan ekonomi terus berkembang secara mudah dan cepat. Untuk itu

pembangunan infrastruktur di Kabupaten Malang harus terus dilakukan sebagai sarana pendukung pembangunan ekonomi daerah dan masyarakat Kabupaten Malang. Bappeda Kabupaten Malang berupaya menciptakan identitas daerah/Kabupaten dengan cara membangun infrastruktur di Kecamatan Kepanjen untuk memenuhi kebutuhan distribusi dan kelayakan Kepanjen sebagai Ibu Kota Kabupaten Malang. Tujuan yang diharapkan setelah terpenuhinya distribusi adalah kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat Kepanjen dapat dilihat dari terpenuhinya hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia yaitu pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, lingkungan yang memadahi dan mendukung.

Dari teori strategi pengembangan fisik menurut Subandi dan fakta pembangunan infrastruktur di Kepanjen oleh Bappeda Kabupaten Malang sudah berjalan cukup baik dan sesuai, Bappeda mengimplementasikan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan lingkaran barat guna pemerataan fasilitas bagi kemudahan aksesibilitas masyarakat dan menjadi identitas baru bagi Kabupaten Malang khususnya Kecamatan Kepanjen. Pembangunan jalan lingkaran barat memberikan peluang atas pembangunan dan perkembangan industri dan perdagangan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun pembangunan di Kecamatan Kepanjen yang bisa dijadikan sebagai identitas unggulan Kepanjen belum merata. Pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan infrastruktur dan perkembangan

pembangunan ekonomi, pembangunan yang memadahi hanya terfokus pada pusat kota sehingga kegiatan ekonomi hanya berkembang pesat di pusat Kota Kepanjen, sedangkan Kepanjen memiliki beberapa daerah yang perlu dikembangkan untuk membangun ekonomi dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat daerah tersebut namun belum berkesempatan untuk berkembang membangun ekonomi karena minimnya ketersediaan infrastruktur sehingga menghambat aksesibilitas masyarakat untuk menyalurkan dan menerima distribusi sebagai kebutuhan hidup masyarakat daerah.

1. Pembuatan bank tanah (*land bank*)

Tujuannya agar memiliki data tentang tanah yang kurang optimal penggunaannya, tanah yang belum dikembangkan, atau salah dalam penggunaannya dan sebagainya. (Subandi, 2014;122)

Pembangunan infrastruktur membutuhkan lahan yang luas dan layak agar infrastruktur yang dibangun memadahi kebutuhan akan sarana jalan dan dapat berkembang membangun ekonomi daerah. Pembangunan infrastruktur jalan dilakukan diatas lahan perbukitan, hutan yang tidak dalam kawasan perlindungan, sawah, dan perkebunan, tidak menutup kemungkinan jika situasi dan kondisi tertentu pembangunan infrastruktur jalan harus dilakukan di pemukiman masyarakat dengan kata lain mengalihfungsikan dari pemukiman menjadi infrastruktur jalan, namun hal tersebut sangat diminimalisir oleh pemerintah untuk tidak terjadi. Pembangunan

infrastruktur jalan dilaksanakan dilahan yang luas dan jauh dari kepadatan kota agar memberikan solusi terhadap permasalahan kepadatan kota serta memberi peluang atas didirikannya usaha diwilayan infrastruktur jalan yang baru dibangun. Dari penjelasan diatas tentang lahan apa saja yang layak dibangun infrastruktur jalan, data tentang tanah/lahan seluruh Kabupaten Malang dalam pengawasan Bappeda Kabupaten Malang, agar pembangunan infrastruktur tepat sasaran dan dibangun di lahan yang sesuai dengan arah kebijakan pembangunan infrastruktur selain itu Bappeda Kabupaten Malang dapat mengendalikan lahan yang belum optimal dalam penggunaannya. Pengawasan lahan juga berfungsi mensosialisasikan fungsi lahan yang baik dan dapat dikembangkan kemudian akan memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat, serta membina masyarakat untuk mengoptimalkan fungsi lahan.

Dari penjelasan dan fungsi teori pembuatan ban tanah oleh Subandi dan penerapan strategi kebijakan Bappeda kurang sesuai, karena pengawasan dan *survey* lahan yang dibangun infrastruktur jalan dilakukan ketika akan dilaksanakannya sebuah pembangunan jalan. Hal tersebut tentu akan menimbulkan pemasalahn seperti kurang optimalnya hasil data lahan yang akan dibangun dan menimbulkan konflik antara pemerintah dengan masyarakat pemilik lahan karena sosialisasi kebijakan pembangunan infrastruktur yang akan diimplementasikan dilakukan ketika pembangunan akan

berlangsung. Waktu yang bisa dibilang singkat menjadikan kesenjangan antara tujuan kebijakan yang akan di implementasikan Bappeda kabupaten Malang dengan masyarakat. Seperti halnya pembangunan infrastruktur jalan lingkaran barat Kepanjen yang dibangun diatas lahan perkebunan masyarakat menemukan titik yang *alot* ketika pembebasan lahan, Bappeda bersama Dinas Bina Marga ketika pembangunan berlangsung berupaya mensosialisasikan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan lingkaran barat harus dilakukan karena selain program propinsi pembangunan jalan lingkaran barat akan menimbulkan banyak dampak positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat, namun banyak masyarakat yang kurang setuju dengan tujuan pembangunan infrastruktur jalan lingkaran barat, diantara masyarakat tersebut ada kekhawatiran akan hilangnya penghasilan mereka yang selama ini menggantungkan dari hasil perkebunan, selain itu menurut masyarakat pemilik lahan perkebunan yang akan dibangun sarana jalan tersebut adalah perkebunan turun-temurun dari pendahulu mereka atau nenek moyang, masyarakat berpegang teguh pada budaya yang selama ini mereka pahami bahwa lahan perkebunan yang sudah turun-temurun harus dijaga fungsi dari perkebunan tersebut. Menurut nara sumber Bapak Yekti sebagai kbid sarpras Bappeda Kabupaten Malang ketika pembangunan infrastruktur jalan lingkaran barat Kepanjen beliau menjabat di Dinas Bina Marga

Kabupaten Malang dan terjun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan pembebasan lahan yang akan dibangun infrastruktur jalan lingkar barat, kurang lebih membutuhkan waktu 7 tahun untuk mengimplementasikan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat Kepanjen, waktu yang cukup panjang itu upaya Bappeda bersama Dinas Bina Marga membebaskan lahan dari kepemilikan masyarakat menjadi milik negara dan dibangun sarana jalan, hingga bersama-sama dengan masyarakat pemilik lahan untuk mencari lahan baru bagi masyarakat yang ingin tetap mengembangkan hasil perkebunan serta membimbing masyarakat yang akan mendirikan usaha dari hasil penjualan lahan tersebut. Dapat dilihat dari permasalahan tersebut pengawasan data lahan untuk pembangunan oleh Bappeda kurang optimal karena waktu yang singkat atau pengawasan dilakukan ketika akan dilaksanakannya pembangunan membuat cukup banyak masalah dan waktu yang lama untuk menyelesaikannya, permasalahan tersebut menjadi bahan evaluasi Bappeda untuk strategi pembangunan selanjutnya.

2. Pengendalian perencanaan dan pembangunan

Tujuan pengendalian perencanaan dan pembangunan adalah untuk memperbaiki iklim investasi di daerah dan memperbaiki citra pemerintah daerah. (Subandi, 2014;122) Yang dimaksud iklim investasi dalam pembangunan daerah selama ini adalah fokus

pembangunan oleh pemerintah daerah selama ini hanya terfokus pada pusat kota dimana mengakibatkan kegiatan ekonomi hanya berkembang di pusat kota, sedangkan daerah-daerah yang terpencil kurang diberikan kesempatan dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi karena kebijakan pembangunan yang dibuat pemerintah daerah hanya dilakukan dipusat kota. Oleh sebab itu diperlukan memperbaiki iklim investasi yaitu memperbaiki kebiasaan dan citra pemerintah daerah selama ini yaitu pembangunan yang terfokus hanya dipusat kota, pemerintah daerah harus mampu membangun infrastruktur secara merata yang memadahi hingga ke daerah-daerah terpencil sekalipun, untuk meratakan kegiatan ekonomi diseluruh daerah sehingga memberikan kesempatan kepada daerah-daerah yang belum berkembang untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat merupakan salah satu bentuk upaya Bappeda dalam meratakan pembangunan di Kabupten Malang serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kepanjen. Jalan lingkar barat dibangun diatas lahan perkebunan yang cukup jauh jaraknya dari pusat Kota Kepanjen, sehingga jalan lingkar barat menjadi solusi tepat untuk penanggulangan masalah kepadatan di pusat Kota Kepanjen. Dengan adanya jalan lingkar barat yang menghubungkan beberapa Kecamatan kabupaten Malang, bahkan menghubungkan antara Kota

Malang dengan kota-kota lain laju distribusi tidak harus melewati pusat kota, selain itu dengan adanya infrastruktur di daerah yang memadahi memberikan kemudahan aksesibilitas jalur distribusi ke daerah terpencil sehingga kegiatan ekonomi Kepanjen tidak terfokus dipusat kota namun merata hingga pelosok daerah Kepanjen.

Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan lingkaran barat sudah berjalan dengan baik serta sesuai dengan teori yang dituliskan oleh Subandi, pembangunan infrastruktur jalan lingkaran barat membuktikan bahwa Bappeda Kabupaten Malang memperbaiki sistem kebijakan pembangunan yang dibuat pemerintahan yang terdahulu dimana pembangunan hanya dilakukan dipusat kota sehingga daerah-daerah terpencil tidak mempunyai kesempatan untuk mengembangkan perekonomian daerah. Dengan adanya pembangunan jalan lingkaran barat yang berfungsi sebagai penghubung distribusi antara daerah yang sudah berkembang/pusat kota dengan daerah terpencil yang akan memulai pembangunan ekonomi. Kepanjen sebagai ibu kota Kabupaten Malang tentu akan terus berupaya memperbaiki identitas kota yang layak untuk menjadi ibu kota Kabupaten Malang, untuk itu Bappeda terus membangun daerah Kepanjen, selain keharusan pembangunan karena Kepanjen adalah ibu kota Kabupaten Malang, Kepanjen memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi. Namun untuk daerah lain di Kabupaten Malang masih ada beberapa daerah

terpencil yang belum mampu berkembang dengan baik dari segi ekonomi karena infrastruktur yang kurang memadai dan menyebabkan distribusi terhambat dan sulit untuk di akses, menurut nara sumber Bapak Yekti selaku kabid sarpras Bappeda Kabupaten Malang, pembangunan yg kurang merata tersebut diakibatkan perbedaan keadaan demografi. Ada beberapa daerah yang sangat sulit dijangkau sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengimplementasikan kebijakan pembangunan infrastruktur yang baik di daerah tersebut. Bappeda harus terus berupaya dalam mengedepankan pembangunan infrastruktur yang memadai bagi daerah terpencil agar daerah terpencil mampu mengembangkan pertumbuhan ekonomi karena kemudahan distribusi serta meminimalis kesenjangan antar daerah di Kabupaten Malang. Untuk itu diperlukan pengendalian perencanaan pembangunan disetiap kebijakan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Malang untuk mencapai tujuan tepat sasaran yaitu kesejahteraan masyarakat secara merata.

3. Penata kota (*twonscaping*)

Tujuan *twonscaping* adalah memperbaiki sarana jalan, penataan pusat-pusat perkotaan, dan penataan standar fisik suatu bangunan. (Subandi, 2014;122) Dilaksanakannya pembangunan infrastruktur jalan tentu akan diiringi dengan pemeliharaan dan perbaikan sarana jalan untuk menjaga kualitas jalan yang baik

sehingga tidak membahayakan atau merugikan pengguna jalan. Karena pembangunan jalan ditujukan untuk kemudahan aksesibilitas masyarakat antar daerah sehingga pembangunan harus dimaksimalkan.

Bappeda selaku badan pemerintah dalam bidang pembangunan daerah harus mampu membangun daerahnya yang mensejahterakan masyarakat, salah satunya adalah Bappeda wajib menyediakan fasilitas yang memadahi dan layak untuk kemudahan aksesibilitas masyarakat. Pembangunan jalan lingkaran barat akan diiringi dengan pemeliharaan dan perbaikan jalan, kegiatan tersebut juga dilakukan di seluruh sarana jalan Kabupaten Malang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana jalan yang layak dan memadahi. Strategi pembangunan infrastruktur jalan oleh Bappeda yang sesuai dengan alat pendukung penataan kota dari strategi pengembangan fisik adalah penataan pusat kota, dimana kebijakan penataan kota sebelumnya menimbulkan permasalahan yaitu kepadatan kota dan kegiatan ekonomi terfokus di pusat kota, hal tersebut disebabkan karena strategi penataan kota hanya terpusat di satu titik, tidak merata. Bappeda berupaya meratakan kegiatan pembangunan ekonomi daerah, salah satu upaya strateginya adalah pembangunan infrastruktur. Bappeda meyakini infrastruktur yang baik dan memadahi akan merangsang pembangunan ekonomi daerah, karena dengan infrastruktur yang memadahi memberikan

kesempatan bagi daerah untuk berkembang dan membangun pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kota bisa merata. Untuk itu Bappeda menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat sebagai strategi pemecahan fokus kegiatan ekonomi agar tidak terfokus di pusat kota.

Strategi Bappeda dalam pembangunan Kepanjen sudah berjalan baik, Bappeda membangun infrastruktur jalan lingkar barat untuk merangsang kegiatan ekonomi baru, dan kegiatan ekonomi tidak terfokus pada pusat kota Kepanjen. Jalan lingkar barat yang berperan penting penghubung antar daerah di Kabupaten Malang dan antar kota akan merangsang pembangunan baru yang sebelumnya hanya ada dipusat kota Kepanjen, dengan demikian akan memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa harus kepusat kota. Pembangunan perkotaan/kegiatan ekonomi yang merata tidak akan mengakibatkan kepadatan disatu titik. Namun strategi ini baru diimplementasikan di daerah yang sedang berkembang, untuk daerah lain di Kabupaten Malang masih mengalami kendala dalam penataan kota atau pusat kegiatan ekonomi. Diharapkan selanjutnya pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan jalan serta penataan pusat kegiatan ekonomi bisa secara merata di kabupaten Malang untuk mengurangi kesenjangan daerah.

4. Pengaturan tata ruang (zoning)

Pengaturan tata ruang akan merangsang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. (Subandi, 2014;122) Pengaturan tata ruang yang sesuai, seperti ketepatan penataan pusat pendidikan, kesehatan, kegiatan ekonomi, dan pariwisata, laju pembangunan ekonomi daerah akan berjalan lancar dan merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Diyakini bahwa pengaturan tata ruang yang baik dan sesuai fungsinya akan merangsang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. Hal tersebut pula yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Malang dalam pembangunan daerah, Bappeda sangat memperhatikan fokus pembangunan letak kegiatan masyarakat yang mampu meningkatkan dan membangun ekonomi, seperti pembangunan infrastruktur jalan akan menciptakan peluang usaha baru dan meratakan kegiatan ekonomi masyarakat agar tidak terfokus pada pusat Kota, dengan kegiatan ekonomi yang merata di daerah akan memudahkan masyarakat membangun ekonomi.

Peneliti melihat Kecamatan Kepanjen sebagai ibu kota Kabupaten Malang yang layak, kelayakan tersebut dapat dilihat dari struktur penata kota, seperti pusat pendidikan, kesehatan, pemerintahan, *market*, pariwisata dan hiburan, pemukiman, keagamaan hingga pusat olahraga yang bertaraf internasional. Penataan kota yang terpusat memudahkan masyarakat memenuhi

kebutuhannya, selain itu kegiatan ekonomi akan semakin lancar karena kemudahan aksesibilitas untuk masyarakat.

5. Penyediaan perumahan dan pemukiman

Ketersediaan perumahan dan pemukiman akan berpengaruh positif bagi dunia usaha, disamping menciptakan lapangan kerja. (Subandi, 2014;122) pengembangan pembangunan fisik tidak lengkap jika tidak membahas tentang perumahan dan pemukiman. Ketersediaan perumahan dan pemukiman didalam pembangunan sebagai penggerak atau aktor pembangunan ekonomi.

Dengan lahan yang memadai pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat di Kepanjen yang berpeluang besar terhadap dunia usaha, dan menyerap tenaga kerja difungsikan pula kawasan perumahan dan pemukiman. Salah satunya adalahnya dibangunnya perumahan bagi PNS. Hal ini dilakukan agar fungsi jalan lingkar barat semakin optimal, dengan adanya perumahan dan pemukiman disepanjang jalan lingkar barat akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

6. Penyediaan infrstruktur (air, listrik, taman dan lain-lain)

Pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat tidak hanya sarana jalan, pemerintah berupaya pembangunan jalan lingkar barat tidak hanya memecahkan masalah kemudahan distribusi, diharapkan dapat membangun ekonomi daerah. Dengan demikian dibangun perumahan dan pemukiman, pendirian usaha oleh

masyarakat seperti rumah makan, pertokoan dan lain-lain serta sarana pendukungnya seperti ketersediaan air bersih, aliran listrik, sarana parkir bagi pengendara, taman yang menjadi sarana hiburan masyarakat dan dapat dijadikan kawasan olahraga santai. Ketersediaan infrastruktur yang optimal akan merangsang pertumbuhan pembangunan ekonomi di Kepanjen. Alat pendukung pada strategi pembangunan fisik ini diharapkan berjalan beriringan membangun ekonomi dan mensejahterakan masyarakat.

Dari data yang didapat peneliti, perumahan dan bangunan usaha disepanjang jalan lingkaran barat sudah dialiri saluran PAM yang memadai dan memudahkan aktifitas masyarakat, aliran listrik di setiap perumahan, dan bangunan usaha hingga penerangan jalan yang baik, serta taman hiburan bagi masyarakat atau pengguna jalan yang ingin beristirahat (*rest area*), taman tersebut juga difungsikan sebagai sarana olahraga bagi penduduk sekitar jalan lingkaran barat, serta rambu-rambu yang baik untuk kemudahan dan kenyamanan pengguna jalan lingkaran barat Kepanjen.

b. Penerapan pengembangan dunia usaha (*Business development strategy*)

Pengembangan dunia usaha merupakan komponen penting dalam pembangunan daerah, karena daya tarik, kerativitas atau daya tahan kegiatan usaha merupakan cara terbaik untuk menciptakan perekonomian daerah yang sehat. (Subandi, 2014;123) Pembangunan

infrastruktur akan menyisakan dampak ekonomi daerah, karena setiap pembangunan infrastruktur yang memadahi akan merangsang pertumbuhan ekonomi daerah salah satu kegiatan ekonomi dari dampak pembangunan adalah pendirian usaha baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan lain dibangunnya infrastruktur jalan lingkaran barat Kepanjen adalah mampu membangun ekonomi beriringan dengan pemenuhan sarana jalan guna memudahkan aksesibilitas distribusi dan memecahkan masalah kepadatan dipusat kota. Ditinjau dari tujuan pembangunan infrastruktur jalan lingkaran barat adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka Bappeda Kabupaten Malang mengembangkan peluang dunia usaha bagi masyarakat *pasca* pembangunan infrastruktur jalan lingkaran barat. Bappeda mengimplementasikan kebijakan pembangunan yang selanjutnya kebijakan dunia usaha disempurnakan dan dibimbing oleh Dinas Koperasi Kabupaten Malang untuk mensosialisasikan tentang dunia usaha seperti kebijakan dari pemerintah, strategi usaha, serta solusi bagi permasalahan dunia usaha kepada masyarakat. Bappeda memberikan kesempatan bagi masyarakat khususnya masyarakat Kepanjen atau pemilik lahan sepanjang jalan lingkaran barat untuk mendirikan usaha seperti rumah makan, pertokoan dan lain-lain. Bappeda bidang ekonomi bersama dengan Dinas Koperasi Kabupaten Malang mensosialisasikan tentang dunia usaha kepada masyarakat yang akan berwirausaha,

bekerjasama dengan masyarakat menciptakan iklim usaha baru yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pemerintah membuat informasi terpadu tentang rencana kebijakan pembangunan ekonomi daerah kepada pelaku usaha agar memudahkan mereka dalam membangun usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan berjalan sesuai dengan misi pembangunan daerah. Pemerintah berupaya memberikan solusi untuk kendala para pelaku usaha dalam membangun usaha dengan mendirikan pusat konsultasi dan pengembangan dunia kecil, perhatian Dinas Koperasi Kabupaten Malang kepada pelaku usaha ini diyakini mampu mengembangkan dunia usaha kecil atau usaha masyarakat karena dari dunia usaha kecil mampu menyerap tenaga kerja dan sebagai sumber dorongan memajukan wirausaha.

Upaya Bappeda dan Dinas Koperasi kabupaten Malang diatas dimaksudkan untuk membangun dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan membangun dunia usaha di sepanjang jalan lingkar barat namun disisi lain, pembangunan usaha di sepanjang jalan lingkar barat yang sebelumnya adalah lahan perkebunan pengembangan pangan Kabupaten Malang tidak memberikan dampak buruk yang berlebihan terhadap lingkungan kawasan pengembangan pangan tersebut. Diharapkan pembangunan ekonomi dan ketersediaan pangan tetap terjaga dan bekerjasama berjalan beriringan. Arahan dari Bappeda bagian ekonomi dan Dinas Koperasi Kabupaten Malang kepada masyarakat seputar dunia usaha sangat membantu masyarakat untuk

mengembangkan dan pertumbuhan usaha mereka. Dinas Koperasi sangat mendukung usaha kecil yang didirikan oleh masyarakat, hal tersebut akan berdampak pada kemandirian masyarakat dalam menciptakan peluang usaha, dan menyerap tenaga kerja serta membangun perekonomian daerah, dukungan pemerintah Kabupaten Malang kepada usaha kecil tidak sampai disitu, menurut nara sumber Bapak Bambang selaku Kabid perencanaan ekonomi Bappeda Kabupaten Malang yang pernah menjabat di bagian Dinas Perijinan Kabupaten Malang saat pembangunan infrastruktur berlangsung mengungkapkan bahwa pendirian usaha berskala besar atau dapat dikatakan investor asing dari masyarakat Kepanjen tidak akan mendapat ijin untuk membangun usaha di jalan lingkar barat. Strategi itu dilakukan untuk melindungi usaha kecil yang dibangun masyarakat serta menjaga lingkungan lahan perkebunan sebagai kawasan pengembangan pangan Kabupaten Malang.

c. Penerapan strategi pengembangan sumberdaya manusia (*human resource development strategy*)

Strategi pengembangan sumberdaya manusia merupakan aspek paling penting dalam proses pembangunan ekonomi. Oleh karena itu pembangunan tanpa diiringi dengan peningkatan kualitas dan keterampilan sumberdaya manusia adalah suatu keniscayaan. (Subandi, 2014;123) Infrastruktur yang memadai dan layak cenderung memiliki sumberdaya manusia berkualitas tinggi, sebaliknya jika infrastruktur

yang rendah bahkan tidak tersedia maka akan menciptakan sumberdaya manusia yang rendah dan mengakibatkan keterpurukan ekonomi masyarakat/kemiskinan. Karena setiap proses pembangunan ekonomi diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas dan ketrampilan yang tinggi. Untuk itu Bappeda bidang ekonomi bekerjasama dengan masyarakat untuk mengembangkan sumberdaya manusia yang berkualitas agar masyarakat yang bekerjasama dalam membangun ekonomi dengan cara mendirikan usaha mampu bersaing bahkan dengan “produk import” dan menjadi sumber daya yang berkualitas. Bappeda bidang ekonomi menyediakan pelatihan yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pendiri usaha, dan pelatihan untuk meningkatkan keahlian.

Menurut nara sumber Bapak Bambang selaku kapid perencanaan ekonomi Bappeda Kabupaten Malang, Bappeda memfokuskan pengembangan sumberdaya manusia yang dapat mengembangkan pembangunan dunia usaha. Bappeda memenuhi kebutuhan infrastruktur, pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat yang kemudian menjadi akses bagi setiap masyarakat untuk lebih berkembang dan memperbaiki kualitas kinerjanya sehingga menjadi sumberdaya yang berkualitas dan layak bersaing di dunia usaha. Kendalanya adalah beberapa masyarakat daerah yang berprofesi sebagai petani kurang memahami bahkan tidak setuju dengan kebijakna pemerintah tentang dunia usaha untuk menciptakan peluang ekonomi.

Masyarakat yang berprofesi sebagai petani beranggapan mereka harus menjaga kebiasaan dan budaya pertanian karena sudah menjadi kegiatan turun-menurun dari nenek moyang. Upaya Bappeda adalah terus mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat tentang dunia usaha dan peluangnya usaha untuk pertumbuhan ekonomi dan menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk bersaing di dunia usaha, selain itu Bappeda tetap mendampingi dan mengarahkan masyarakat yang tetap ingin bertani, Bappeda mendukung kegiatan masyarakat sebagai petani dan mengarahkan masyarakat menjadi sumberdaya manusia (petani) yang berkualitas sehingga menghasilkan hasil pertanian/hasil pangan yang berkualitas dan mampu bersaing dengan produk petani lainnya sehingga mensejahterakan kehidupan petani.

d. Penerapan strategi pengembangan masyarakat (*community-based development strategy*)

Strategi pengembangan masyarakat ini merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memberdayakan (*empowrment*) suatu kelompok masyarakat tertentu pada suatu daerah. Kegiatan-kegiatan ini berkembang baik di Indonesia belakangan ini, karena ternyata kebijakan umum ekonomi yang tidak mampu memberikan manfaat bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu. (Subandi, 2014;124)

Pada strategi ini tidak jauh berbeda dengan pengembangan sumberdaya manusia, namun pada strategi pengembangan masyarakat dilakukan kepada kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang

dipandang sebagai masyarakat pencetus atau berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan ekonomi daerah. Bappeda Kabupaten Malang bersama-sama dengan masyarakat menggerakkan pembangunan ekonomi. Seperti kelompok masyarakat yang ingin mendirikan usaha untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat yang lebih baik, dan kelompok masyarakat yang berkomitmen untuk mengembangkan pertanian guna menjaga hasil pangan. Bappeda Kabupaten Malang memberdayakan dua kelompok masyarakat ini dengan cara yang berbeda agar tidak terjadi kesenjangan antar kelompok. Misalnya pada kelompok pendirian usaha, Bappeda mendukung usaha kecil yang dibangun masyarakat terutama usaha yang menyerap tenaga kerja dari masyarakat itu sendiri dan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk kelompok petani, masyarakat mendukung dan mengarahkan untuk menjadi petani profesional dan berkualitas agar dapat menghasilkan hasil pertanian berkualitas dengan harga jual tinggi, sehingga meningkatkan ekonomi dan mensejahterakan petani.

Keseriusan pemerintah Kabupaten Malang dalam pembangunan infrastruktur guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat ditinjau dari tema pembangunan Kabupaten Malang yaitu pemantapan pembangunan infrastruktur dalam upaya peningkatan pusat-pusat ekonomi dan pariwisata, daya saing daerah bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Pembangunan infrastruktur diharapkan tidak hanya sebagai akses baru yang memudahkan distribusi dan meningkatkan

aksesibilitas masyarakat, tetapi dengan kemudahan distribusi dan peningkatan aksesibilitas mampu membangun ekonomi daerah yang mensejahterakan rakyat. Pemerintah memfokuskan pembangunan pada peningkatan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi serta memacu ekonomi andalan, terutama dikaitkan dengan pertumbuhan dan percepatan pemerataan ekonomi. Dari penjelasan tersebut bisa dipastikan misi, strategi, fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Malang menekankan pada pembangunan infrastruktur yang dapat membangun ekonomi daerah dan mensejahterakan masyarakat.

Strategi pembangunan infrastruktur dibuat tentu agar pembangunan agar tepat sasaran, strategi-strategi tersebut disesuaikan dengan issue yang terjadi di masyarakat. Pada pembangunan infrastruktur jalan lingkaran barat strategi dibuat untuk mencapai sasaran utamanya yaitu meredam atau mengurangi kepadatan pada pusat Kota Kepanjen yang menyebabkan padat hingga kemacetan hal tersebut akan menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat karena kegiatan terpusat pada Kota tidak merata pada daerah-daerah lain yang berpotensi membangun ekonomi.

2. Dampak pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat Kepanjen terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat

Kebijakan pembangunan dibuat untuk mencapai sasaran salah satunya adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur akan memberikan dampak yang signifikan karena dapat dilihat fungsi dari ketersediaan infrastruktur yang memadai adalah keoptimalan kegiatan masyarakat, artinya infrastruktur adalah jembatan untuk mempermudah kegiatan masyarakat terutama kegiatan ekonomi masyarakat. Seperti halnya pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat Kepanjen memberikan dampak bagi daerah dan masyarakat.

a. Dampak positif dari pembangunan infrastruktur di Kepanjen

Dampak utama yang langsung dirasakan dari pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat adalah kepadatan dan kemacetan yang diakibatkan dari kegiatan hanya terfokus pada pusat Kota Kepanjen berkurang, pengguna jalan (masyarakat) yang bertujuan hanya melewati Kepanjen hanya sebagai aksesibilitas bukan kegiatan utama/ekonomi tidak perlu melewati pusat Kota, masyarakat dapat menggunakan fasilitas sarana jalan lingkar barat yang menghubungkan ke beberapa daerah di Kepanjen atau jalur antar kota.

Bappeda Kabupaten Malang meyakini wilayah dengan sarana infrastruktur yang memadai secara baik akan berfungsi dengan baik dibandingkan dengan wilayah sarana infrastrukturnya kurang memadai, infrastruktur yang baik dan memadai akan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan secara baik serta pertumbuhan ekonomi yang baik. Peran infrastruktur sebagai penggerak dan gambaran atas keberhasilan kesejahteraan masyarakat memang tidak dapat dipungkiri, infrastruktur yang baik akan meningkatkan produksi karena kemudahan distribusi, meningkatnya aksesibilitas ke daerah, menekan kesenjangan antar daerah, memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan dirinya sebagai daerah yang mampu bersaing dengan daerah lainnya, dan pengurangan kemiskinan. Mengingat peran dan kontribusi infrastruktur sangat besar terhadap perkembangan pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen mengutamakan dan mengedepankan pembangunan infrastruktur khususnya di daerah-daerah yang belum dikembangkan.

Dampak pembangunan infrastruktur dari segi ekonomi yaitu, pembangunan jalan lingkar barat tidak begitu saja memberikan dampak yang dapat dibilang peningkatan ekonomi *pasca* pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat, karena sasaran utamanya adalah meredam kepadatan pusat Kota Kepanjen, namun dengan berjalannya waktu fungsi jalan lingkar barat tidak hanya sebagai sarana jalan yang meadahi secara baik. Kemudahan tersebut menimbulkan dampak positif terutama pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk masyarakat yang tinggal disekitar jalan lingkar barat atau pemilik lahan memanfaatkan jalan lingkar barat untuk mendirikan usaha dan

mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Dari sumber BPS Kabupaten Malang tentang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang dari tahun 2010 hingga 2015 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan demikian infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu pendukung pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian.

b. Dampak negatif dari pembangunan infrastruktur jalan lingkaran barat

Setiap pembangunan infrastruktur akan menyisakan tentang dampak baik dan buruknya, seperti halnya pembangunan infrastruktur jalan lingkaran barat. Ditinjau dari dampak positif sangat optimal namun pembangunan tersebut menyisakan dampak negatif. Pembangunan infrastruktur jalan lingkaran barat dibangun diatas lahan perkebunan pengembangan pangan Kabupaten Malang, dengan dibangunnya jalan lingkaran barat yang cukup menyita lahan yang luas mengakibatkan pada hasil pangan Kabupaten Malang pada daerah Kepanjen berkurang meskipun permasalahan tersebut tidak begitu berdampak pada ketersediaan pangan daerah Kabupaten Malang. Selain itu lahan perkebunan yang dibangun jalan lingkaran barat memaksa masyarakat yang profesinya hanya mengandalkan dari hasil perkebunan atau petani harus mencari alternatif lain seperti membangun usaha atau membeli lahan baru dari hasil pembebasan lahan sebelumnya untuk dijadikan perkebunan yang menjadi penghasilan utama. Permasalahan ini tidak

begitu saja dilimpahkan kepada masyarakat, Bappeda Kabupaten Malang bersama-sama dengan masyarakat yang terlibat mengoptimalkan dalam memberi solusi termasuk dukungan untuk mendirikan usaha dan mencari lahan baru bagi masyarakat yang tetap ingin mengembangkan disektor pertanian dari hasil perkebunan seperti sebelumnya.

Kendala tersebut menjadi evaluasi Bappeda Kabupaten Malang agar pembangunan berikutnya menekan seminimal mungkin atas dampak negatif yang akan terjadi setelah pembangunan.

3. Faktor pendukung dan penghambat pembangunan infrastruktur jalan lingkaran barat Kepanjen sebagai strategi pemerintah Kabupaten Malang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

a. Faktor pendukung

Faktor pendukung adalah alasan terbesar dilakukannya pembangunan infrastruktur, ada beberapa faktor pendukung saat ditetapkannya kebijakan dan arah pembangunan infrastruktur. Seperti halnya pembangunan infrastruktur jalan lingkaran barat di Kecamatan Kepanjen guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, faktor faktor pendukung tersebut diantaranya adalah peran pemerintah Kabupaten Malang dalam pembangunan Kabupaten Malang, peran pemerintah adalah yang utama dalam pelaku pembangunan daerah, pemerintah Kabupaten Malang berperan sebagai *entrepreneur* yaitu

pemerintah Kabupaten Malang bertanggung jawab penuh atas pengadaan pembangunan infrastruktur Kabupaten Malang. Pemerintah Kabupaten Malang berperan sebagai kordinator yaitu menentukan arah kebijakan dan strategi kebijakan dengan menimbang semua dampak yang akan didapat setelah pembangunan infrastruktur, khususnya dampak ekonomi. Peran pemerintah Kabupaten Malang selanjutnya sebagai fasilitator yaitu pemerintah Kabupaten Malang mempercepat pembangunan dalam semua aspek, khususnya pembangunan infrastruktur Kabupaten Malang yang tertulis pada RPJMD yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah tahun 2010-2015 yang menekankan dan fokus pada pembangunan infrastruktur guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Malang berperan mengawasi dalam implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Malang, serta mengevaluasi kebijakan pembangunan infrastruktur yang belum tepat sasaran untuk dijadikan bahan perbaikan pembangunan selanjutnya.

Faktor pendukung pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat di Kepanjen selanjutnya adalah potensi daerah Kepanjen. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang nomor 3 tahun 2010, bahwa Kepanjen menjadi Ibu Kota Kabupaten Malang. Penetapan tersebut karena ditinjau Kepanjen memiliki potensi pengembangan di sektor perdagangan dan jasa skala Kabupaten,

pengembangan pertanian, peternakan, perikanan darat, industri pariwisata kehutanan serta pariwisata pligrim dengan prioritas pengembangan infrastruktur. Aspek-aspek tersebutlah yang kemudian menjadi faktor pendukung dan fokus Bappeda Kabupaten Malang dalam membangun infrastruktur, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat dan memantapkan Kepanjen layak sebagai ibu kota Kabupaten Malang.

Dari segi ekonomi yang mempengaruhi pembangunan infrastruktur menurut Subandi ada alat pendukung pertumbuhan ekonomi

1. Sumber-sumber alam

Menurut teori, sumber alam adalah yang meliputi luas tanah, sumber mineral dan tambang, iklim dan lain-lain. (**Subandi, 2014;114**)

Pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat diperuntukkan memenuhi saran jalan masyarakat agar kegiatan masyarakat tidak terpusat pada pusat Kota Kepanjen yang mengakibatkan kepadatan dan kemacetan sehingga tidak meratanya pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selanjutnya fungsi jalan lingkar barat tidak hanya sebagai sarana jalan yang memenuhi kebutuhan distribusi masyarakat dan meningkatkan kemudahan aksesibilitas masyarakat untuk menempuh antar daerah khususnya daerah tertinggal di Kabupaten Malang. Perlahan Bappeda membangun

beberapa sarana dan fasilitas yang memadahi guna mengoptimalkan fungsi sarana jalan lingkar barat. Dengan lahan yang cukup luas karena jalan lingkar barat dibangun diatas lahan perkebunan dan elemen sumber air yang memungkinkan untuk sumber kehidupan, pemerintah Kabupaten Malang bekerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat untuk mengoptimalkan fungsi jalan lingkar barat yaitu membangun pemukiman hingga taman untuk hiburan dan edukasi, memberikan peluang dan kesempatan bagi pemilik lahan perkebunan untuk membangun usaha seperti rumah makan, pertokoan dan lain-lain untuk peruntungan ekonomi. Harapan Bappeda Kabupaten Malang dengan adanya kegiatan sosial dan ekonomi pertumbuhan ekonomi Kepanjen tidak terfokus pada pusat Kota namun juga merata sampai ke daerah-daerah yang belum dikembangkan sebelumnya karena infrastruktur yang belum memadahi.

Dari teori alat pendukung pertumbuhan ekonomi yang ditulliskan Subandi dengan implementasi pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat Kepanjen oleh Bappeda Kabupaten Malang sudah sesuai, Bappeda Kabupaten Malang membangun infrastruktur jalan lingkar barat Kepanjen diatas lahan perkebunan yang memiliki lahan yang luas sehingga selain sarana jalan yang memadahi, lahan yang luas memberikan kesempatan untuk pembangunan usaha dan pemukiman di sepanjang jalan lingkar

barat agar fungsi jalan lingkar barat semakin optimal, selanjutnya Bappeda Kabupaten Malang dan masyarakat yang menfungsikan jalan lingkar barat sebagai sarana perkembangan pertumbuhan ekonomi harus menjaga lingkungan agar berjalan seimbang antara infrastruktur jalan yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan fungsi lahan perkebunan yang menjadi sumber perekonomian masyarakat.

2. Sumber tenaga kerja / sumber daya manusia

Pembangunan infrastruktur yang memadai diyakini sebagai jembatan bagi daerah berpotensi yang belum dikembangkan. Begitu sebaliknya tidak ada infrastruktur yang memadai khususnya infrastruktur jalan akan menghalangi dan menjadi hambatan untuk mengembangkan potensi atau keahlian tenaga kerja bagi masyarakat yang tinggal di daerah yang belum dijangku karena tidak ketersediaan infrastruktur, hal tersebut mengakibatkan pendayagunaan rendah tidak terlahir tenaga kerja yang berpotensi padahal jumlah penduduk sangat banyak namun tidak menciptakan tenaga kerja yang ahli dan mampu bersaing. (Subandi, 2014;114)

Untuk itu dibangun infrastruktur sebagai akses sarana jalan yang akan memberikan kesempatan bagi masyarakat daerah untuk meningkatkan keahliannya dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat yang memberikan peluang untuk dibangunnya usaha akan menciptakan peluang tenaga kerja atau sumber daya manusia yang memadai dan memperbaiki ekonomi masyarakat daerah. Karena Bappeda Kabupaten Malang mengutamakan pendirian usaha hanya untuk masyarakat lokal agar menciptakan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat serta memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, Bappeda meyakini bahwa usaha kecil yang mampu menyerap tenaga kerja dan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belajar mengembangkan potensinya sebagai tenaga kerja/sumberdaya manusia yang berkualitas.

Faktor pendukung pertumbuhan ekonomi *pasca* pembangunan infrastruktur di Kepanjen selanjutnya adalah potensi Kecamatan Kepanjen untuk menjadi ibu kota Kabupaten Malang membuat Bappeda Kabupaten Malang optimis untuk melaksanakan kebijakan pembangunan di Kepanjen khususnya pembangunan infrastruktur untuk memberikan kemudahan aksesibilitas pertumbuhan ekonomi masyarakat dan mensejahterakan masyarakat.

b. Faktor penghambat

Alasan implementasi kebijakan pembangunan adalah kuatnya faktor pendukung dari pemerintah dan potensi daerah, namun setiap pembangunan mengalami kendala atau hambatan. Seperti halnya dalam

pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat Kepanjen. Bappeda Kabupaten Malang mengalami hambatan dalam pelaksanaannya.

Menurut teori subandi ada beberapa hambatan dalam pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat

1. Ketimpangan sektor industri

Kegiatan ekonomi yang tinggi hanya terfokus di daerah tertentu yang mengakibatkan kesenjangan antar daerah dan daerah lain mengalami ketertinggalan dalam perkembangan dan pembangunan ekonomi.

Sebelum dibangun dan difungsikannya jalan lingkar barat secara optimal, kegiatan ekonomi masyarakat terfokus pada pusat Kota Kepanjen yang mengakibatkan kepadatan dan kemacetan hingga tidak meratanya kegiatan ekonomi didaerah sehingga banyak daerah di Kepanjen yang tertinggal dalam segi ekonomi. Pembangunan jalan lingkar barat memberikan solusi kepada masyarakat tidak hanya meredam kepadatan dipusat Kota tetapi juga memberikan kesempatan dan peluang bagi masyarakat daerah lain untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dapat dilihat dari prioritas dan fokus pembangunan Kabupaten Malang periode 2010-2015 mengutamakan penyediaan infrastruktur yang memadahi guna meratakan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang. Dalam jangka waktu tersebut

Bappeda membangun berbagai fasilitas untuk evaluasi hambatan kebijakan pembangunan sebelumnya yang mengakibatkan tidak meratanya perkembangan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kapanjen. Untuk itu belum ada hasil pertumbuhan ekonomi setelah pembangunan infrastruktur periode 2010-2015 dari upaya Bappeda kabupaten Malang untuk meratakan kegiatan ekonomi di Kapanjen, karena pertumbuhan ekonomi tersebut di tinjau dari tahun 2016.

2. Kurang meratanya investasi

Korelasi positif antara tingkat investasi dengan laju pertumbuhan ekonomi, sehingga dengan kurangnya investasi disuatu daerah membuat pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah tersebut rendah. (Subandi, 2014;117)

Inilah hambatan pemerintah pusat dalam pemerataan pembangunan, permasalahan pembangunan jika dikendalikan pemerintah pusat akan kurang merata dalam pengembangan pembangunan daerah. Oleh sebab itu peran pemerintah daerah sangat penting untuk membantu program pembangunan pemerintah pusat, peran pemerintah daerah sebagai penggali potensi dan mengoptimalkan fungsi daerah khususnya daerah yang berpotensi dikembangkan bidang ekonominya. Salah satu langkah awal untuk membangun daerah adalah pembangunan infrastruktur yang memadai.

Pemerintah Kabupaten Malang berupaya membuat kebijakan pembangunan dan menekankan pada pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pembangunan dilaksanakan pada daerah-daerah yang belum berkembang khususnya daerah yang berpotensi karena kurang memudahinya sarana infrastruktur.

Salah satu implementasi dari prioritas dan fokus pembangunan Kabupaten Malang yang mengutamakan pada penyediaan infrastruktur yang memadahi guna merangsang pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan infrastruktur jalan lingkaran barat Kepanjen. Pembangunan tersebut dibangun jauh dari pusat kota yang fungsinya bukan hanya meredakan kepadatan pusat kota dan menghindari kemacetan pusat kota tetapi juga menjadi sarana aksesibilitas bagi daerah terpencil yang memberikan peluang terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pembangunan infrastruktur di sekitar daerah yang terpencil dilakukan secara optimal dan menjadi infrastruktur jalan yang memadahi agar merangsang pengembang ekonomi untuk membangun ekonomi di infrastruktur jalan lingkaran barat yang baru dibangun sehingga investasi atau perkembangan ekonomi daerah akan merata.

3. Tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah

Perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antar daerah membuat terjadinya perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi antar daerah,

bahwa mekanisme pasar *output* dan *input* bebas (tanpa rekayasa, misalnya kebijakan pemerintah) mempengaruhi faktor produksi antar daerah. (Subandi, 2014;118)

Selama ini Bappeda Kabupaten Malang kurang memperhatikan perkembangan produksi di daerah-daerah yang dapat menghasilkan peningkatan pada ekonomi masyarakat, perkembangan dan kegiatan pertumbuhan ekonomi dilaksanakan di pusat-pusat Kota sehingga daerah lain tidak berkesempatan untuk mengembangkan dan membangun ekonomi. Namun kegiatan ekonomi yang terpusat dan tidak merata tersebut membuat masalah baru yaitu kepadatan dipusat kota sehingga kegiatan ekonomi berjalan lambat dan mengalami kejenuhan dalam perkembangan ekonomi. Dengan adanya permasalahan tersebut Bappeda Kabupaten Malang berupaya membangun kegiatan ekonomi tidak terfokus pada pusat kota namun merata hingga daerah-daerah plosok dengan memulai pembangunan infrastruktur sebagai langkah awal kegiatan ekonomi yang merata bagi masyarakat. Membangun berbagai fasilitas yang menunjang perkembangan ekonomi masyarakat salah satunya adalah pembangunan jalan lingkar barat, sebagai jalan yang menghubungkan antar kecamatan Kabupaten Malang dan antar beberapa Kota di Jawa Timur membuat jalan lingkar barat berperan sangat penting dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, karena perannya sebagai jalur utama

memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk mendirikan berbagai usaha di sepanjang jalan lingkar barat untuk memenuhi kebutuhan pengguna jalan. Namun dalam pembangunan usaha masyarakat perlu didampingi dan diarahkan oleh pemerintah agar berjalan sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

4. Perbedaan sumberdaya alam

Pembangunan ekonomi yang kaya sumberdaya alam akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan dengan daerah yang miskin sumberdaya alam. Sumberdaya alam diartikan hanya sebagai modal awal untuk pembangunan daerah, selanjutnya hanya dikembangkan secara terus menerus. Oleh sebab itu diperlukan faktor lain, yaitu faktor teknologi dan sumberdaya manusia yang berkualitas. **(Subandi, 2014;118)**

Sumberdaya alam di Kabupaten Malang sangat berlimpah dan mampu dikembangkan untuk pembangunan ekonomi guna meningkatkan ekonomi masyarakat, namun pembangunan yang tidak merata mengakibatkan sumberdaya alam di daerah-daerah yang berpotensi memberikan dampak ekonomi pada daerah tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Pembangunan yang tidak merata selain menghambat perkembangan ekonomi dari segi sumberdaya alam akan menghambat potensi sumberdaya manusia untuk berkualitas. Daerah-daerah tersebut sulit dijangkau karena sarana

infrastruktur seperti sarana jalan tidak memadai sehingga memaksa masyarakat terjebak di daerah tersebut tidak bisa berkembang ke daerah lain atau antar daerah untuk mengembangkan ekonomi dan kualitas sumberdaya manusia.

5. Perbedaan demografi

Kabupaten Malang yang luas dan keadaan geografi setiap daerah berbeda membuat jumlah dan pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan penduduk, pendidikan, kesehatan, kedisiplinan dan etos kerja tidak bisa samarata atau dengan kata lain kualitas setiap daerah berbeda. Hal tersebut yang membuat sulitnya dilakukan pembangunan infrastruktur, namun Bappeda Kabupaten Malang terus berupaya dalam pemerataan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Malang terutama daerah yang terpencil agar tidak terjadi kesenjangan antar daerah salah satunya adalah pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat yang meredam kesenjangan antar daerah Kabupaten dan Kota Malang, masyarakat mendapat kemudahan dalam aksesibilitas.

6. Kurang lancarnya perdagangan antar daerah

Tidak meratanya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Malang mengakibatkan tidak meratanya perdagangan. Kegiatan perdagangan pada umumnya dilakukan di pusat Kota sehingga memaksa seluruh masyarakat berbondong-bondong ke pusat Kota untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal tersebut tentu akan

berdampak buruk untuk perkembangan perdagangan di daerah terpencil. Seperti permasalahan di Kecamatan Kepanjen, Bappeda Kabupaten Malang membangun infrastruktur jalan lingkar barat untuk meredam kepadatan kegiatan masyarakat yang terfokus pada pusat Kota Kepanjen, dengan membangun jalan lingkar barat akan memudahkan distribusi ke daerah-daerah lainnya dan memberikan kesempatan untuk daerah-daerah lain mengembangkan ekonominya.

Hambatan diatas membuat Bappeda Kabupaten Malang berbenah diri terus mengevaluasi kebijakan pembangunan infrastruktur untuk memecahkan masalah sulitnya distribusi dan aksesibilitas di daerah-daerah terpencil. Dalam pembangunan jalan lingkar barat secara teknis pembangunan hingga pendanaan tidak ada hambatan yang berarti, hambatan terjadi ketika pembebasan lahan atas lahan perkebunan masyarakat yang akan dibangun jalan lingkar barat. Petani yang menggantungkan hidupnya dari penghasilan pertanian khawatir akan perekonomian mereka setelah lahan dibebaskan untuk pembangunan. Meskipun pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat akan memberikan banyak dampak positif kedepannya bahkan pada pertumbuhan ekonomi masyarakat, namun Bappeda Kabupaten Malang tidak begitu saja membiarkan para petani atau pemilik lahan perkebunan yang menggantungkan hidupnya dari hasil perkebunan.

Untuk itu Bappeda Kabupaten Malang terus mensosialisasikan dan pendekatan kepada masyarakat yang bersangkutan serta bersama-sama memecahkan masalah tersebut agar tidak ada masyarakat yang dirugikan di tengah banyaknya keuntungan dari pembangunan jalan lingkar barat Kepanjen. Bappeda Kabupaten Malang mensosialisasikan dan mengarahkan untuk membangun usaha dari hasil penjualan lahan, namun Bappeda Kabupaten Malang tidak bisa menekan pada masyarakat yang tetap menginginkan mengembangkan hasil perkebunan dan tidak membangun usaha, untuk permasalahan tersebut Bappeda Kabupaten Malang bersama dengan masyarakat yang bersangkutan mencari lahan lain untuk dibeli dari hasil penjualan lahan dan mengembangkan kembali perkebunan mereka. Bappeda Kabupaten Malang terus berupaya dalam pembangunan infrastruktur yang memadahi agar meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan harapan dari pembangunan tersebut tidak ada pihak yang dirugikan.

Faktor pendukung adalah alasan dilaksanakannya kebijakan dalam hal ini adalah kebijakan pembangunan infrastruktur yang memadahi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Setiap pelaksanaan kebijakan akan mengalami hambatan, begitu pula dengan pembangunan infrastruktur daerah di Indonesia khususnya Kabupaten Malang. Sebagai negara berkembang ada banyak faktor yang menjadi faktor penghambat, hal tersebut membuat pemerintah terus berupaya dalam mengavaluasi kebijakan pembangunan

infrastruktur yang memadahi untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Malang khususnya di Kecamatan Kepanjen adalah salah satu program prioritas dan fokus Pemerintah dalam memajukan daerah dan perbenahan diri Kecamatan Kepanjen sebagai Ibukota Kabupaten Malang. Dengan tema pembangunan: Pemantapan Pembangunan Infrastruktur Dalam Upaya Peningkatan Pusat-Pusat Ekonomi dan Pariwisata Daya Saing Daerah Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, membuktikan bahwa Pemerintah serius membangun infrastruktur tahun 2010-2015 untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, dengan asas desentralisasi Pemerintah Kabupaten Malang ingin meningkatkan infrastruktur untuk mendukung perekonomian masyarakat.
2. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sudah berjalan dengan baik. Perekonomian masyarakat cenderung meningkat *pasca* dibangunnya infrastruktur, ini dapat dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Malang yang meningkat setiap tahun.

hambatan terjadi hanya ketika akan dibangun infrastruktur dalam hal pembebasan lahan atas masyarakat.

3. Upaya Pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah membangun dan memelihara infrastruktur dengan memprioritaskan kepentingan mendorong perekonomian, pengentasan kemiskinan dan meningkatkan aksesibilitas.

B. Saran

1. Pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sudah terlihat hasilnya dengan baik, karena perekonomian masyarakat setiap tahunnya mengalami perubahan angka yang menunjukkan perbaikan dari tahun sebelumnya. Kepada Pemerintah harus terus berupaya membuat program dan melaksanakan pembangunan yang semakin memudahkan aksesibilitas dan mensejahterakan masyarakat khususnya untuk daerah terpencil.
2. Pemerintah harus lebih mempertimbangkan terkait daerah yang akan dibangun infrastruktur. Jangan karena fokus dan prioritas pembangunannya adalah membangun dan memelihara infrastruktur guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat namun mengorbankan daerah pengembangan pangan. Bagaimanapun juga pengembangan pangan juga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, jadi pengembangan pangan dan pembangunan infrastruktur harus berdampingan jangan merugikan salah satu agar kesejahteraan masyarakat tercapai, daerah pun semakin maju. Tentu hal

tersebut akan semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

3. Pemerintah harus terus mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya di daerah terpencil bahwa pembangunan infrastruktur harus terus dilakukan mengingat dampaknya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, selain itu infrastruktur yang memadai memberikan banyak dampak baik seperti memperlancar distribusi dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Arsyad, Lincoln, 1999 ; *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang. *Profil*. 3 Desember 2015.
<http://bappeda.malangkab.go.id/>
- Baldwin, Robert, 1981 ; *Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Negara-Negara Berkembang*, Jakarta : Bina Aksara.
- Dinas Bina Marga Pemerintahan Kabupaten Malang. *Berita*. 10 Februari 2015
<http://binamarga.malangkab.go.id/>
- Dinas Koperasi, usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang. *Home*. 6 Desember 2015
<http://dinkop.malangkab.go.id/>
<http://kpm.malangkab.go.id/>
- Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Malang. *Berita*. 6 Desember 2015.
<http://www.pu.go.id/isustrategis/views/9>
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho, 2003 ; *Kebijakan Publik : Perumusan, Implementasi, Evaluasi*, Jakarta : Elex Media Komutindo.
- Dunn, William, 1999 ; *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Hardiyatmo, Hary, 2007 ; *Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Raya*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Hill, Michael, & Peter Hupe, 2006 (2002) ; *Implementing Public Policy*, London : Sage.
- Kuncoro, Mudajad, 1997 ; *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan*, Yogyakarta : (UPP) AMP YKPN.
- Maleong, Lexy, 2006 ; *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Republik Indonesia. 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015. Sekretariat Kabupaten Malang. Malang
- Siagia, Sondang P, 2002 ; *Manajemen Strategik*, Jakarta : Erlangga
- Siagia, Sondang P, 2004 ; *Manajemen Strategik*, Jakarta : Bumi Aksara

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2015 ; *Infrastruktur Penggerak Roda Perekonomian*.
2 April 2015
<http://www.setgab.go.id/>

Subandi, 2014 ; *Sistem Ekonomi Indonesia*, Edisi Kedelapan. Bandung : Alfabeta

Sudarman, A. 1192 ; *Teori Ekonomi Mikro*, Edisi ketiga. Yogyakarta : BPFE

Sugiyono, 2013 ; *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Suharso, dan Retnoningsih, A. 2014 ; *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kesepuluh.
Semarang : Widya Karya

Wahab, Solichin Abdul, 2002 ; *Analisis Kebijakan : dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta : Sinar Grafika.

Winarno, Budi, 2002 ; *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo.



Daftar pertanyaan wawancara kepada

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang

1. Dalam pembangunan infrastruktur, hal apakah yang paling utama dalam pencapaian sasaran pembangunan infrastruktur?
2. Apa strategi utama dalam pembangunan infrastruktur di Kecamatan Kepanjen?
3. Adakah pencapaian dalam upaya pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur?
4. Apa sasaran utama dalam arah pembangunan infrastruktur Kabupaten Malang?

Pertanyaan berikut dibuat sesuai dengan teori yang digunakan oleh penulis.

5. Menurut teori yang peneliti gunakan yaitu dalam buku yang dituliskan Subandi, dalam pembangunan daerah ada beberapa strategi untuk mencapai sasaran pembangunan infrastruktur. Bagaimana implementasi yang dilakukan Bappeda Kabupaten Malang dalam pencapaian strategi pengembangan fisik?

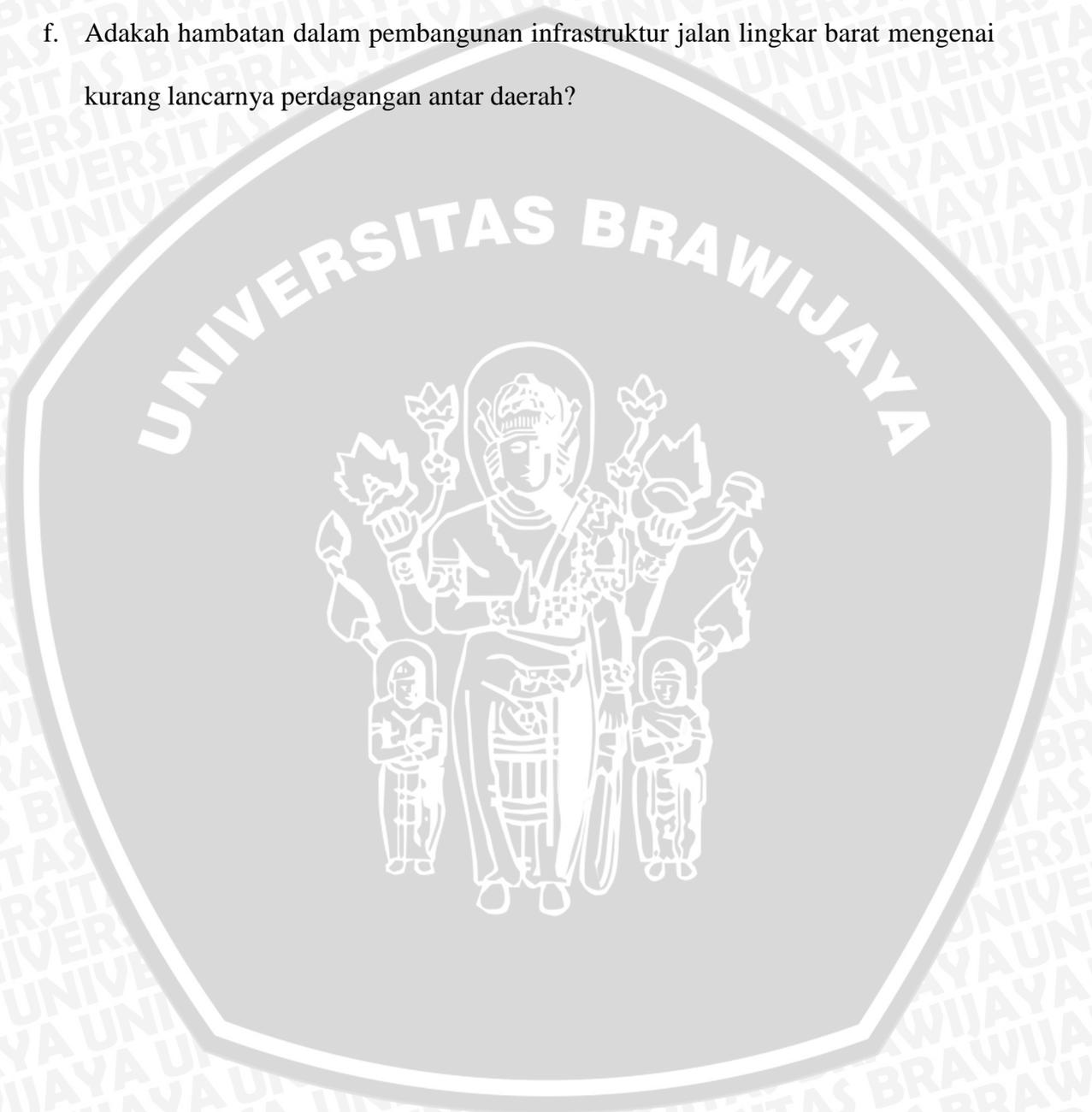
Dalam strategi pengembangan fisik ada alat pendukung agar strategi tersebut tepat sasaran dalam pembangunan infrastruktur.

- a. Apakah Bappeda Kabupaten Malang menggunakan sistem bank tanah dalam pengelolaan lahan yang akan dibangun infrastruktur?
- b. Bagaimana upaya Bappeda Kabupaten Malang dalam pengendalian dan pembangunan infrastruktur jalan lingkar Barat Kecamatan Kepanjen?
- c. Bagaimana upaya Bappeda Kabupaten Malang dalam penataab kota di Kecamatan Kepanjen agar pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat?

- d. Bagaimana upaya Bappeda Kabupaten Malang dalam pengaturan tata ruang Kecamatan Kepanjen dengan adanya jalan lingkar barat agar merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat?
 - e. Dalam pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat apakah Bappeda menyediakan atau membangun perumahan dan pemukiman untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat?
 - f. Jika pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat berlanjut dengan pembangunan perumahan dan pemukiman serta pembangunan usaha kecil, adakah penyediaan infrastruktur seperti air bersih, listrik, taman, lahan parkir dan sebagainya?
6. Bagaimana strategi pengembangan dunia usaha di kawasan jalan lingkar barat Kecamatan Kepanjen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat?
- a. Bagaimana upaya Bappeda Kabupaten Malang dalam menciptakan dunia usaha bagi masyarakat lokal?
 - b. Apakah Bappeda Kabupaten Malang menyediakan informasi terpadu kepada masyarakat tentang dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi?
 - c. Apakah Bappeda Kabupaten Malang menyediakan pusat konsultasi bagi pelaku usaha di sepanjang jalan lingkar barat?
 - d. Bagaimana upaya Bappeda Kabupaten Malang dalam strategi pemasaran bagi usaha kecil agar mampu bersaing dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat?
7. Bagaimana strategi Bappeda Kabupaten Malang dalam pengembangan sumberdaya manusia agar meningkatkan pertumbuhan ekonomi pasca pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat Kecamatan Kepanjen?

8. Bagaimana strategi Bappeda Kabupaten Malang dalam pengembangan masyarakat Kecamatan Kepanjen agar meningkatkan pertumbuhan ekonomi pasca pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat Kecamatan Kepanjen?
9. Apa yang mendasari strategi pembangunan jalan lingkar barat Kecamatan Kepanjen?
10. Apa upaya Bappeda kabupaten Malang dalam pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kecamatan Kepanjen?
11. Apa dampak positif dari pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat Kecamatan Kepanjen terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat?
12. Adakah dampak negatif pasca pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat Kecamatan Kepanjen?
13. Apa faktor pendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Kecamatan Kepanjen pasca pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat?
 - a. Bagaimana peran pemerintah menjadi faktor pendukung dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat pasca pembangunan infrastruktur?
 - b. Mengapa pertumbuhan ekonomi menjadi faktor pendukung dalam pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat?
14. Bagaimana dengan faktor penghambat dalam pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat Kecamatan Kepanjen?
 - a. Bagaimana terjadinya ketimpangan sektor industri dalam pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat?
 - b. Adakah hambatan dalam pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat mengenai kurang meratanya investasi?
 - c. Adakah hambatan dalam pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat mengenai mobilitas faktor produksi?

- d. Adakah hambatan dalam pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat mengenai perbedaan sumberdaya alam?
- e. Adakah hambatan dalam pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat mengenai perbedaan demografi?
- f. Adakah hambatan dalam pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat mengenai kurang lancarnya perdagangan antar daerah?





PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Panji No. 158 Lantai 6 Telepon (0341)392322 – Fax (0341) 392323
 Email bappekab@malangkab.go.id Website <http://malangkab.go.id>
KEPANJEN 65163

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 072/ *2715* /421.203/2015

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ADJARYANTO**
 NIP : 19581209 198212 1 001
 Pangkat / Gol. Ruang : Penata Tingkat I
 Jabatan : Kasubag. Umum dan Kepegawaian Badan
 Perencanaan Pembangunan Daerah

Dengan ini menerangkan bahwa nama tersebut dibawah ini :

No	Nama	NIM	Jurusan	Ket
1	Silvilia Agies Vinda Paramita	115030107111085	Ilmu Administrasi Publik	Universitas Brawijaya Malang

Teiah melaksanakan **Penelitian** di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan 13 November 2015.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 13 November 2015

An. Kepala
 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Kabupaten Malang
 Sekretaris
 Ub.

Kasubag. Umum dan Kepegawaian



ADJARYANTO

Penata Tk. I

NIP 19581209 198212 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341)366260 Fax. 366260
MALANG - 65119

SURAT KETERANGAN

Nomor : 072/ 686 /421.205/2015

Untuk melakukan Survey / Research / Penelitian / KKN / PKL / Magang

Menunjuk : Surat Dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang No. 14588/UN.10.3/PG/2015 Tanggal 15 Oktober 2015 Perihal : Riset/Survey

Dengan ini kami **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakannya kegiatan **Riset/Survey** oleh :

Nama / Instansi : Silvilia Agies Vinda Paramita / Mhs. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang

Alamat : Jl. MT. Haryono No. 163 Malang

Thema/Judul/Survey/Research : Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Pasca Pembangunan Infrastruktur Jalan Jalibar Kecamatan Kepanjen (Studi pada Pemerintah Kabupaten Malang)

Daerah/tempat kegiatan : Bagian Perekonomian Setda Kab. Malang

Lamanya : 1 Bulan

Pengikut : -

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati ketentuan - ketentuan / Peraturan yang berlaku
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada Pejabat setempat
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang ;
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas

Malang, 16 Oktober 2015

An. **KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN MALANG**
Idiologi HAM dan WASBANG

BUDIANTO HERMAWAN SH.Msi

Pembina

NIP : 19671204 199303 1 007

TEMBUSAN :

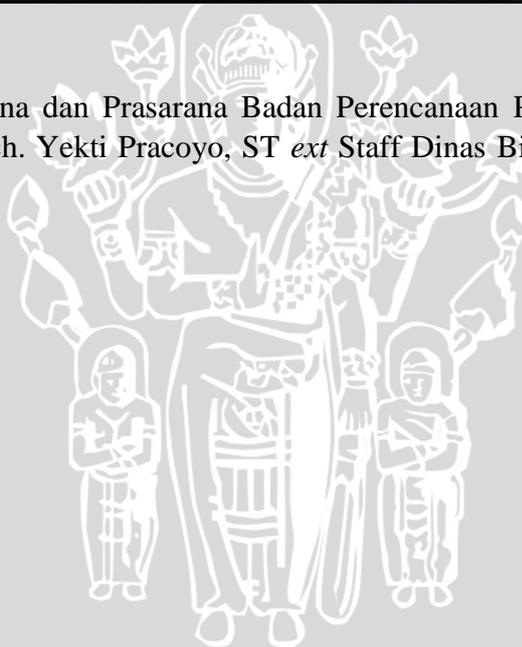
Yth.

1. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Malang
3. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Malang
4. Sdr. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Malang
5. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kab. Malang
6. Sdr. Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Malang
7. Sdr. Mhs. Ybs
8. Arsip



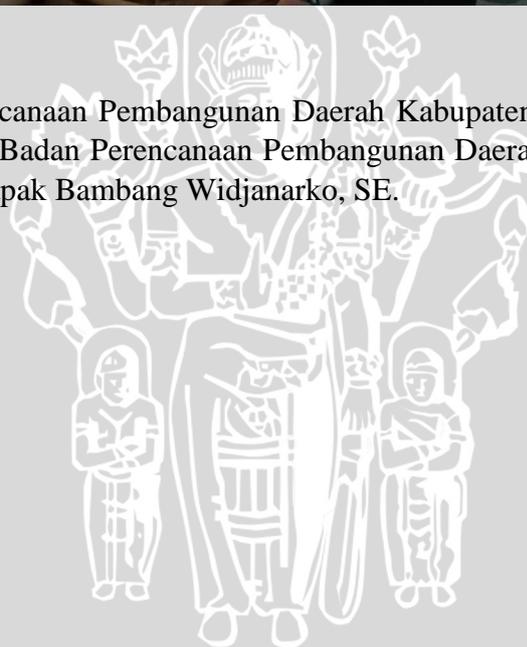


Gambar : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Bapak Moch. Yekti Pracoyo, ST *ext* Staff Dinas Bina Marga Kabupaten Malang.





Gambar : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malng dan Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Bapak H. Edi Suhartoni dan Bapak Bambang Widjanarko, SE.





Gambar : Proses wawancara dengan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Bapak Moch. Yekti Pracoyo, ST *ext* Staff Dinas Bina Marga Kabupaten Malang.